

Inovasi dan Strategi dalam Pengelolaan Sumber Daya

Oleh:

Ahmad Ruslan, Prasetyo Ananda Firdaus, Muhammad Hasbi
Hidayatullah, Rio Navy Saputra, Khoirunnisa, Gabriella Aisyah
Matos, Haikal Alfa Salam

Uwais Inspirasi Indonesia

Inovasi dan Strategi dalam Pengelolaan Sumber Daya

ISBN: 978-623-133-394-0

Penulis: Ahmad Ruslan, Prasetyo Ananda Firdaus, Muhammad Hasbi Hidayatullah, Rio Navy Saputra, Khirunnisa, Gabriella Aisyah Matos, Haikal Alfa Salam

Tata Letak: Galih

Design Cover: Prasetyo Ananda Firdaus

18.2 cm x 25.7 cm

v + 104 Halaman

Cetakan Pertama, Juni 2024

Diterbitkan Oleh:

Uwais Inspirasi Indonesia

Anggota IKAPI Jawa Timur Nomor: 217/JTI/2019 tanggal 1 Maret 2019

Redaksi:

Ds. Sidoarjo, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo

Email: Penerbituwais@gmail.com

Website: www.penerbituwais.com

Telp: 0352-571 892

WA: 0812-3004-1340/0823-3033-5859

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang Alhamdulillah,berkat rahmat dan karunianya pada akhirnya kami dapat menyelesaikan tulisan hasil karya artikel kami sekelas yang berupa buku dengan judul inovasi serta strategi dalam pengelolaan kekayaan.

Selanjutnya, terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait dalam proses pembuatan buku ini sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan telah banyak mewarnai penulis dalam menyelesaikan buku ini. Semoga dengan diterbitkan buku ini kami selaku penulis dapat memberikan manfaat untuk pembaca mengenai isu-isu sosial dan permasalahan sosial yang saat ini sedang dihadapi di Indonesia.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam buku ini untuk itu kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Dan semoga buku ini dapat memberikan manfaat untuk pembaca dan penulis.

Jakarta, 30 Mei 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
PRA-WACANA.....	1
BAB 1 PENDEKATAN HOLISTIK DAN INOVASI PEMERINTAH DALAM PERUBAHAN SOSIAL UNTUK PENGETASAN KEMISKINAN.....	3
A. Pengentasan Kemiskinan pada Masyarakat Desa	4
B. Kemiskinan.....	6
C. Pengentasan Kemiskinan.....	8
D. Perubahan Sosial	9
E. Inovasi Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan.....	12
F. Pendekatan Holistik Dalam Pengentasan Kemiskinan.....	15
BAB 2 MENGGALI AKAR PERMASALAHAN KELAPARAN DAN STUNTING DI ERA GLOBAL.....	19
A. Pemahaman Untuk Meminimalisir Tingkat Kelaparan dan Stunting	20
B. Strategi Pengetasan Kelaparan	22
C. Negara dan Perut Masyarakat	24
D. Solusi Masalah Kelaparan Global	26
E. Upaya Untuk Mengatasi Kelaparan	26
F. Mengenali Kebutuhan Nutrisi Tubuh.....	27
G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelaparan	27
H. Strategi Memenuhi Kebutuhan Nutrisi Tanpa Kelaparan	27
BAB 3 PERAN KESEHATAN DAN HUBUNGAN SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SERTA KUALITAS HIDUP...29	
A. Kesehatan dan Kesejahteraan	30
B. Hubungan Sosial Dalam Kesejahteraan Emosional Dan Mental	32
C. Definisi Dukungan Sosial.....	33
D. Peran Hubungan Sosial dalam Kesejahteraan Emosional dan Mental.....	33
E. Kualitas Hubungan Sosial	34
F. Dampak Hubungan Sosial pada Kesehatan.....	34
G. Peran Kesehatan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup dan Pertumbuhan Ekonomi	35

H. Penerapan Tema SDGs Kehidupan Sehat dan Sejahtera untuk Menangani Polusi Udara di Jakarta	38
--	----

BAB 4 MENINGKATKAN KUALITAS DAN KEMERATAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA UNTUK MENCAPAI GENERASI EMAS MELALUI KOLABORASI DAN INOVASI MEDIA PEMBELAJARAN..... 41

A. Mewujudkan Pendidikan Indonesia yang Merata Untuk Masa Depan Anak Bangsa.....	42
B. Penutupan	45
C. Guru Profesional Adalah Kunci Mewujudkan Pendidikan Berkualitas	45
D. Pentingnya Mencerdaskan Anak Bangsa Untuk Membangun Generasi Emas Indonesia.....	49
E. Bersama Menuju Masa Depan: Kolaborasi Untuk Pendidikan Berkualitas Yang Berkelanjutan	54
F. Minat Siswa Terhadap Pembelajaran Dengan Media Berbentuk Video	58
A. Kesetaraan Gender Sebagai Landasan Penting Dalam Pembangunan Berkelanjutan.....	63
B. Kepemimpinan Perempuan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender	68
C. Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki	71
D. Mendobrak Batas Menuju Kesetaraan Gender Di Abad Ke-21	74
E. Perempuan Dan Budaya Patriarki.....	77

BAB 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK 80

A. Pengelolaan Sanitasi dan Akses Air Bersih untuk Meningkatkan Kesehatan di Indonesia	81
B. Menangani Pencemaran Air Sungai dan Sanitasi di Indonesia.....	84
C. Pembangunan Air bersih dan sanitasi dalam mewujudkan ekonomi hijau ...	88
D. Tantangan Akses Air Bersih dan Sanitasi di Era Urbanisasi	92
E. Tantangan Kesehatan Perumahan dalam Memajukan Air Bersih dan Sanitasi yang Memadai di Indonesia	95

DAFTAR PUSTAKA 99



PRA-WACANA

Pada September 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang harus dicapai pada tahun 2030. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan SDGs dalam agenda pembangunan nasionalnya. Namun, upaya ini tidak lepas dari peluang dan tantangan yang harus dihadapi (Ishartono, 2015).

Salah satu peluang besar yang dimiliki Indonesia dalam mengimplementasikan SDGs adalah potensi ekonomi yang kuat. Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan populasi penduduk usia produktif yang besar, Indonesia memiliki modal yang kuat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Bappenas, 2017). Artinya Indonesia dapat berkontribusi secara nyata untuk dunia.

Peluang lain yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Dengan pengelolaan yang bijak, sumber daya alam ini dapat menjadi pendorong utama dalam upaya mencapai keberlanjutan lingkungan dan ketahanan pangan. Hal ini sejalan dengan tujuan SDGs dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memerangi perubahan iklim (Malihah, 2022). Meskipun praktik di lapangan tidak sejalan, upaya-upaya tersebut harus menjadi agenda prioritas bangsa.

Namun di balik peluang-peluang tersebut, Indonesia juga menghadapi tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara pulau-pulau besar dan kecil. Kesenjangan ini dapat menghambat upaya pencapaian target-target SDGs secara merata di seluruh wilayah Indonesia (Winda Fitri, 2021). Perlu adanya *mindmap* kepemimpinan yang kokoh dan kolaborasi disemua elemen bangsa.

Tantangan lain yang dihadapi adalah masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial yang masih tinggi. Meskipun angka kemiskinan menurun, masih terdapat kantong-kantong kemiskinan di berbagai daerah yang harus ditangani secara serius. Ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya juga dapat menghambat upaya pencapaian SDGs (Soebijantoro, 2011).

Selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Permasalahan seperti deforestasi, pencemaran udara dan air, serta degradasi lahan menjadi ancaman serius

bagi kelestarian lingkungan. Hal ini tentunya bertentangan dengan tujuan SDGs dalam menjaga kelestarian ekosistem dan memerangi perubahan iklim.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat. Pemerintah harus memainkan peran utama dalam menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung implementasi SDGs, serta menyediakan sumber daya yang diperlukan (Setyari & Angge, 2011).

Sektor swasta juga memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian SDGs, terutama melalui investasi dan praktik-praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Sementara itu, organisasi non-pemerintah dapat berperan sebagai mitra dalam mengedukasi dan memberdayakan masyarakat dalam upaya mencapai target-target SDGs (Elsa Anisa Gunawan, 2024).

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting dalam implementasi SDGs. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, rasa kepemilikan dan komitmen masyarakat terhadap upaya pencapaian SDGs akan semakin kuat (Nuraeniyah Jamalilail et al., 2023).

Meskipun terdapat tantangan yang harus dihadapi, Indonesia memiliki peluang yang besar dalam mengimplementasikan SDGs. Dengan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan dan pendekatan yang holistik, Indonesia dapat menjadi teladan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan di tingkat global (Charles et al., 2024). Jika itu terwujud, mimpi Indonesia menjadi negara besar akan menjadi kenyataan. Bahkan bukan hanya besar, Indonesia dimata dunia akan menjadi bangsa penyelamat sebagai penjaga keberlangsungan hidup umat manusia.

Bab 1

“PENDEKATAN HOLISTIK DAN INOVASI PEMERINTAH DALAM PERUBAHAN SOSIAL UNTUK PENGETASAN KEMISKINAN”



A. Pengentasan Kemiskinan pada Masyarakat Desa

Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan, yang merupakan isu kompleks dan multidimensional, menjadikannya fokus utama dalam pembangunan. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada (Ferezagia, 2018). Indonesia, seperti negara-negara berkembang lainnya, menghadapi permasalahan kemiskinan yang signifikan. Sejak berdiri, Indonesia masih bergulat dengan permasalahan kemiskinan yang signifikan dan belum tereksplorasi. Karena kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan kronis, maka seluruh elemen permasalahan harus dimasukkan dalam analisis untuk menentukan strategi pengelolaan mana yang tepat dan berkelanjutan untuk mencapai kebaikan bersama. Pemerintah telah melaksanakan banyak inisiatif untuk mengembangkan langkah-langkah pengentasan kemiskinan melalui penerapan berbagai program bantuan yang menysasar individu yang hidup dalam kemiskinan. Baik bantuan di bidang kesehatan, bantuan di bidang pendidikan, maupun inisiatif pemerintah lainnya untuk meningkatkan ketahanan masyarakat. Sebagai bagian dari proses pengentasan kemiskinan, pemerintah mentransformasikan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). MDGs, yang menargetkan periode 2005 hingga 2015, berupaya mengurangi separuh tingkat kemiskinan dari tahun 2005 pada tahun 2015, sehingga bisa mengatasi tantangan sosio-ekonomi. Selanjutnya, bekerjasama dengan SDGs pada tahun 2016 hingga 2030, tujuannya adalah untuk menghilangkan permasalahan sosial-ekonomi kemiskinan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali, dan untuk menghilangkan kemiskinan pada tahun 2030. Badan Pusat Statistik melaporkan pelaksanaan MDGs. Menurut Badan Pemerintah (BPS), pada tahun 1990 angka kemiskinan ialah 20,60%, yang awalnya, namun pada tahun 2008 menurun sebesar 5,90%. Dan pada tahun 2014, jumlah penduduknya berada 11,25% di bawah garis kemiskinan nasional. Meskipun kami tidak dapat mencapai target kami yaitu kasus (7,55%), kami harus mengakui kesulitan yang kami hadapi. Selanjutnya pada tahun 2016 ditetapkan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjunjung tinggi tujuan peningkatan kualitas eksistensi manusia yang semula ditetapkan oleh Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). (Administrator 2020) berlandaskan perkiraan terkini BPS, terdapat 27,54 juta jiwa penduduk miskin di Indonesia per Maret 2021. Menurut Kementerian Dalam Negeri, proyeksi jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 271.349.889 jiwa. Statistik ini menunjukkan bahwa 10,14% penduduk Indonesia diperkirakan akan mengalami kemiskinan pada tahun 2021. Tingkat kemiskinan telah mengalami penurunan yang sebanding dengan



penurunan pada tahun 2015. (Admin 2021) Teori ekonomi indikator memanfaatkan tiga pendekatan pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran untuk mengukur garis kemiskinan. Sedangkan BPS menghitung ambang kemiskinan dengan memanfaatkan metodologi berdasarkan pengeluaran. Meskipun demikian, memanfaatkan metodologi sosiologi untuk menentukan ambang kemiskinan suatu masyarakat masih merupakan tugas yang berat. Terkait dengan pengentasan kemiskinan, masyarakat pada umumnya menginginkan sebuah proyek ideal yang bisa memberikan dampak positif bagi seluruh wilayah. Program pengentasan kemiskinan yang ada saat ini seringkali disesuaikan dengan lokasi tertentu. Sayangnya, proyek-proyek pengentasan kemiskinan yang ada saat ini cenderung berfokus pada individu-individu yang telah berhasil mencapai tujuannya., namun mengabaikan potensi masyarakat lokal dan program-program sosialnya tidak berhasil atau gagal. Berbagai kondisi menyebabkan error. Ketika mempertimbangkan tiga elemen modal sosial: kepercayaan, norma, dan jaringan sosial, salah satunya sering diabaikan ketika melaksanakan program yang ada. Saya tidak yakin apakah ini karena masyarakat kurang percaya kepada pemerintah karena pesimis dengan program yang ada saat ini. Sebaliknya, ketika konvensi, seperti nilai-nilai yang melekat pada individualisme, diabaikan, hal ini mengakibatkan berkurangnya rasa memiliki dan kolaborasi kolektif. Atau, hal ini bisa merujuk pada kurangnya hubungan yang kuat antara masyarakat dan pemerintah. Aspek ini memerlukan fokus yang lebih besar dalam mengkaji isu-isu sosial-ekonomi dan merumuskan strategi yang strategis dan sesuai. Kepercayaan ialah elemen krusial yang harus ada dalam hubungan masyarakat dan pemerintah. Kepercayaan merupakan faktor krusial dalam pemerintahan, oleh karena itu ketika tingkat kepercayaan masyarakat kuat maka pemerintah harus memikul tanggung jawab penuh untuk menjaga kepercayaan tersebut. Namun demikian, dengan tidak adanya kepercayaan dari masyarakat, menjadi penting bagi pemerintah untuk merumuskan rencana komprehensif yang bertujuan untuk memperoleh kepercayaan dan kepercayaan masyarakat umum (Liata 2017). Penanggulangan kemiskinan daerah dan pendekatan penanggulangannya tidak bisa dipenuhi secara merata. Setiap lokasi mempunyai ciri khas yang berbeda-beda, meliputi sosial budaya, prospek ekonomi, dan lingkungan. Maka dari itu, sangat penting untuk meningkatkan gagasan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin, dengan memanfaatkan pengetahuan dan keahlian lokal mereka. Dalam konteks ini, masyarakat dijadikan sebagai subjek dan bukan sekedar objek. Konsep ini memandang masyarakat miskin bukan sebagai subyek yang tidak berketerampilan, namun sebagai subyek dengan keterampilan yang

kecil. Prinsip ini sejalan dengan prinsip swasembada Verhagen (1996), yaitu menghargai dan mengutamakan kapasitas masyarakat dibandingkan dukungan pihak lain. Prinsip “memulai dari apa yang dimiliki” menjadi prinsip pedoman dalam proses pembinaan pemberdayaan masyarakat (Maifizar 2016).

B. Kemiskinan

Kemiskinan ialah keadaan di mana seseorang, keluarga, kelompok, atau komunitas tidak mempunyai sarana untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar mereka seperti makanan, pakaian, dan perumahan, serta kebutuhan non-fisik seperti kesehatan, pendidikan, dan keselamatan. Mengatasi kemiskinan memerlukan kemampuan pemerintah untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, komunitas bisnis, komunitas lokal, dan negara-negara lain yang berhasil memerangi kemiskinan. (Maifizar 2016). Pemerintah saja tidak cukup untuk mencapai pengentasan kemiskinan; keterlibatan masyarakat dan dunia usaha sangat diperlukan. Alhasil, sangat penting untuk mendorong pemberdayaan masyarakat melalui upaya kolaboratif dari banyak pihak, termasuk tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, dan perantara seperti LSM, yang dapat memfasilitasi hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Ada tiga metode pemberdayaan masyarakat miskin: pendekatan sasaran, pendekatan kelompok, dan pendekatan pendampingan. Salah satu pendekatan yang ditargetkan adalah dengan secara khusus memperkuat komunitas demi kepentingan masyarakat miskin. Sedangkan pendekatan kelompok bekerja sama untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang muncul. Selain itu, strategi pendampingan melibatkan bantuan tenaga profesional terampil yang bertindak sebagai fasilitator kelompok, komunikator, dan katalisator dalam proses pembentukan dan pengorganisasian kelompok masyarakat, sehingga memungkinkan kelompok tersebut mencapai otonomi secara cepat (Lasmawan dan Madeh Suryadi, 2012). Ketiga pendekatan tersebut mempunyai peranan yang krusial dan saling berhubungan dalam proses pengentasan kemiskinan. Untuk mencapai pemberdayaan masyarakat, perlu dikembangkan rencana yang mencakup pemahaman komprehensif tentang akar penyebab kemiskinan dan indikator spesifik yang dimanfaatkan untuk menilai kemiskinan di tingkat lokal. Anda kemudian dapat memutuskan bentuk penguatan komunitas apa yang sesuai. Selain itu, program pemberdayaan masyarakat juga sangat memerlukan dukungan agar kegiatan yang sedang berjalan dapat dengan mudah dievaluasi dan dapat dibangun jaringan yang baik antar pemangku kepentingan. Alhasil, sebelum menentukan strategi pengentasan kemiskinan, perlu juga dilakukan analisis terhadap kemiskinan itu sendiri. Selain



faktor-faktor penyebab kemiskinan dan indikator-indikator kemiskinan itu sendiri, penting juga untuk berkolaborasi dengan individu-individu berkemampuan yang bisa bekerja sama dan berpartisipasi aktif dalam inisiatif-inisiatif yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan analisis dalam mengidentifikasi pendekatan yang tepat dan strategis untuk mengatasi permasalahan kemiskinan.

Pendekatan Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal:

Pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha secara aktif. Oleh karena itu, penting untuk mendorong pemberdayaan masyarakat melalui upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dapat memfasilitasi hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Ada tiga metode pemberdayaan masyarakat miskin yang dapat diterapkan:

1. **Pendekatan Sasaran:** Pendekatan Sasaran menitikberatkan pada hasil, menilai keberhasilan suatu program berdasarkan pencapaian output yang telah direncanakan (Djabar et al., 2022). Menargetkan komunitas secara khusus untuk memperkuat dan meningkatkan kondisi masyarakat miskin.
2. **Pendekatan Kelompok:** Pendekatan ini harus bersifat terarah, melibatkan masyarakat yang menjadi target atau bahkan dilakukan oleh mereka, serta menerapkan metode berkelompok (Sutikno et al., 2015). Mempromosikan kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.
3. **Pendekatan Pendampingan:** Melibatkan bantuan tenaga profesional yang terampil sebagai fasilitator, komunikator, dan katalisator dalam proses pembentukan dan pengorganisasian kelompok masyarakat sehingga kelompok tersebut dapat mencapai otonomi dengan cepat (Lasmawan & Madeh Suryadi, 2012).

Ketiga pendekatan tersebut saling berhubungan dan memiliki peranan krusial dalam proses pengentasan kemiskinan. Untuk mencapai pemberdayaan masyarakat, perlu dikembangkan rencana yang mencakup pemahaman komprehensif tentang akar penyebab kemiskinan dan indikator spesifik yang digunakan untuk menilai kemiskinan di tingkat lokal. Dengan demikian, dapat ditentukan bentuk penguatan komunitas yang sesuai.

Penerapan Kearifan Lokal:

Kearifan lokal merupakan serangkaian pandangan hidup, pengetahuan, dan strategi yang diterapkan oleh masyarakat lokal dalam mengatasi berbagai tantangan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Istilah "kearifan lokal" berasal

dari gabungan dua kata: "kearifan" yang berarti wisdom dan "lokal" yang berarti local. Istilah lain yang serupa dengan kearifan lokal termasuk kebijakan setempat, pengetahuan setempat, dan kecerdasan setempat (Njatrijani, 2018). Pengentasan kemiskinan berbasis kearifan lokal menekankan pada pentingnya memanfaatkan pengetahuan dan keahlian lokal. Konsep ini memandang masyarakat miskin bukan sebagai subjek yang tidak berdaya, tetapi sebagai subjek dengan keterampilan yang dapat diberdayakan. Prinsip ini sejalan dengan prinsip swasembada yang mengutamakan kapasitas masyarakat dibandingkan dukungan pihak luar (Verhagen, 1996).

Prinsip "memulai dari apa yang dimiliki" menjadi pedoman dalam proses pemberdayaan masyarakat. Dengan menghargai dan memanfaatkan kearifan lokal, program pengentasan kemiskinan dapat lebih relevan dan efektif. Strategi ini juga mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses pengentasan kemiskinan, meningkatkan rasa memiliki, dan membangun kerjasama kolektif.

Evaluasi dan Dukungan Berkelanjutan:

Program pemberdayaan masyarakat harus didukung dengan evaluasi berkelanjutan dan pembangunan jaringan yang baik antara pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan agar kegiatan yang sedang berjalan dapat dievaluasi dengan mudah dan diperbaiki sesuai kebutuhan. Selain itu, kolaborasi dengan individu-individu yang berkemampuan dapat meningkatkan analisis dalam mengidentifikasi pendekatan yang tepat dan strategis untuk mengatasi kemiskinan.

Analisis yang mendalam terhadap penyebab kemiskinan, indikator kemiskinan, dan keterlibatan aktif masyarakat adalah langkah penting dalam merumuskan strategi pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat membangun kapasitas untuk menghadapi permasalahan masa depan secara mandiri dan bertanggung jawab.

C. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan melalui kearifan lokal adalah strategi yang efektif untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di daerah pedesaan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam dan kemampuan individu dalam masyarakat, serta menerapkan prinsip pemerataan, partisipasi, kemandirian/kepercayaan, dan keberlanjutan, diharapkan masyarakat dapat mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan. Hal ini akan membantu membangun masyarakat yang kreatif, aktif

dalam pengambilan keputusan, dan mampu menghadapi permasalahan masa depan tanpa ketergantungan.

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial ekonomi, dan kemiskinan pada masyarakat pedesaan pada khususnya selalu menjadi permasalahan yang menarik untuk dikaji. Temuan riset menunjukkan bahwa variabel-variabel yang berkontribusi terhadap kemiskinan di daerah pedesaan meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi lemah.
2. Pendidikan buruk.
3. Adanya ketimpangan.
4. Perasaan ketergantungan.
5. Senang dengan zona tersebut.

Di antara penyebab kemiskinan, diperlukan strategi untuk mengentaskan kemiskinan. Strategi ini menggunakan pendekatan kearifan lokal dimana program yang ditawarkan berkaitan dengan peluang sosial budaya, ekonomi dan lingkungan masyarakat desa. Hal ini mendorong pendekatan lokal terhadap pengetahuan dengan menyelidiki sumber daya alam dan kemampuan individu dalam masyarakat pedesaan. Lebih lanjut, pencarian kearifan lokal memerlukan program pemberdayaan masyarakat dengan empat prinsip: pemerataan, partisipasi, kemandirian/kepercayaan, dan keberlanjutan. Kami berharap keempat prinsip penguatan komunitas ini akan membantu kita membangun masyarakat yang kreatif, aktif dalam pengambilan keputusan, dan mampu menghadapi permasalahan masa depan secara bertanggung jawab dan tanpa ketergantungan. Kemudian kemiskinan secara bertahap akan hilang dari kesadaran setiap orang.

D. Perubahan Sosial

1. Pendahuluan

Perubahan sosial merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam memerangi permasalahan kemiskinan yang bertujuan untuk menciptakan generasi yang lebih baik di masa depan. Kemiskinan adalah suatu tantangan yang dialami oleh masyarakat yang mengakibatkan dengan penderitaan, tidaksetara, dan keterbatasan dalam mengakses terhadap sumber daya seperti pendidikan, kesehatan dan pekerjaan yang layak. Menurut (Cahyat, 2007:4) (Adawiyah, 2020) dalam kemiskinan adalah situasi dimana individu atau rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan lingkungan tidak memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan atau melepaskan diri dari kerentanan. Maka dari sebab itu

kita harus memahami serta mendorong perubahan sosial yang dalam membantu untuk memerangi permasalahan kemiskinan. Pada perubahan sosial ini ada beberapa aspek yang mencakup di dalamnya seperti penguatan ekonomi yang didapatkan oleh masyarakat dan pelatihan keterampilan dalam berupaya untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas serta perubahan sosial tersebut akan bertujuan untuk kesejahteraan terhadap masyarakat yang mengalami dengan permasalahan kemiskinan. Adapun upaya yang bisa dilakukan dalam membantu untuk memerangi kemiskinan agar terciptanya generasi yang lebih baik, kita bisa melakukan dalam pelatihan keterampilan masyarakat sehingga masyarakat tersebut memiliki peluang dalam peningkatan kualitas kehidupannya. Dan upaya tersebut harus dilakukan dengan cara menyeluruh. agar semua masyarakat bisa merasakan manfaat terhadap upaya yang telah diterapkan.

2. Pembahasan

Perubahan sosial yang terjadi terhadap pembangunan yang bisa berdampak positif untuk mengurangi permasalahan kemiskinan yang terjadi dan adapun pembangunan tersebut menurut mahbub ul Haq dalam (Arifin, 2020) serta bisa mengangkat derajat kemiskinan, sebagai berikut:

1. Pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan *Gross National Product* (GDP) sering kali tidak menjangkau terhadap masyarakat kalangan bawah. Hal ini karena masyarakat kalangan bawah sangat membutuhkan penanganan
2. Meskipun pasar bukanlah pedoman yang dapat diandalkan dalam menentukan tujuan nasional suatu negara, namun mekanisme pasar sering menimbulkan ketimpangan akibat tidak meratanya distribusi pendapatan dan kekayaan.
3. Model pembangunan harus memiliki rasa manusiawi sehingga pembangunan mempunyai tujuan untuk melibatkan sebanyak mungkin manusia yang memungkinkan mereka untuk bisa berkembang.
4. Pembangunan harus mempunyai kebijakan kepada suatu arah untuk memenuhi terhadap kebutuhan masyarakat dibanding mengedepankan permintaan pasar.
5. Kepandaian pada pembagian dan tenaga kerja menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan, karena lapangan pekerjaan menjadi tempat pencarian seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
6. Meningkatkan produktivitas masyarakat miskin dengan cara mengarahkan penanaman modal ke sektor pro-miskin dalam masyarakat.

Maka dari itu menurut pendapat di atas bahwa pembangunan terhadap perubahan sosial harus tertuju kepada memajukan kesejahteraan dan meningkatkan kebebasan manusia agar perubahan tersebut bisa melibatkan sebanyak mungkin kesejahteraan yang terjadi pada manusia. Sehingga tujuan dari perubahan tersebut dapat membantu mengurangi kemiskinan yang terjadi dari berbagai wilayah sehingga masyarakat akan merasakan manfaat dalam perubahan itu sendiri jika perubahan tersebut terfokus terhadap kesejahteraan.

Menurut (Haris 2018) dalam (Pratiwi et al., 2022) Kemudian pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu bagian pembangunan yang dilakukan menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat sehingga melibatkan aspek kehidupan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan menginginkan terbebasnya kemiskinan. Menurut (Sahdan 2005) dalam (Prawoto & Selatan, 2009) lingkaran kemiskinan dapat diputuskan dengan meningkatkan keterampilan sumber daya manusia, meningkatkan dana investasi, dan mengembangkan teknologi. Terdapat sebuah upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi sebuah permasalahan pada kemiskinan untuk kesejahteraan masyarakat sebagai berikut:

- 1) Upaya mengurangi masalah kemiskinan sebaiknya dilakukan dengan cara menyeluruh, terpadu, lintas sektor dan menyesuaikan dengan keadaan dan budaya masyarakat tersebut.
- 2) Memperhatikan terhadap proses yang dilakukan tanpa mengabaikan hasil akhirnya, serta berikan kepada masyarakat miskin tersebut agar mereka merasakan keluar dari lingkaran kemiskinan.
- 3) Melibatkan hasil proses dialog dengan berbagai pihak dan konsultan sehingga seluruh pemangku yang berkepentingan pada masalah kemiskinan terutama masyarakat miskin.
- 4) Menaikkan rasa perhatian serta kesadaran kepada pihak yang terkait sehingga memiliki rasa semangat untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dengan upaya yang sudah direncanakan.
- 5) Memberikan ruang maksimal bagi berbagai kepekaan dan kreativitas terhadap semua kalangan masyarakat. Pada hal ini, pemerintah hanya bertindak menjadi insiator dan kemudian menjadi perantara dalam proses tersebut, hingga akhirnya kerangka syarat dan prosedur penanggulangan kemiskinan disepakati Bersama.
- 6) Pemimpin anggaran harus menyadari pentingnya pengentasan kemiskinan dan memastikan bahwa upaya ini merupakan prioritas utama di semua program dan lembaga. Dengan cara ini, pemberantasan kemiskinan menjadi sebuah gerakan darirakyat dan untuk rakyat.

Bahwa kemiskinan merupakan suatu permasalahan kondisi yang tidak hanya berkaitan dengan kurangnya pendapatan yang dihasilkan akan tetapi melibatkan keterbatasan pada akses layanan pendidikan, kesejahteraan dan sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas kehidupannya. Adapun perubahan sosial yang berorientasi pada pembangunan harus memprioritaskan terhadap kesejahteraan dan kebebasan masyarakat serta melibatkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusianya. Kemudian upaya dalam mengatasi permasalahan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan semua pihak.

E. Inovasi Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan

Persoalan kemiskinan tidak pernah hilang dari isu-isu kemanusiaan dan menjadi fenomena sejarah panjang diberbagai belahan dunia. Hal tersebut diperlukan penanganan dan harus diperhatikan oleh dunia, serta harus ditangani secara menyeluruh. Di dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) terdapat poin pertama yang menyatakan *no poverty* atau diartikan dengan tanpa kemiskinan, hal ini menjadi prioritas utama dalam SDGs.

Adanya kemiskinan menjadi dampak yang besar dalam kehidupan masyarakat dan menjadi tanggung jawab bersama bagi semua masyarakat, bukan hanya pemerintah saja. Jika suatu keluarga tersebut mengalami kemiskinan disitulah anak-anak terkena dampaknya dalam masalah kesehatan, pendidikan, dan lingkungan bersih. Yang paling bahaya jika sampai pada ditahap kelaparan, kekurangan gizi, kesehatan jiwa dan batinnya tidak dalam kondisi yang baik. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia menjadi permasalahan yang cukup serius dan menjadi permasalahan sosial yang terus-menerus ada. Penyebab utama kemiskinan karena tidak merata suatu kesejahteraan masyarakat dan tingginya kesenjangan sosial yang terjadi didalam suatu negara. Permasalahan yang terjadi pada standar hidup masyarakat yang rendah dengan tingkat pendapatan dan pendidikan yang rendah, juga mengakibatkan sumber daya manusia dan meningkatnya angka pengangguran.

Sebagaimana kemiskinan di tiap negara harus ditangani, serta berbagai upaya penanggulangan, seperti: pembentukan suatu program, strategi, akses layanan kesehatan, dan subsidi untuk menanggulangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. Berfokus pada pentingnya penanggulangan kemiskinan juga mempunyai pondasi yang penting dalam Pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh.

Pada *Sustainable Development Goals* mempunyai 17 tujuan dalam Pembangunan berkelanjutan, terdapat poin pertama yang menjadi fokus utama yaitu Tanpa Kemiskinan. Di dalam definisi kemiskinan yaitu suatu kondisi dan situasi dimana seseorang hidup serba kekurangan dari segi finansial, rendahnya pendapatan, kurangnya keterampilan, keterbatasan dalam berbagai kesempatan yang berperan dalam suatu Pembangunan.

Pemerintah mempunyai program-program yang sudah dibuat untuk menanggulangi kemiskinan. Program yang sudah dibuat salah satunya program Bantuan Langsung Tunai (BLT), program ini menjadi penyelesaian masalah kemiskinan sayangnya program ini tidaklah efektif sebagaimana bantuan yang diterima dalam bentuk tunai dan tanpa jelas digunakan untuk apa uang tersebut oleh si penerima. Persoalan ini menjadi masalah dimana penggunaan data kemiskinan tidak terprogram dengan baik dan tidak merata. Oleh karena itu, banyak warga yang tidak mendapatkan bantuan dari program tersebut.

Dari program yang sudah dibuat pemerintah dengan berbagai persoalan dan masalah yang tidak efektif, kemudian pemerintah membuat inovasi-inovasi guna menggurangi kemiskinan dan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Dalam pengertiannya Inovasi adalah suatu hal yang sudah ada kemudian terjadi perubahan untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Inovasi menjadi sebuah acuan bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi yang ada, serta mencari solusi dari permasalahan yang ada didaerah tersebut.

Pemerintah telah melakukan inovasi-inovasi dengan berbagai Program guna menanggulangi kemiskinan, seperti:

1. Program Keluarga Harapan atau (PKH).

PKH dibuat pada tahun 2007, program ini telah di laksanakan dengan baik serta efektif. Dimana PKH bukan dari program BLT yang langsung di berikan. PKH bertujuan dalam perlindungan sosial bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan serta memperbaiki kualitas hidup dalam hal pendidikan dan kesehatan, PKH dibuat dalam waktu jangka panjang dan ingin dicapai dengan baik. Program PKH tidak bisa melakukan sendiri tanpa adanya program-program yang mempunyai misi yang sama dalam memberdayakan kondisi masyarakat.

2. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Jamkesmas ialah suatu program nasional yang memberikan sebuah kemudahan dalam pembiayaan perawatan Kesehatan untuk masyarakat miskin. Tujuan dari program ini ialah untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan bagi seluruh penerima program tersebut guna menjamin untuk mendapatkan kesehatan yang baik dan efisien. Tujuan khususnya guna

menediakan kemudahan dari berbagai akses penyediaan layanan kesehatan dari program Jamkesmas. Yang menjadi sasarannya adalah masyarakat miskin/ kurang mampu serta yang tidak tergantung pada program kesehatan lainnya.

3. Program Indonesia Pintar (PIP).

Program PIP ini sebuah program dengan memberikan pembiayaan bantuan secara tunai bagi seluruh anak dari umur 6-21 tahun sebagai penerima KIP, dari keluarga yang kurang mampu/miskin. Terjadinya perubahan pada program Bantuan Siswa Miskin (BSM) menjadi PIP hingga 2014 lalu.

PIP menjadi sebuah program nasional dengan memiliki tujuan:

- a. Meningkatkan jumlah partisipasi dari pendidikan dasar hingga menengah.
- b. Membantu anak yang kurang mampu untuk bisa sekolah atau memenuhi kebutuhannya.
- c. Meningkatkan kesiapan peserta didik dalam memasuki tahap pendidikan yang lebih tinggi.
- d. Mendukung dalam penuntasan pendidikan dasar selama 9 tahun dan pendidikan menengah wajib belajar selama 12 tahun.

4. Program Solidaritas

Program ini sebagai pusat dari pendaftaran penerima bantuan pada masa Covid-19. Sapawarga Jabar Super App menjadi pusat terpadu untuk melakukan pendataan serta koordinasi melalui pemerintahan pusat, kabupaten, dan kota. Pada tahap perkembangan aplikasi ini, melibatkan berbagai pihak dari ketua RW untuk proses verifikasi dan validasi data, kemudian Pemprov Jabar melakukan proses data cleansing guna memastikan bantuan tersebut tepat sasaran.

Transparansi dari bantuan yang disalurkan dapat dijamin dari aplikasi atau website Solidaritas. Website juga dapat menampilkan data dari penerima bantuan berdasarkan Tingkat kabupaten/kota melalui filter pada aplikasi. Keberhasilan dari program ini, 4,9 juta penduduk di Jawa Barat telah menerima bantuan sosial yang telah disalurkan dengan tepat sasaran. Hal ini membuktikan bahwa teknologi dan inovasi yang telah dibuat dapat berperan penting dalam mengurangi kemiskinan pada saat pandemi Covid-19.

Adanya kemiskinan menjadi dampak yang besar dalam kehidupan masyarakat dan menjadi tanggung jawab bersama bagi semua masyarakat, bukan hanya pemerintah saja. Dari berbagai inovasi-inovasi pemerintah baik secara nasional maupun daerah/provinsi, melalui berbagai program diperlukan adanya

kerjasama guna menaggulangi kemiskinan. Evaluasi dari program tersebut harus selalu menjadi acuan untuk meningkatkan program yang lebih baik serta memastikan efektif dan berkelanjutan dari program yang telah dibuat Diperlukan kesadaran dari diri sendiri untuk memerangi dan menaggulangi kemiskinan yang ada di sekitar. baik melakukan partisipasi dalam berbagai program-program pemerintah atapun memberikan pelatihan dan pembelajaran kepada yang membutuhkan.

F. Pendekatan Holistik Dalam Pengentasan Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan masih menjadi isu penting bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Penanggulangan kemiskinan harus dipahami dan ditangani sebagai masalah global, sehingga memerlukan pendekatan komprehensif dan terpadu di tingkat internasional. Setiap program pengentasan kemiskinan harus dipahami secara keseluruhan dan dikaitkan dengan banyak kegiatan program lainnya.

Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), pengentasan kemiskinan dianggap sebagai prioritas utama. Hal ini merupakan sebuah kesepakatan global untuk mengentaskan kemiskinan dalam segala bentuknya di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Upaya pengentasan kemiskinan akan dikaitkan dengan tujuan global lainnya, seperti mengakhiri kelaparan, memastikan kesehatan dan kesejahteraan yang baik, menyediakan pendidikan berkualitas, mencapai kesetaraan gender, memastikan akses terhadap air minum dan sanitasi serta menyediakan energi bersih dan terjangkau. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini diperlukan dukungan timbal balik dan kemitraan global yang kuat.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia masih menjadi perhatian utama. Meski data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin mengalami penurunan, namun jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tetap tinggi. Adanya kemiskinan membebankan tanggung jawab moral pada setiap individu untuk menjaga kehidupan mereka yang hidup dalam kondisi tersebut. Kemiskinan juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi atau ditarik kembali oleh siapa pun. Skala permasalahan kemiskinan tidak dapat dinilai hanya dari perspektif statistik. Setiap statistik mencerminkan masalah yang dihadapi masyarakat dengan ancaman terhadap kehidupan mereka, tidak peduli seberapa kecilnya.

Kemiskinan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Ketika kemiskinan terjadi dalam sebuah keluarga, anak-anak di dalamnya akan menghadapi berbagai masalah, mulai dari kelaparan, kekurangan gizi, ancaman

kesehatan, bahkan terancam jiwanya. Selain itu, anak-anak tersebut juga kehilangan hak untuk menikmati pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan. Jika masyarakat dan negara membiarkan kondisi kemiskinan terjadi, maka hal itu juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Pada perspektif hak asasi manusia, kemiskinan adalah tanggung jawab bersama, baik dalam hal mencari penyebab maupun mencari solusinya.

Menurut Friedman (1979), kemiskinan adalah ketimpangan yang menjadi dasar kekuasaan sosial. Secara teori, tergantung pada penyebab yang mendasarinya, kemiskinan terbagi menjadi dua jenis.

Pertama, kemiskinan alami, yaitu kemiskinan akibat kelangkaan sumber daya dan/atau rendahnya perkembangan teknologi.

Kedua, kemiskinan buatan, yaitu kemiskinan yang terjadi akibat struktur sosial yang ada sehingga mengakibatkan anggota atau kelompok dalam masyarakat tidak mempunyai kendali yang sama atas sarana dan fasilitas ekonomi.

Kemiskinan tidak hanya menjadi masalah individu atau keluarga, melainkan juga menjadi tanggung jawab lingkungan sekitar, masyarakat, dan negara. Upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan pemenuhan hak-hak asasi manusia bagi setiap orang.

Kemiskinan terjadi karena adanya ketidaksetaraan kemampuan ekonomi di dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat tidak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut. Terdapat dua kebutuhan pokok yang sulit dipenuhi oleh kelompok masyarakat miskin :

- 1) Orang miskin hanya memiliki tenaga fisik sebagai aset produktif mereka. Peningkatan dan pemeliharaan kekayaan mereka bergantung pada semakin baiknya akses terhadap layanan publik, seperti perawatan kesehatan dan penyediaan air bersih, yang umumnya tidak tersedia bagi mereka yang paling membutuhkan.
- 2) Peningkatan pendapatan masyarakat miskin tidak akan meningkatkan taraf hidup mereka jika tidak tersedia barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pendapatan mereka.

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan seorang individu, keluarga atau anggota masyarakat untuk sepenuhnya memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti halnya anggota masyarakat lainnya pada

umumnya. Kemiskinan sering kali digambarkan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.

Seseorang dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar, seperti pangan, sandang, tempat tinggal, dan lain-lain. Ciri-ciri masyarakat miskin seringkali ditandai dengan kondisi tempat tinggal yang buruk, kualitas bahan bangunan yang buruk, kepemilikan barang-barang rumah tangga yang sangat terbatas, kurangnya toilet yang bersih, dan keuangan keluarga yang pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat miskin.

Penghasilannya tidak teratur dan tidak mencukupi. Karena pendapatannya rendah dan tidak stabil, keluarga miskin cenderung menghabiskan seluruh uang yang diperolehnya sepanjang hari tanpa bisa menabung untuk kebutuhan di masa depan. Kemiskinan juga dapat dipahami sebagai keadaan dimana seseorang tidak mampu mempertahankan dirinya sesuai dengan taraf hidup suatu kelompok masyarakat serta tidak mampu menggunakan tenaga, pikiran dan kemampuannya secara optimal. Kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan individu atau rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan minimum. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

Seseorang dikatakan miskin mutlak jika tingkat pendapatannya lebih rendah dari tingkat kemiskinan absolut yang telah ditetapkan, artinya pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum yang tercermin pada garis kemiskinan absolut. Tingkat pendapatan minimum membentuk batas antara kemiskinan dan non-kemiskinan, yang sering disebut garis kemiskinan.

Garis kemiskinan merujuk pada kemampuan seseorang atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup standar yang diperlukan pada waktu dan tempat tertentu agar dapat menjalani kehidupan. Standar hidup ini mencakup kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.

Hingga saat ini, pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk mengatasi dan mengurangi kemiskinan, termasuk menentukan standar kemiskinan dan memetakan kelompok kemiskinan. Selain itu, banyak program yang dikembangkan dan dilaksanakan di lapangan seperti terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pemberian kredit kepada masyarakat miskin, salah satunya dengan memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan bantuan sosial.

Menciptakan dunia tanpa kemiskinan adalah tantangan besar yang harus dihadapi oleh seluruh umat manusia. Kemiskinan tidak hanya merampas hak dasar manusia, tetapi juga menghambat pembangunan dan kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi akar permasalahan kemiskinan.

Perlunya pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan faktor fundamental yang memungkinkan masyarakat dapat bertahan, berkembang dan maju dalam kehidupan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin, terutama di bidang kesehatan, lapangan kerja, pendidikan serta akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti informasi, pasar, serta teknologi dan permodalan.

Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, sehingga mereka dapat bertahan, berkembang, dan mencapai kemajuan melalui peningkatan akses terhadap berbagai sumber daya yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan mereka. Dengan kerja keras, komitmen, dan kolaborasi yang kuat, kita yakin dapat menciptakan dunia yang bebas dari kemiskinan. Setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab untuk berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita tersebut, demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

Bab 2

“MENGKALI AKAR PERMASALAHAN KELAPARAN DAN STUNTING DI ERA GLOBAL”



A. Pemahaman Untuk Meminimalisir Tingkat Kelaparan dan Stunting

Seperti yang kita ketahui bahwa konsep strategi *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah sebagai pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan manusia dan kesetaraan yang mendorong pembangunan berkelanjutan guna menciptakan lingkungan hidup yang sejahtera. *Sustainable Development Goals* memiliki 17 tujuan dan 169 target capaian yang dikemukakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai kesejahteraan hidup manusia yang lebih berkelanjutan.

Berdasarkan tujuan diatas *Sustainable Development Goals* tentu saja memiliki target capaian yang harus dicapai secara global, salah satu tujuan *Sustainable Development Goals* yang harus mencapai target global adalah tujuan No.2, yaitu “Tanpa Kelaparan”. Menurut Global Hunger Index (2019) tingkat kelaparan dan kekurangan gizi di dunia terus mengalami penurunan sejak tahun 2000. Penurunan tingkat kelaparan tersebut memiliki keterhubungan dengan turunnya tingkat kemiskinan dunia dari 28,6% menjadi 9,9%. Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) “Tanpa Kelaparan” yaitu untuk memutuskan tingkat kelaparan, kemiskinan, stunting pada anak dan untuk memperbaiki semua yang telah melewati batas capaian. Tujuan terbentuknya pembangunan berkemajuan dengan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat untuk mendorong pencegahan kelaparan dan stunting, dengan cara memberikan makanan yang bernutrisi dan lain-lain sebagai nya.

Kelaparan merupakan permasalahan yang sering terjadi di Indonesia, salah satu tujuan SDGs yang harus tercapai adalah “Tanpa Kelaparan” karena masalah ini dapat berdampak pada masyarakat dan lingkungannya. Contohnya, pada anak usia dini yang terkena stunting pada masa balitanya ia akan terkena dampak yang sangat signifikan pada produktivitasnya dalam bermain dan bersosialisasi pada masyarakat/teman, serta berdampak pada penurunan kinerja berfikir dalam lingkungan sekolah. Bukan hanya itu, stunting juga memiliki banyak dampak yang membuat anak balita tidak dapat berkembang dari segi karakter dan pengetahuan mereka. Itu disebabkan karena sejak kecil kebutuhan 4 Sehat 5 sempurna tidak tercukupi.

Salah satu permasalahan yang terjadi pada tingginya tingkat kelaparan pada masyarakat, yaitu kurangnya pemahaman mengenai permasalahan nutrisi yang belum terpenuhi pada balita. Sehingga banyak balita yang tidak terpenuhi gizinya dan terkena stunting, banyak masyarakat yang masih mengesampingkan permasalahan stunting pada balita. Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat masih tidak peduli terhadap kesehatan balita, kebanyakan mengenai faktor

ekonomi dan pola asuh dalam keluarga yang tidak memperhatikan nutrisi dan gizi pada makanan yang dikonsumsi.

Permasalahan pada ekonomi orang tua juga dapat menyebabkan hal ini terjadi, dikarenakan faktor ekonomi yang tidak diperhitungkan. Ada salah satu program BKKBN yang menciptakan program “ Dua Anak Cukup” dan itu adalah cara paling efektif yang digunakan untuk membangun sumber daya berkelanjutan tanpa kelaparan ini. Karena anak itu adalah titipan dari Tuhan YME yang harus dijaga dan disayangi oleh kita sebagai orang tua. Maka sebab itu, kita menginginkan yang terbaik untuk masa depan yang berkualitas untuk anak. Salah satu caranya adalah dengan memperhatikan malnutrisi dan gizi terhadap makanan yang di konsumsi untuk membuat anak dapat bertumbuh kembang dengan baik. Pada dasarnya semua orang tua yang terlahir kekurangan ataupun berkucukapan mereka sama-sama ingin melihat anaknya tumbuh kembang dengan baik, kita tidak bisa menyalahkan siapapun dalam hal ini. Tetapi, ada baiknya kita mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan dengan cara memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa stunting dapat berdampak pada masa depan anak dan kinerja otak dalam bermasyarakat serta membangun produktivitas yang baik.

Tanpa kelaparan adalah target capaian melibatkan berbagai lingkup yang harus ikut berkontribusi dalam permasalahan ini, sebagai orang tua harus memperhatikan malnutrisi yang dikonsumsi pada anak, pemerintah yang harus membantu memberikan makanan yang bergizi untuk masa depan yang berkualitas, pemerintah memberi tingkat kemakmuran yang tidak terlalu tinggi agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari – hari, Masyarakat juga harus turut mendukung sumber daya berkembang dengan cara mendukung program pemerintah yang bertujuan untuk membangun sumber daya yang berkembang dan berkualitas pada negara Indonesia ini.

Tanpa kelaparan (Zero Hunger) memiliki tujuan utama yakni untuk meminimalisir permasalahan masyarakat yang kelaparan, anak balita yang terjangkit stunting, kemiskinan dan masih banyak lagi. SDGs adalah suatu target capaian yang terbaik untuk menciptakan sumber daya yang berkelanjutan, dalam hal ini semua harus ikut berkontribusi untuk tercapainya semua tujuan SDGs yang telah dibuat untuk membangun kesejahteraan dan hidup yang berkelanjutan. Dalam masalah ini kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan karena perkembangan pada balita tergantung dehan pola asuh yang diberikan oleh orang tua nya. Dengan hal ini cara yang paling efektif adalah memberi pemahaman terhadap masyarakat bahwa pentingnya memperhatikan malnutrisi dan gizi pada anak untuk mencegah stunting dan memperbaiki permasalahan yang terjadi.

Sustainable Development Goals(SDGs) merupakan suatu program yang bertujuan untuk membangun kesejahteraan dan kesetaraan manusia untuk menciptakan lingkungan hidup yang makmur. SDGs memiliki 17 tujuan yang harus dicapai oleh masyarakat dunia untuk membantu menciptakan lingkungan yang berkembang di masa yang akan datang, salah satu tujuan yang harus dicapai yaitu Tanpa Kelaparan. Tanpa kelaparan merupakan tujuan yang harus tercapai, karena sumber daya yang berkembang juga harus memiliki manusia berkembang dalam kehidupannya, jika manusia nya tidak dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik maka tidak akan berkembang pula suatu negara.

B. Strategi Pengetasan Kelaparan

Kemajuan sains, teknologi dan perekonomian dunia berkembang dengan sangat pesat, yang kiranya serba cepat ini menyebabkan permasalahan baru terutama sampah di lingkungan sekitar kita. Banyak aktivitas ekonomi yang merusak alam semesta, yang berlanjut, sehingga digodoknya patri afal seluruh dunia, akhirnya untuk menjadwal kehidupan yang lebih baik untuk warga dunia Program Tujuan Pembangunan (TPB) Juga dicetuskan melalui. MDG adalah kelanjutan dari tujuan mencapai Program Tujuan Pembangunan Milenium yang berisi 17 tujuan termasuk pemberantasan kelaparan.

Mengurangi kelaparan yang menyebabkan kematian, penyakit yang disebabkan oleh kelaparan dan stunting. Dalam kajian ini, beberap kajiada yang dibahas akan diperdalam tentang apa itu kelaparan, bagaimana situasi kelaparan di Indonesia serta bagaimana Islam menangani kelaparan.

Kelaparan merupakan gejala kelaparan dengan sirkulasi pangan kronis. Jika dibiarkan dalam rentang waktu yang lama bahkan bertahun-tahun, kelaparan kronis akan bertentangan dengan kesehatan masyarakat secara keseluruhan, dan pembangkit biayanya akan sangat tinggi. Kelaparan dan kekurangan gizi menyebabkan anemia pada bayi. Baik pada bayi sendiri dengan masa remaja, maupun pada orang dewasa memiliki ketahanan yang buruk terhadap penyakit, penurunan kecerdasan, dan pertumbuhan tubuh. Kelaparan selalu menyebabkan kekhawatiran dan selalu membuat muncul kesulitan bagi pemerintah. Kelaparan seolah menjadi langganan pemerintah yang harus segera dihilangkan. Alasan untuk mengatasi kelaparan sangat penting bagi pemerintah, dan bukan hanya sebagai perlindungan ekonomi bagi penduduk. Namun adapun langkah mengatasi pengetasan kelaparan. Bagi Negara kita sendiri, kemiskinan masih menjadi masalah yang memberatkan, karena budaya kita masih kesenjangan si kaya dan si miskin, Negara kita berkomitmen untuk mengatasi masalah tersebut.

Pemerintah juga mengupayakan mengatasi kemiskinan ini secara kebijakan pemerintah, bahkan pemerintah sudah merealisasikan saluran dana ke desa desa. Dana yang di salurkan oleh kementerian keuangan, setelah di salurkan kemudian di lakukan pembangunan daerah tertinggal. Kemudian ada penetapan prioritas dana desa, dana desa ini digunakan untuk membiayai program lokal desa bidang pembangunan. Solusi pengetasan kemiskinan

Solusi ini capaian pembangunan berkelanjutan itu, ada yang berkaitan dengan tujuan ini ialah pembangunan serta ketahanan pangan. Namun ada beberapa target:

1. Mengakhiri kelaparan khususnya terhadap orang miskin yang berada situasi rentan
2. Pendapatan pangan kecil khususnya perempuan, petani dan sumber daya lainnya, dan ada pasar yang menjadi penghasilan tambahan
3. Membantu memelihara ekosistem, adaptasi iklim, cuaca, banjir dan bencana lainnya
4. Mencegah pembatasan perdagangan di pasar pertanian dunia
5. Memastikan fungsi pasar pangan dan memfasilitasikan akses yang tepat waktu

Salah satu dampak saat pandemic yaitu gizi berkurang kronis dan mengakibatkan banyak yang meninggal karena infeksi umum, ini juga berkaitan dengan perkembangan yang buruk. Pertumbuhan dan perkembangan anak ini beresiko tinggi selama krisis saat ini karena makanannya terbatas. Dan untuk masalah kesehatan di masa depan yaitu berat badan pada anak sebagai masalah kesehatan karna sangat berpengaruh terhadap penyakit kronis pada anak tersebut. Kegemukan dan kurus sering terjadi bersamaa dan dianggap beban ganda

Langkah ini muncul yang bersifat program dan dilaksanakan dengan kegiatan zakat, kemudian zakat juga dianggap sebagai salah satu yang mempunyai peran sedekah. Zakat juga di gunakan dalam program kompensasi langsung melalui program yang dapat klarifikasi, diantara hubungan hubungan lainnya hubungan lain mungkin muncul dari pendekatan zakat. Diantaranya jenis program pengelolaan akat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pengelolaan zakat juga untuk bertambahnya jumlah penghimpun zakat

Kelaparan adalah kurangnya asupan makanan yang kronis, di situasi ini juga berdampak negative terhadap kesehatan masyarakat dan menyebabkan biaya kesehatan mahal. Program ini dapat di lakukan melalui bantuan pangan nontunai dan memberikan makanan kepada anak kecil dan lansia.

C. Negara dan Perut Masyarakat

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, memerlukan kebijakan inovatif untuk pangan merata. Pertumbuhan penduduk meningkat, menekan ketersediaan lahan pertanian. Negara harus memastikan ketersediaan pangan yang aman dan bergizi. Sektor pertanian penting dalam pembangunan ekonomi. Undang-undang pangan menetapkan ketahanan pangan sebagai prioritas. Namun, masih ada ketidakmerataan dalam pemenuhan pangan. Indonesia perlu mengatasi tantangan dengan langkah kebijakan inovatif. Pemenuhan hak pangan adalah tanggung jawab negara. Negara harus aktif dalam memenuhi hak bebas dari kelaparan.

Pembangunan di Indonesia dalam konteks ketahanan pangan telah menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan jangka panjang. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat Indonesia adalah negara agraris dengan populasi yang besar, sehingga memastikan ketersediaan pangan yang mencukupi untuk semua orang adalah suatu keharusan. Strategi yang diusung tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi pangan semata, tetapi juga pada stabilitas distribusi pangan, diversifikasi pangan, dan penciptaan ketahanan pangan yang terintegrasi dengan kebutuhan dan kondisi daerah yang beragam di seluruh Indonesia. Ini mencakup langkah-langkah seperti pengembangan infrastruktur, peningkatan akses terhadap teknologi pertanian, promosi pola tanam yang berkelanjutan, serta pengembangan pasar lokal.

Pemerintah memiliki peran sentral dalam upaya ini, baik melalui intervensi langsung dalam pengelolaan sumber daya dan infrastruktur terkait pangan, maupun melalui kemitraan dengan sektor swasta untuk memperluas jangkauan dan efisiensi dalam penyediaan pangan. Pendekatan ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam konteks konstitusi, pentingnya ketahanan pangan ditegaskan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang cukup dan layak terhadap pangan. Sebagian besar pasokan pangan Indonesia berasal dari sektor pertanian, oleh karena itu keberlanjutan pertanian menjadi sangat penting dalam mencegah ketergantungan pada impor pangan. Reformasi pertanian yang tertanam dalam konstitusi, terutama melalui Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan prinsip penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam, memberikan landasan hukum yang kuat untuk memperkuat sistem pertanian Indonesia.



Penilaian terhadap realisasi hak atas pangan dapat dilakukan melalui beberapa indikator, termasuk ketersediaan, aksesibilitas, akseptabilitas, dan kualitas pangan. Ini tidak hanya mencakup aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga aspek budaya lokal dan kesehatan makanan, yang semuanya penting untuk memastikan pangan yang aman, bergizi, dan bermutu bagi seluruh penduduk. Di tingkat internasional, Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan jaminan hak atas pangan bagi setiap warga negaranya sesuai dengan kovenan internasional yang telah diratifikasi. Ini membutuhkan kerja sama antarnegara dalam peningkatan produksi, konservasi sumber daya, dan distribusi pangan yang adil, serta dukungan dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan ketidakpastian pasar global.

Dengan demikian, peran negara sangatlah vital dalam memastikan hak atas pangan bagi setiap warga negaranya. Melalui pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, mengikuti prinsip-prinsip konstitusi, serta memenuhi kewajiban internasional, Indonesia dapat berhasil mengatasi tantangan dalam mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Ini tidak hanyamerupakan kunci untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga untuk memastikan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran negara dalam pemenuhan hak atas bebas dari kelaparan, sebagaimana diatur dalam Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, masih belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia yang tidak diimbangi oleh produksi pangan yang memadai dari sumber daya alam yang tersedia. Meskipun pemerintah telah mengambil langkah-langkah, seperti melakukan impor bahan pangan mentah dari berbagai negara, namun distribusi dan produksi pangan masih belum optimal.
2. Jaminan yang diterima oleh warga negara dalam pemenuhan hak atas bebas dari kelaparan merupakan kewajiban negara. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan pangan secara merata ke setiap daerah tanpa diskriminasi. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pangan yang sehat dan layak. Untuk mencapai hal ini, negara melakukan berbagai upaya, termasuk stabilisasi harga pangan yang dipasarkan agar dapat memastikan bahwa setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka secara merata dan terjamin.

D. Solusi Masalah Kelaparan Global

Menurut Gizi Global Kematian Index , angka kematian global mengalami penurunan pada tahun 2000. Popularitas menjadi faktor utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya yang berkaitan dengan pengurangan kemiskinan dan jumlah limbah pangan yang dihasilkan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. lingkungan hidup dan mengurangi angka bencana alam. Salah satu faktor utamanya adalah kebutuhan pangan dan rasa lapar bayi yang sangat tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan survei stunting pada masyarakat Desa Rancaekek Kulon dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara umum, meningkatkan kesadaran terhadap stunting, dan meningkatkan pendidikan tentang stunting. Stunting ini dimaksudkan untuk membantu bonding orang tua dengan anak kecilnya. Beberapa orang mungkin lebih memahami anak dibandingkan yang lain agar lebih memahami cara mencegah dan menangani stunting pada anak.

E. Upaya Untuk Mengatasi Kelaparan

Pertama (Adahan, 2019) Akses terhadap pangan berkualitas merupakan salah satu pilar utama dalam konsep "tanpa kelaparan" adalah memastikan akses universal terhadap pangan yang cukup dan berkualitas bagi semua orang. Hal ini melibatkan upaya untuk mengembangkan sistem distribusi pangan yang efisien dan adil, serta memperkuat infrastruktur dan kebijakan yang mendukung produksi pangan lokal. Kedua adalah peningkatan produksi pangan adalah meningkatkan produksi pangan secara berkelanjutan adalah kunci untuk mencapai visi "tanpa kelaparan". Ini melibatkan penerapan praktik pertanian yang ramah lingkungan, penggunaan teknologi inovatif seperti pertanian berbasis digital, dan investasi dalam penelitian dan pengembangan varietas tanaman yang lebih produktif dan tahan terhadap perubahan iklim. Ketiga adalah edukasi gizi dan Kesehatan (FAO, 2018) yaitu selain memastikan ketersediaan pangan yang cukup, penting juga untuk meningkatkan pemahaman tentang gizi dan kesehatan di kalangan masyarakat. (Dunia, 2018) Program-program edukasi tentang gizi yang tepat sasaran dapat membantu mengurangi angka kelaparan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Keempat adalah pemberdayaan masyarakat yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam upaya "tanpa kelaparan" adalah kunci keberhasilannya. Ini termasuk (FAO, 2011) memberdayakan petani kecil dan komunitas lokal untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, serta mempromosikan kemandirian pangan dengan mengembangkan kebun-kebun sayur dan peternakan skala kecil.

F. Mengenali Kebutuhan Nutrisi Tubuh

Sebelum kita membahas strategi untuk menghindari kelaparan, penting untuk memahami kebutuhan nutrisi tubuh kita. (R. Remans, 2014) Nutrisi yang seimbang adalah kunci untuk kesehatan yang baik. Tubuh kita memerlukan sejumlah zat penting seperti protein, karbohidrat, lemak sehat, vitamin, dan mineral yang berfungsi dengan optimal. Jumlah dan jenis nutrisi yang dibutuhkan dapat bervariasi tergantung pada usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan individu.

G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelaparan

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seberapa sering dan kuatnya rasa lapar seseorang. Pertama, kualitas makanan berperan. Makanan yang tinggi serat, protein, dan lemak sehat cenderung membuat seseorang merasa kenyang lebih lama. Kedua, frekuensi makan itu penting. Mengonsumsi makanan secara teratur dapat membantu menjaga kestabilan kadar gula darah dan mengurangi kemungkinan lapar. Ketiga, asupan cairan sangat penting. Dehidrasi sering kali disalahartikan sebagai rasa lapar, jadi penting untuk minum cukup air sepanjang hari.

H. Strategi Memenuhi Kebutuhan Nutrisi Tanpa Kelaparan

Pertama adalah mengonsumsi makanan yang kaya serat, karena serat dapat membantu mengisi perut lebih lama, mengurangi keinginan untuk makan secara berlebihan. Buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan adalah sumber serat yang baik. Kedua yaitu memilih protein yang berkualitas, karena dengan protein yang berkualitas dapat membantu memperpanjang rasa kenyang dan menjaga massa otot. Memilih sumber protein berkualitas tinggi seperti daging tanpa lemak, ikan, telur, dan produk susu rendah lemak. Ketiga adalah menjaga kadar gula darah agar tetap stabil dengan mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat kompleks, seperti roti gandum, nasi merah, dan quinoa, membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, mengurangi kemungkinan terjadinya kelaparan. Keempat adalah memerhatikan porsi makan dengan cara mengontrol porsi makan dan mengunyah makanan secara perlahan dapat membantu mengurangi rasa lapar. Hindari makan terlalu cepat, karena otak memerlukan waktu untuk menerima sinyal kenyang. Kelima adalah memakan camilan sehat seperti buah segar, yogurt rendah lemak, atau kacang-kacangan dapat menjadi pilihan yang baik untuk mengatasi kelaparan di antara waktu makan utama. Keenam yaitu memerhatikan kebutuhan cairan dengan cara minum

air yang cukup sepanjang hari. Kadang-kadang rasa haus bisa disalahartikan sebagai kelaparan.

Konsep "tanpa kelaparan" menawarkan visi yang optimis untuk masa depan di mana semua orang memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan bergizi. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dengan menggabungkan upaya dalam peningkatan produksi pangan, akses terhadap pendidikan gizi, dan pemberdayaan masyarakat, kita dapat mengatasi masalah kelaparan secara efektif dan membangun dunia yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua.

Memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh tanpa harus merasa lapar bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Dengan memilih makanan yang tepat, memperhatikan frekuensi dan porsi makan, serta menjaga keseimbangan nutrisi, kita dapat mencapai gaya hidup sehat tanpa mengalami kelaparan yang tidak menyenangkan. Penting untuk mendengarkan tubuh kita dan memberikannya nutrisi yang dibutuhkan untuk berfungsi dengan optimal, tanpa harus mengorbankan kenyamanan kita.

Bab 3

"PERAN KESEHATAN DAN HUBUNGAN SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SERTA KUALITAS HIDUP"



A. Kesehatan dan Kesejahteraan

Kesehatan dan kesejahteraan adalah dua aspek esensial dalam kehidupan manusia yang secara luas dipelajari dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk kedokteran, psikologi, sosiologi, dan ekonomi. Di dunia medis, kesehatan sering diukur oleh parameter fisik dan mental individu, seperti tingkat penyakit, fungsi organ tubuh, dan keseimbangan mental. Namun, lebih dari sekadar ketiadaan penyakit, kesehatan juga mencakup konsep kesejahteraan yang meliputi kebahagiaan, kepuasan hidup, dan kualitas hubungan sosial. Kesehatan dalam kategori ideal fisik maupun mental, memberikan fondasi yang kokoh bagi kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

Kesehatan yang optimal tidak hanya memberikan manfaat kepada individu secara langsung, melainkan juga memiliki dampak yang signifikan pada keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Individu yang sehat cenderung memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi, karena mereka mampu melakukan aktivitas sehari-hari tanpa terkendala oleh masalah kesehatan. Produktivitas yang tinggi ini tidak hanya menguntungkan individu tersebut dalam mencapai tujuan pribadi mereka, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi keluarga dan masyarakat. Selain itu, individu yang sehat juga lebih mungkin untuk terlibat dalam kegiatan bersosialisasi dengan masyarakat, seperti berpartisipasi dalam pekerjaan sukarela, organisasi masyarakat, atau usaha bisnis, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi di tingkat lokal maupun nasional.

Selanjutnya, kesehatan yang baik juga merupakan faktor kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas sosial. Dengan populasi yang sehat, risiko penyebaran penyakit menular dapat dikurangi, yang pada gilirannya dapat mengurangi beban sistem kesehatan dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Lingkungan yang sehat juga memberikan dasar yang kokoh bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, karena individu yang sehat cenderung lebih produktif dan kreatif dalam menghasilkan inovasi dan solusi untuk tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan demikian, kesehatan yang baik bukan hanya menjadi tujuan akhir dalam upaya pembangunan, tetapi juga menjadi fondasi yang penting bagi kemajuan ekonomi dan stabilitas sosial.

Di sisi lain, kesejahteraan individu juga dapat memengaruhi kesehatannya secara keseluruhan. Individu yang merasakan kebahagiaan, menjalin hubungan sosial yang positif, dan memiliki tujuan hidup yang terdefinisi cenderung mengadopsi kebiasaan hidup yang lebih optimal, seperti

rutin berolahraga dan mengelola stres dengan efektif. Oleh karena itu, kesejahteraan psikologis juga berperan penting dalam menjaga kesehatan fisik dan mental. Dalam konteks populasi yang lebih tua, di mana tantangan kesehatan seringkali menjadi lebih kompleks, memahami hubungan antara kesejahteraan psikologis dan kesehatan dapat memberikan pandangan yang lebih holistik dalam merancang intervensi dan perawatan yang efektif. Selain itu, temuan ini menegaskan bahwa kesejahteraan psikologis merupakan faktor yang signifikan dalam mendukung kesehatan secara keseluruhan.

Kesejahteraan yang tinggi dapat berperan sebagai faktor protektif terhadap penyakit fisik dan mental, serta mempromosikan perilaku hidup sehat dan kebiasaan yang mendukung kesehatan. Menurut Debra (2010) menunjukkan bahwa hubungan sosial, baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya, memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai bidang kesehatan, termasuk kesehatan mental, perilaku kesehatan, kesehatan fisik, dan risiko kematian. Para peneliti, terutama para sosiolog, telah memainkan peran penting dalam memahami hubungan ini, mengidentifikasi penjelasannya, dan menemukan variasi sosial dalam hubungan tersebut, seperti berdasarkan jenis kelamin dan ras. Studi menunjukkan bahwa hubungan sosial dapat memiliki efek baik maupun buruk pada kesehatan dan dapat terlihat sepanjang rentang kehidupan, mulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Ketiga, Granero-Jiménez et al. (2022) mengungkapkan keterkaitan yang signifikan antara kebugaran fisik dan kesejahteraan psikologis pada kelompok dewasa muda.

Beberapa hal tersebut mengindikasikan bahwa individu yang mempertahankan tingkat kebugaran fisik yang baik cenderung memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya aktivitas fisik yang teratur dan kondisi fisik yang prima dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan psikologis seseorang di dalam kelompok usia ini. Implikasinya adalah pentingnya menjaga kebugaran fisik sebagai bagian dari upaya menjaga kesejahteraan psikologis, terutama pada masa dewasa muda yang sering kali dihadapi dengan berbagai tekanan dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, Sfeatu et al. (2014) menyatakan persepsi individu terhadap kondisi kesehatannya tidak hanya ditentukan oleh diagnosis medis atau keadaan fisik semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor subjektif dan interpretasi individu terhadap kesehatan. Meskipun diagnosis dokter penting, kesehatan juga dipahami dari sudut pandang subjektif individu, sebagaimana dijelaskan dalam definisi kesehatan oleh WHO yang mencakup aspek positif dan subjektif. Kondisi kesehatan yang baik tidak hanya merupakan tujuan yang diinginkan secara individual, tetapi juga

merupakan komponen penting dari kesejahteraan secara keseluruhan, baik bagi individu maupun masyarakat. Dengan demikian, kesehatan memiliki dampak yang terhadap persepsi individu terhadap kondisinya sendiri serta terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kesehatan dan kesejahteraan merupakan topik yang kompleks dan penting untuk dipahami dalam konteks kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Kesehatan yang baik, baik secara fisik maupun mental, memiliki dampak yang luas tidak hanya pada individu, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Kesehatan yang optimal tidak hanya meningkatkan produktivitas individu, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas sosial. Di sisi lain, kesejahteraan individu juga berperan penting dalam memengaruhi kesehatannya secara keseluruhan, dengan adanya korelasi antara kebahagiaan, hubungan sosial yang baik, dan kesehatan fisik dan mental. Selain itu, pentingnya memahami persepsi individu terhadap kesehatannya sendiri dan pengaruhnya terhadap kondisi kesehatan juga telah disoroti dalam penelitian-penelitian tersebut. Dengan demikian, kesimpulan utama dari tinjauan ini adalah pentingnya pendekatan holistik dalam memahami dan mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan manusia, yang melibatkan tidak hanya aspek fisik, tetapi juga psikologis, sosial, dan lingkungan.

B. Hubungan Sosial Dalam Kesejahteraan Emosional Dan Mental

Hubungan sosial adalah interaksi dan koneksi antara individu atau kelompok di dalam suatu Masyarakat. Hal ini mencakup cara orang berinteraksi, saling mempengaruhi, dan membentuk hubungan dengan orang lain dalam komunitas mereka. Peran hubungan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan emosional dan mental adalah komponen yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat.

Kesejahteraan emosional dan mental adalah keadaan yang baik bagi seseorang yang dapat merasa senang, merasa aman, dan berpikir positif. Kehidupan seseorang sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan emosional dan mental mereka, mulai dari sehari-hari hingga akhir hayat mereka. Kesejahteraan emosional dan mental juga sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan sosial, yang merupakan indikator dari kesejahteraan yang lebih luas yang disebut kesejahteraan sosial. Hubungan sosial adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan emosional dan mental, dan hubungan sosial dapat membantu meningkatkan kesejahteraan emosional dan mental seseorang.

C. Definisi Dukungan Sosial

Rasa nyaman dan perhatian yang diterima setiap orang baik individu maupun kelompok, dikenal sebagai dukungan sosial (Sarafino, 2006) Pertukaran di mana seseorang dapat membantu orang lain juga biasa disebut dengan dukungan sosial (Taylor et al., 2006). Ini adalah sebagai respons yang diberikan oleh individu lain yang mengindikasikan sejauh mana jaringan komunikasi terjalin dan seberapa baik tanggung jawab dari hubungan timbal balik itu.

Menurut (Appollo & Cahyadi, 2012). "Dukungan sosial dapat berupa tindakan yang bersifat membantu melibatkan emosi, pemberian informasi, bantuan instrumen, dan penilaian positif pada individu dalam menghadapi permasalahannya." Namun, ketersediaan seseorang yang bersifat membantu adalah definisi dari dukungan sosial.

Unsur-unsur yang dapat berdampak pada dukungan sosial, Menurut (Stanley, 2007):

1. Kebutuhan primer: Pakaian, makanan, dan tempat tinggal.
2. Kebutuhan Sosial: Seseorang dengan aktualisasi diri yang lebih baik dikenal oleh masyarakat dibandingkan orang yang tidak pernah bersosialisasi. Mereka juga cenderung lebih ingin mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Sehingga, pengakuan itu adalah komponen penting dari penghargaan.
3. Kebutuhan Mental : kebutuhan ini terkait rasa aman, ingin tahu, dan religius tidak dapat dipenuhi sendiri. Apalagi jika mereka menghadapi masalah yang ringan atau sulit, orang cenderung mencari dukungan sosial dari orang lain untuk membuat mereka merasa dihargai, diperhatikan, dan dicintai.

D. Peran Hubungan Sosial dalam Kesejahteraan Emosional dan Mental

Hubungan sosial sangat penting untuk kesehatan mental. Hubungan sosial yang positif dan mendukung dapat memberikan rasa aman, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan kehidupan, dapat meningkatkan kesehatan mental. Namun, konflik dalam hubungan atau hidup sendiri dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan mental seperti rasa kesepian, kecemasan dan juga depresi. Kesehatan mental dipengaruhi oleh peran keluarga, teman, dan lingkungan kerja. Hubungan interpersonal di keluarga, pertemanan, dan tempat kerja juga mempengaruhi kesehatan mental. Hubungan positif dengan anggota keluarga dapat memberikan dukungan yang kuat dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Hubungan positif juga penting di tempat kerja. Mereka yang memiliki hubungan yang positif dan mendukung dapat melindungi diri dari stres dan masalah mental.

Perkembangan sosial anak sangat memengaruhi perkembangan emosi mereka. Anak-anak yang sering berinteraksi dengan orang dewasa dan teman sebaya dalam lingkungan yang positif cenderung memiliki regulasi dan respons emosional yang lebih baik. Keluarga dan guru juga dapat membantu membangun emosi yang sehat. Kesehatan mental seseorang, terutama pada anak-anak, sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekolah mereka. Rasa kesepian dapat dikurangi dan dukungan emosional dapat diperoleh melalui interaksi rutin dengan teman dan keluarga. Seseorang dapat mempertahankan kesehatan mental yang baik dengan meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan orang lain. Peran hubungan sosial dalam meningkatkan kesehatan emosional dan mental sangat penting.

E. Kualitas Hubungan Sosial

Hubungan sosial yang positif dan mendukung dapat meningkatkan kesehatan mental melalui dukungan sosial dan emosional. Kesehatan mental seseorang dipengaruhi oleh peran keluarga, teman, dan tempat kerja. Perkembangan sosial juga memainkan peran penting dalam perkembangan emosi anak. Kesehatan mental seseorang, terutama pada anak-anak, sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekolah mereka.

Upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat hubungan sosial di masyarakat adalah:

1. Komunikasi yang efektif
2. Empati dan saling pengertian
3. Menghargai keberagaman
4. Kolaborasi dan kemitraan
5. Partisipasi Aktif.

Untuk memperkuat hubungan sosial, kita perlu bersabar, memahami, dan berkomitmen untuk menjalin ikatan yang harmonis dengan orang lain. Kita dapat memperkuat hubungan sosial di masyarakat dengan terlibat aktif dan mengamalkan nilai-nilai saling menghormati dan kerja sama.

F. Dampak Hubungan Sosial pada Kesehatan

Hubungan sosial yang kuat dapat meningkatkan kebahagiaan dan berdampak positif pada kesehatan, seperti mengurangi kecemasan, stres, dan depresi, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan kesehatan fisik secara keseluruhan. Sumber lain menyatakan bahwa menjaga hubungan sosial yang kuat juga dapat menghasilkan harga diri yang lebih baik dengan rasa sakit fisik yang sebanding dengan penyakit. Penyakit jantung, masalah jantung, kekebalan tubuh

yang lemah, kanker, kecemasan, dan pikiran negatif semuanya terkait dengan hubungan sosial yang buruk. Singkatnya, dampak hubungan sosial terhadap kesehatan memiliki banyak aspek. Hubungan positif membantu kesejahteraan emosional, kesehatan fisik, dan kesehatan jangka panjang, sementara hubungan negatif dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan kesulitan emosional.

Kebahagiaan dapat meningkat dan risiko masalah kesehatan mental dapat dikurangi dengan melakukan upaya untuk meningkatkan hubungan sosial, seperti empati dan komunikasi yang efektif. Membangun hubungan sosial yang aktif dan positif penting untuk meningkatkan kesejahteraan emosional, mental, dan fisik setiap orang serta masyarakat secara keseluruhan karena hubungan sosial yang kuat dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan kesehatan fisik secara keseluruhan, sedangkan hubungan sosial yang negatif dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan dan masalah emosional.

G. Peran Kesehatan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Dan Pertumbuhan Ekonomi

1. Latar Belakang

Pembangunan yang berkelanjutan adalah salah satu cara penting untuk meningkatkan kesejahteraan negara. Salah satu komponen utamanya adalah pembangunan Kesehatan masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan secara keseluruhan kesehatan masyarakat. Dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, prinsip-prinsip seperti non diskriminatif, perlindungan, partisipatif, dan berkelanjutan menjadi pedoman. Prinsip-prinsip ini sesuai dengan prinsip-prinsip Sistem Kesehatan Nasional Tahun 2009. Selain memberikan penekanan pada pembangunan Kesehatan masyarakat, penting juga untuk mempertimbangkan komponen seperti sistem perekonomian dan efektivitas masyarakat dalam meningkatkan kesehatannya.

Untuk pertumbuhan yang berkelanjutan, sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dan kesehatan adalah salah satu kunci utamanya. Fokus dari komponen Kesehatan ini adalah produktivitas kerja individu dan keluarga, serta pencapaian akademik di sekolah. Orang-orang yang memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik cenderung lebih produktif, terutama di negara-negara berkembang di mana kebanyakan orang bekerja dengan tangan atau secara manual.

Oleh karena itu, untuk menjaga kesehatan masyarakat, pemerintah harus memberikan dana yang memadai untuk sektor kesehatan, yang mencakup tenaga medis, obat-obatan, puskesmas, dan rumah sakit. Pemerintah dapat

memprioritaskan Dana Alokasi Kesehatan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya untuk masyarakat menengah kebawah dan daerah terpencil. Ini dilakukan dengan tujuan mengurangi angka kematian ibu, bayi, dan anak, menangani masalah gizi, mencegah penyakit, dan memperbaiki kesehatan lingkungan.

2. Pembahasan

a. Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan setiap kegiatan ekonomi selama periode waktu tertentu disebut pertumbuhan ekonomi. Proses ini diukur dengan presentase perubahan pendapatan nasional dari satu periode ke periode berikutnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenat) adalah indikator yang sering digunakan untuk menilai kondisi ekonomi daerah. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi adalah istilah yang mengacu pada peningkatan output per kapita dalam jangka waktu yang lebih lama, yang menghasilkan lebih banyak pilihan untuk konsumsi produk dan layanan serta peningkatan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga mencakup peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat yang mencakup produksi barang dan layanan di suatu wilayah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi melibatkan perkembangan dalam satu aspek yang diukur melalui peningkatan produksi dan pendapatan. Peningkatan nilai PDB menunjukkan peningkatan pendapatan nasional.

b. Efektifitas Pekerjaan

Kemampuan seseorang atau kelompok untuk mencapai hasil, kualitas, dan waktu kerja yang diinginkan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dikenal sebagai efektifitas pekerjaan. Seringkali didorong oleh motivasi internal, fokus utamanya adalah mencapai target pekerjaan dengan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya yang optimal. Selain itu, efektifitas ini berhubungan dengan sejauh mana hasil kerja mencerminkan input, seperti keterampilan individu, sehingga dapat disebut sebagai efektif jika input dan hasilnya sesuai. Menurut Organisasi Kerja Internasional (ILO), implementasi efektifitas pekerjaan juga berkaitan dengan isu penting seperti pekerjaan yang layak dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang mencakup pertumbuhan ekonomi inklusif, pekerjaan produktif, seta hak ketenagakerjaan, dialog sosial, dan perlindungan sosial. Ini menunjukkan hubungan erat antara upaya untuk mencapai pertumbuhan

ekonomi yang inklusif dengan terwujudnya pekerjaan yang layak bagi semua orang.

c. Bagaimana Dampak Gizi Dapat Memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut penelitian, gizi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hubungan antara gizi dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa gizi masyarakat memengaruhi pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah. Kesehatan masyarakat meningkat seiring dengan peningkatan gizi masyarakat. Produksi kerja juga akan meningkat sebagai hasil dari peningkatan kesehatan masyarakat ini. Peningkatan produktivitas akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memproduksi produk dan layanan. Pada akhirnya, peningkatan produksi barang dan layanan ini akan menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Indikator Kesehatan mungkin memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Oleh karena itu, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah berkorelasi positif dengan tingkat kesehatan masyarakat.

d. Pengaruh Morbiditas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Morbiditas memiliki dampak yang negatif pada pertumbuhan ekonomi, dan ini sangat signifikan. Hubungan antara morbiditas dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa tingkat kesakitan masyarakat memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Morbiditas adalah istilah yang mengacu pada suatu keadaan penyakit, baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Kemampuan masyarakat untuk menghasilkan produk dan layanan akan menurun, seiring dengan meningkatnya angka morbiditas. Penurunan ini kemudian menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi kurang.

3. Penutup

a. Kesimpulan

Dari penjabaran diatas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan membutuhkan perhatian yang holistik terhadap faktor-faktor ekonomi, kesehatan, gizi, dan efektivitas pekerjaan. Kebijakan dan program yang mendukung peningkatan efektivitas pekerjaan, pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan dan gizi, serta upaya pencegahan dan

penanggulangan penyakit menjadi kunci dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, untuk mencapai kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, suatu wilayah harus memperhatikan tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga aspek kesehatan, gizi, dan efektivitas pekerjaan.

H. Penerapan Tema SDGs Kehidupan Sehat dan Sejahtera untuk Menangani Polusi Udara di Jakarta

1. Latar Belakang

Polusi udara merupakan masalah utama di Jakarta, salah satu kota terpadat di dunia. Penduduk Jakarta mempunyai risiko lebih tinggi terkena penyakit pernapasan, kardiovaskular, dan kanker karena polusi udara kota yang sangat tinggi. Menanggapi tantangan ini, Pemerintah Jakarta dan berbagai pemangku kepentingan telah mengadopsi Tema Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tentang Kesehatan dan Kesejahteraan untuk menangani masalah polusi udara.

Melalui penerapan tema SDGs ini, upaya pencegahan dan mitigasi polusi udara dilakukan secara holistik. Ini termasuk pengembangan infrastruktur hijau, promosi transportasi berkelanjutan seperti penggunaan transportasi umum dan sepeda, serta pengurangan emisi dari industri dan kendaraan bermotor. Selain itu, pendekatan ini juga mencakup edukasi masyarakat tentang pentingnya udara bersih bagi kesehatan dan strategi untuk melindungi diri mereka dari dampak polusi udara.

Dengan mengintegrasikan tema SDGs kehidupan sehat dan sejahtera ke dalam upaya penanganan polusi udara di Jakarta, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi penduduk kota. Ini akan memberikan manfaat jangka panjang tidak hanya untuk kesehatan penduduk, tetapi juga untuk ekonomi dan keberlanjutan lingkungan Jakarta secara keseluruhan.

2. Isi Pembahasan

Konstruksi, pembakaran sampah, proses industri, dan lalu lintas kendaraan merupakan penyebab utama polusi udara di Jakarta. Emisi karbon monoksida (CO), nitrogen dioksida (NO₂), dan partikel debu halus sebagian besar dihasilkan oleh kendaraan bermotor dan merupakan sumber emisi terbesar. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan gas dan partikel yang merupakan penyumbang utama industri. Sumber polusi udara tambahan di

Jakarta mencakup kegiatan konstruksi yang menghasilkan debu dan pembakaran sampah. Sumber-sumber ini berdampak buruk pada kesehatan masyarakat.

Kesehatan masyarakat sangat terganggu oleh polusi udara. Polusi udara meningkatkan risiko timbulnya penyakit pernapasan kronis seperti asma dan bronkitis, mengiritasi mata dan tenggorokan, serta menyebabkan gangguan pernapasan jika terpapar dalam jangka waktu lama. Polutan gas, seperti nitrogen dioksida (NO_2), dapat mengiritasi saluran pernapasan, dan partikel debu halus dapat masuk ke saluran pernapasan dan merusak jaringan paru-paru. Kesehatan anak-anak, orang lanjut usia, ibu hamil, dan orang sakit juga dapat sangat terancam.

Sustainable Development Goal (SDG) yang ketiga adalah menjamin dan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Karena polusi udara di Jakarta berbahaya bagi kesehatan masyarakat, hal ini sangat terkait dengan *Sustainable Development Goal* nomor 3. Polusi udara merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama di Jakarta, dan kondisi yang semakin memburuk mungkin akan mempersulit pencapaian *Sustainable Development Goal* nomor 3.

Meningkatnya penyakit pernafasan termasuk asma, bronkitis, pneumonia, dan infeksi saluran pernafasan atas dan bawah telah dikaitkan dengan polusi udara di Jakarta. Ketika kesehatan masyarakat sudah dalam kondisi genting, polusi udara dapat memperburuk keadaan dengan meningkatkan kemungkinan penyakit kardiovaskular dan paru-paru. Untuk mengendalikan polusi udara di Jakarta dan mencapai *Sustainable Development Goal* nomor 3, perlu mengurangi dampak penyakit pernafasan dan meningkatkan kesehatan jantung.

Pemerintah telah melakukan lebih dari sekedar mengeluarkan undang-undang dan peraturan untuk mengatasi masalah polusi udara; hal ini juga memperjelas lembaga mana yang bertanggung jawab dalam hal pengawasan dan pengelolaan, seperti yang dikemukakan oleh Apriyandi, 2009:

1. Kementerian Lingkungan Hidup bertugas membuat peraturan emisi dan mengawasi dampaknya terhadap lingkungan.
2. Pengawasan dan pengendalian kualitas bahan bakar merupakan tanggung jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Produk komponen kendaraan ramah lingkungan harus diatur oleh Kementerian Perindustrian. Selanjutnya divisi ini bertugas mengawasi dan memvalidasi workshop yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas udara perkotaan.

4. Pengujian jenis kendaraan bermotor yang baru diproduksi, termasuk pengujian emisi gas buang, serta pembelian dan pemasangan perangkat konverter, semuanya merupakan tanggung jawab Departemen Perhubungan.
5. Pemeriksaan kendaraan bermotor merupakan tugas pemerintah daerah.

Sosialisasi kesadaran polusi udara dan pengujian emisi kendaraan secara rutin bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang betapa berbahayanya kebiasaan masyarakat dan kendaraan terhadap udara, namun anggaran untuk kualitas udara kota masih rendah. Hal itu sebabnya mereka mewaspadaai polusi udara dan sering melakukan uji emisi kendaraan. Di sisi lain, terdapat tantangan seperti perencanaan yang tidak memadai dan kurangnya evaluasi dan pemantauan yang terkoordinasi.

Selain itu, peraturan perundang-undangan hanya sekedar komponen administratif dan bukan instrumen yang benar-benar membantu pemerintah memerangi pencemaran udara karena tidak dapat dijalankan karena tidak efektifnya penegakan hukum di lapangan.

3. Penutup

Berdasarkan pembahasan tersebut, jelas bahwa krisis polusi udara di Jakarta merupakan keadaan darurat lingkungan internasional yang memerlukan upaya bersama dari banyak sektor. Perlu ada perubahan dalam perilaku sosial kolektif, pengenalan teknologi baru yang ramah lingkungan, dan pelaksanaan langkah-langkah khusus untuk menurunkan emisi dari kendaraan bermotor dan pabrik. Selain itu, sangat penting untuk mengatasi masalah polusi udara global melalui tindakan dan kerja sama internasional yang terpadu. Masalah pernafasan, iritasi pada mata dan tenggorokan, alergi, dan peningkatan risiko penyakit pernafasan kronis seperti asma dan bronkitis merupakan dampak polusi udara Jakarta terhadap kesehatan masyarakat. Peningkatan tingkat polusi udara berpotensi memperburuk kesenjangan kesehatan di Jakarta dan menghambat kemajuan menuju SDG





Bab 4

“MENINGKATKAN KUALITAS DAN KEMERATAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA UNTUK MENCAPAI GENERASI EMAS MELALUI KOLABORASI DAN INOVASI MEDIA PEMBELAJARAN”



A. Mewujudkan Pendidikan Indonesia yang Merata Untuk Masa Depan Anak Bangsa

1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan tonggak utama dalam membangun sebuah bangsa yang unggul dan berdaya saing di era globalisasi seperti sekarang ini. Di Indonesia, upaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang mampu menghasilkan generasi masa depan yang cemerlang telah menjadi fokus utama pemerintah dan masyarakat. Strategi yang perlu diterapkan untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang berdaya saing ialah mempersiapkan generasi yang tangguh untuk menghadapi tantangan zaman. Masalah yang saat ini dihadapi Indonesia ialah kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas, dan kesenjangan dalam standar pendidikan masih menjadi hambatan yang harus diatasi Indonesia. Salah satu strategi utama untuk meningkatkan aksesibilitas Pendidikan di Indonesia bagi semua lapisan masyarakat, ialah lebih memperhatikan pendidikan di pelosok daerah yaitu melalui pembangunan lebih banyak sekolah-sekolah serta peningkatan infrastruktur pendidikan, serta program beasiswa untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dan juga peningkatan kualitas guru juga menjadi kunci utama dalam memberikan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan tuntutan zaman.

2. Pembahasan

Pendidikan merupakan tolak ukur bagi suatu negara dimana pendidikan ini menjadi aspek yang sangat penting untuk bangsa karena dengan mempunyai Pendidikan yang berkualitas negara akan mempunyai cikal bakal penerus bangsa yang berdaya saing tetapi kondisi saat ini. Pendidikan Indonesia jauh dari kata maju, mutu Pendidikan di Indonesia sangat tertinggal dengan negara-negara maju, ini disebabkan oleh banyak faktor yang membuat Pendidikan Indonesia masih rendah salah satunya adalah kesenjangan Pendidikan antara pedesaan dan perkotaan yang menyebabkan Pendidikan seringkali menggambarkan realitas yang tidak merata. Ketimpangan ini tidak hanya mencakup aksesibilitas fisik terhadap lembaga pendidikan, tetapi juga mencakup kualitas pengajaran, sumber daya, dan peluang pendidikan yang tersedia bagi masyarakat. Di perkotaan, siswa memiliki akses yang lebih mudah terhadap lembaga pendidikan dengan fasilitas modern dan tenaga pengajar terlatih serta infrastruktur yang memadai, Namun, di sisi lain di pedesaan, gambaran pendidikan seringkali berbeda secara drastis. Di pedesaan, tantangan-tantangan seperti aksesibilitas yang terbatas, kurangnya infrastruktur pendidikan, keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten serta kondisi sosial-ekonomi yang beragam sering menjadi penghalang utama

dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Sebagian besar sekolah di pedesaan masih menghadapi kesulitan dalam memenuhi standar pendidikan minimum, dan kurangnya guru yang berkualitas serta minimnya fasilitas pembelajaran menjadi masalah yang sering dihadapi. Ketidakmerataan ini menciptakan ketimpangan dalam kesempatan pendidikan dan potensi pengembangan individu antara siswa di perkotaan dan di pedesaan. Oleh sebab itu pemerintah bersama dengan masyarakat harus saling bekerja sama untuk mencapai pendidikan yang tidak merata dengan cara pemerintah dapat memberikan pelatihan-pelatihan terhadap sumber daya manusia terutama di daerah pedesaan yang minimnya akses internet yang kurang memadai terlebih di daerah pedesaan banyak nya masyarakat yang kurang peduli akan pentingnya pendidikan, disini peran pemerintah dapat memberikan akses pendidikan melalui layanan internet yang digunakan anak pedesaan untuk mengakses informasi dan akses belajar mereka. Selain itu pemerintah juga dapat melakukan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru yang akan ditempatkan mengajar di pedesaan dengan cara melakukan worksop, seminar dan pelatihan lain yang akan menunjang para guru sehingga tenaga pengajar memiliki kualitas yang sama baiknya dengan daerah yang ada di kota.pemerintah juga dapat mengubah pendekatan kurikulum menjadi berbasis kompetensi, di mana siswa dievaluasi berdasarkan pencapaian keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki, bukan hanya pengetahuan yang mereka hafal. Ini memungkinkan penekanan pada pengembangan keterampilan mereka.

1. **Penggunaan Teknologi Pendidikan**

juga bisa pemerintah lakukan dengan Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan seperti penggunaan platform pembelajaran online, aplikasi mobile, dan sumber daya digital lainnya untuk mendukung pembelajaran yang interaktif dan berbasis pada teknologi yang dapat mendukung pembelajaran siswa. pemerintah juga harus bekerja sama dengan

2. **Kemitraan Industri**

untuk Mengembangkan kemitraan antara lembaga pendidikan dan industri untuk memastikan bahwa kurikulum dan pengalaman belajar siswa mencerminkan tuntutan dunia kerja, serta mengembangkan banyak kesempatan Program magang, kunjungan industri, dan proyek kolaboratif antara sekolah/universitas dan perusahaan dapat membantu siswa memperoleh keterampilan praktis dan pengalaman yang berharga. Pendidikan juga harus terus-menerus Melakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan untuk mengidentifikasi kelemahan dan area yang perlu ditingkatkan. Evaluasi ini

harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk siswa, guru, orangtua, dan industri.

3. **Inklusi dan Aksesibilitas**

dengan Memastikan bahwa pendidikan berkualitas dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berasal dari daerah terpencil atau berpenghasilan rendah yang melibatkan penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai dan program bantuan keuangan bagi siswa yang membutuhkan serta Mendorong riset dan inovasi untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan tuntutan zaman. Dan Mendukung penelitian tentang metode pengajaran terbaru, teknologi pendidikan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas pendidikan untuk menciptakan generasi yang akan datang mampu mengembangkan keterampilan soft skills seperti kreativitas, kemampuan berpikir kritis, kerjasama tim, dan komunikasi efektif, yang sangat dibutuhkan dalam lingkungan kerja yang berdaya saing.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi yang besar dan beragam, memiliki tantangan unik dalam memastikan kualitas pendidikan yang merata di seluruh wilayahnya. Pentingnya pendidikan yang berkualitas tidak hanya terkait dengan kebutuhan individu untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan, tetapi juga dengan keberhasilan suatu bangsa dalam menghadapi tantangan global dan membangun masa depan anak bangsa yang berkelanjutan. Dengan pendidikan yang berkualitas, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka, berkontribusi pada kemajuan masyarakat, dan menciptakan perubahan positif dalam skala yang lebih luas. Melalui upaya bersama antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta, Indonesia dapat mengatasi berbagai tantangan dan mengimplementasikan strategi yang efektif untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi semua anak bangsa. pendidikan tidak hanya akan menjadi alat untuk mencapai kesuksesan individu, tetapi juga akan menjadi pendorong utama dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan.

B. Penutupan

Mewujudkan pendidikan Indonesia untuk masa depan harus berfokus pada meningkatkan pemerataan pendidikan dengan cara kompetensi guru yang berkompeten serta pendidikan tinggi yang berbasis pengetahuan, digitalisasi pendidikan, pemberdayaan lembaga pendidikan, pengembangan kurikulum, peningkatan mutu pendidikan, pengembangan lembaga riset, dan kemitraan dengan dunia industri. Pemerintah dan masyarakat harus saling berkolaborasi untuk meningkatkan pendidikan dan memberdayakan anak bangsa untuk menjadi agen perubahan dalam komunitas mereka sendiri. Oleh karena itu pemerataan pendidikan di Indonesia harus pemerintah lakukan agar semua anak bangsa dapat mendapatkan pendidikan yang layak untuk menciptakannya generasi anak Indonesia yang cemerlang dan pendidikan merupakan suatu fondasi utama bagi pembangunan suatu bangsa. Dengan pendidikan yang merata dan berkualitas, anak-anak bangsa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi secara positif dalam pembangunan negara dimasa yang akan datang.

C. Guru Profesional Adalah Kunci Mewujudkan Pendidikan Berkualitas

1. Latar Belakang

Pentingnya guru profesional dalam mewujudkan pendidikan berkualitas adalah bahwa guru tulang punggung sistem pendidikan. Mereka bukan hanya pengajar, tetapi juga menjadi mentor, penginspirasi, dan pembimbing bagi para siswa. Guru yang profesional memiliki pengetahuan mendalam dalam bidangnya, keterampilan pengajaran yang efektif, serta komitmen untuk terus belajar dan berkembang. Mereka mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, memotivasi siswa, dan membantu mereka mencapai potensi terbaik mereka. Dengan memiliki guru yang profesional, dapat dipastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pendidikan yang bermutu, mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dunia modern dengan sukses.

Negara maju sangat menghargai kompetensi di semua bidang manajemen, terutama di bidang administrasi pendidikan. Pendidik yang ahli mempunyai dampak besar terhadap jalur pendidikan suatu negara dan prospek jangka panjangnya. Pada akhirnya, sistem pendidikan suatu negara menentukan kualitas negara tersebut. Penulis artikel singkat ini akan berupaya menggali topik tentang bagaimana pendidik yang berkualitas merupakan kekuatan pendorong di balik sekolah berkualitas tinggi.

2. Pembahasan

a. Guru sebagai Pendidik Profesional

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, “Pendidik adalah mereka yang mempunyai kualifikasi guru, dosen, konselor, guru pembimbing, dosen, konselor,” mengakui profesi guru dan anggotanya sebagai tenaga kependidikan yang menyebarkan ilmu pengetahuan. Guru, dosen, konselor dan jabatan lain yang sesuai dengan profesinya dan terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Agar mempunyai arah yang jelas dalam mengelola pendidikan, maka penting bagi guru untuk memahami Nilai-Nilai Hartkat dan Martabat Manusia (HMM) yang merupakan kaidah keilmuan pendidikan. Tiga bagian HMM yang pertama adalah hakikat manusia, yang menurut Prayitno (2009:14) meliputi, (1) makhluk yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan (2) makhluk yang paling indah dan sempurna dalam pencitraannya. (3) Makhluk yang paling tinggi derajatnya, (4) Khalifah di muka bumi (5) pemilik hak-hak asasi manusia.

Dimensi-dimensi yang menyusun dimensi manusia menurut Prayitno (2009:15) adalah sebagai berikut: 1) dimensi kefitrahan; 2) dimensi keindividualan; 3) dimensi kesosialan; 4) dimensi kesusilaan; dan 5) dimensi keberagaman. Dimensi ini memungkinkan terjadinya pengembangan diri dan kemajuan kehidupan manusia. Ada lima kekuatan yang dianugerahkan Yang Maha Kuasa kepada manusia yaitu daya taqwa, daya cipta, daya karsa, daya rasa dan daya karya, menurut Prayitno (2009:19). Sebagaimana diungkapkan Suriasumantri (2003: 39). “manusia adalah satu-satunya makhluk yang sungguh-sungguh mengembangkan ilmu tersebut”

Melihat perspektif tersebut, menurut Suhartono (2006, p. 52) dan Suhartono, Syam (1986). : 153), keduanya berpendapat bahwa manusia pada dasarnya memerankan diri sebagai subjek dan objek yaitu menekankan pentingnya orang sebagai fokus dan objek pengajaran. Maksud dari “objek” dalam pendidikan adalah individu yang belum mencapai tingkat perkembangan pribadi tertentu dalam hal kematangan akulturasi dan integritas. Dengan kata lain, merekalah yang menjadi objek kajian atau “bahan” penelitian di masa depan. Dilihat dari sudut pandang ini, jelas bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan manusia potensi yang luar biasa. Sebagai suatu spesies, manusia sebagai Khilafah dimuka bumi karena manusia mempunyai derajat tertinggi yang tidak dimiliki makhluk lain.

b. Pendidikan, Hakikatnya dan Tujuannya

Menurut Prayitno (2008: 45), tujuan pendidikan adalah membantu siswa menjadi versi yang lebih indah dari dirinya dengan mengembangkan seluruh potensinya pada masing-masing lima bidang kekuatan. Pengabdian, imajinasi, inisiatif, kekuatan emosional, dan tenaga kerja adalah lima kualitas yang tercantum di sini. Oleh karena itu, meskipun memiliki keberagaman, pendidikan merupakan kekuatan pemersatu yang bekerja demi kebaikan semua orang.

“Agenda utama pendidikan adalah proses memanusiakan manusia,” menurut Danim (2003:4), Pemanusiaan mengacu pada proses membentuk individu menjadi manusia seutuhnya. Orang tidak menghormati, memuliakan, atau memanusiakan anak-anak, meskipun pada dasarnya mereka adalah manusia sejak mereka dilahirkan. Agar manusia menjadi manusia seutuhnya yang mampu menjadi khalifah dimuka bumi, menjaga kelestarian alam, berbuat baik kepada sesama dan menjadi makhluk yang dapat mencapai tujuan dunia dan akhirat. Tujuan pendidikan seharusnya adalah menanamkan prinsip-prinsip moral dalam pikiran generasi muda, menurut Crijn dan Rekosiswojo dalam Jalaluddin dan Said (1994). Pendidikan saja tidak cukup untuk melakukan penelitian ilmiah teoritis yang cerdas, menurut Suhartono (2006: 31).

Sedangkan menurut Jalaluddin dan Said (1994: 39), “Tujuan pendidikan Islam adalah kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Menurut Tilaar (2004: 54), tujuan utama pendidikan adalah memastikan bahwa semua individu melek huruf, bukan hanya cerdas secara akademis. Dalam hal ini tentunya memerlukan individu-individu yang tidak hanya berilmu, namun juga beradab dan terpelajar.

c. Guru Profesional dan Pendidikan Berkualitas

Aliran sungai pendidikan meliputi penelitian keilmuan pendidikan dan profesionalisme pendidik seringkali diabaikan oleh praktik PENTIP yang hanya berdiam diri di tengah aliran sungai (kajian keilmuan pendidikan dan keprofesionalan pendidik). Ciri seorang pendidik profesional yang dapat dipercaya adalah kemampuan untuk melihat gambaran besarnya, dari hulu hingga muara, dari sungai pendidikan, mencatat setiap detail secara tepat waktu dan akurat, dan kemudian secara cerdas menggabungkan data tersebut ke dalam praktik pendidikan. Menurut Prayitno (2011), satuan pendidikan berfungsi sebagai muara sungai ilmu pengetahuan yang tiada habisnya.

Guru yang mempunyai pemahaman yang kuat terhadap PENDIP, ilmu pendidikan, akan berupaya semaksimal mungkin menunaikan tanggung jawab jabatannya. Prinsip BMB3 Berpikir, Merasa, Berperilaku, Bertindak, dan Bertanggung Jawab selalu menjadi inti dari pekerjaan yang dilakukan. Instruktur yang bertugas selalu dibimbing oleh BMB3, dan siswa dapat yakin bahwa mereka akan menerima layanan terbaik dari instruktur mereka selama proses pembelajaran. Persiapan yang matang dimasukkan ke dalam rencana pembelajaran, serta administrasi dan penilaian kemajuan siswa. Memenuhi komitmen bukanlah tindakan kelalaian. Semalam, sistem berjalan. Pada batasan penyelenggaraan pendidikan, hal tersebut bukanlah suatu permasalahan yang tidak dapat dipahami oleh siswa di dalam kelas. Siswa lebih mungkin mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna jika mereka menganggap profesi guru bermanfaat dan jika praktik pembelajaran memprioritaskan pembelajaran daripada teknologi. Kesetiaan, tanggung jawab, cinta, dan keamanan finansial bukanlah satu-satunya hal yang memotivasi seorang guru untuk berangkat kerja setiap hari. Menurut Andreas Harefa dan Firdaus (2010) Jika pendidik diakui dan dihargai oleh masyarakat dan pemerintah, maka mereka akan semakin termotivasi untuk serius bekerja dan mengabdikan diri sepenuhnya untuk meningkatkan pendidikan di masa depan.

3. Penutup

Pendidikan yang bermutu hanya dapat terwujud bila bidang pendidikan dipimpin oleh para ahli, khususnya oleh guru-guru yang berkompeten dan terpandang di bidangnya. Konsep HMM adalah landasan di mana para pendidik ahli membangun praktik pedagogi mereka. Pendidik yang berpengalaman dan terlatih juga mempunyai pemahaman yang kuat tentang apa itu pendidikan. Mengingat tanggung jawabnya tidak sepotong-sepotong melainkan utuh dan sekomprensif mungkin dari hulu hingga hilir, maka guru profesional akan selalu mengedepankan PENDIP dan terhindar dari PENTIP. Sebab, pendidikan dan pembelajaran selalu berpedoman pada prinsip BMB3. Karena seluruh beban tanggung jawab ada pada Allah SWT, bukan pada siswa atau sekolah saja.

D. Pentingnya Mencerdaskan Anak Bangsa Untuk Membangun Generasi Emas Indonesia

1. Latar Belakang

Mencerdaskan anak bangsa sudah menjadi salah satu tujuan untuk mencapai pendidikan yang diwujudkan suatu negara, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Tujuan ini merupakan harapan besar negara untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan sejahtera. Pendidikan adalah proses pengembangan keterampilan manusia yang berubah sikap dan perilaku, dimana sikap emosionalnya dapat berlaku di lingkungan. Pendidikan juga merupakan upaya sadar kembangkan potensi diri, baik fisik maupun nonfisik. Agar mereka dapat mencapai keterampilan sosial dengan mengembangkan kepribadiannya. Pendidikan pun sudah tertanam sejak dini ataupun sejak lahir, yang dimana orang tua memberikan stimulus agar dapat berkembang. Dengan pendidikan diharapkan seseorang menjadi manusia bermutu tidak hanya cerdas saja namun harus memiliki potensi yang tinggi secara intelektual yang berpikir secara saintifik dan mengembangkan spiritualnya. Upaya peningkatan mutu pendidikan baik secara pendidikan akan terus dilakukan pada berbagai jenjang pendidikan, baik formal, nonformal maupun informal. Contoh pendidikan formal adalah: Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Universitas, sedangkan yang bersifat nonformal yaitu kursus pelatihan, seminal dan lain-lain, dan sedangkan informal yang berasal dari lingkungan keluarga. Dunia pendidikan tidak bisa diartikan hanya sekedar transmisi ilmu pengetahuan, teori dan faktor ademis. Tidak hanya ujian, penetapan kriteria kelulusan dan pencetakan ijazah, pendidikan dapat merubah pola pikir manusia dan juga pembentuk karakter. Pendidikan dapat diartikan sebagai proses pendewasaan kualitas hidup, pemahaman akan tujuan dan hakikat hidup yang sebenarnya serta kemampuan memahami bagaimana hidup apa adanya.

Dalam hal ini guru memegang peranan penting dalam fasilitator serta motivator pendidikan anak disekolah, sehingga dengan adanya guru disekolah pendidikan akan membangun karakter serta mencerdaskan jati diri anak bangsa, Karena pendidikan tanpa guru bagaikan ruang tanpa cahaya. Guru harus memenuhi empat keterampilan yaitu keterampilan pedagogik, personal, profesional dan sosial salah satunya adalah guru yang profesional dan bermutu akan membuahkan hasil regenerasi emas Indonesia dari tahun ke tahun. Karena pendidikan yang berkualitas berjalan seiring dengan peningkatan keterampilan dan kesejahteraan guru. Dalam hal ini pemerintah mewajibkan guru untuk lebih kreatif, inovatif serta inspiratif dalam perencanaan pembelajaran, pengembangan

kurikulum serta mengevaluasi. Menurut SDM Indonesia dari banyaknya permasalahan dalam mendidik masyarakat di Indonesia bukanlah pada kualitasnya, namun hal ini lebih cocok untuk sistem dan lingkungan pendidikan yang gagal mendukung pembangunan manusia secara maksimal, sehubungan dengan permasalahan tersebut maka pendidikan dapat menata masa depan secara bijaksana, berfikir lebih kritis dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam kehidupan. dengan pengertian pendidikan akan melahirkan generasi emas atau “*Golden Age*” untuk regenerasi penerus bangsa jadi tidak banyak pengangguran di indonesia, dan untuk anak – anak yang kekurangan pendidikan terpenuhi fasilitasnya. Dalam artikel ini, penulis akan menguraikan mengenai problematika pendidikan dalam mencerdaskan anak serta strategi dan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai akses menuju SDM pendidikan yang berintegritas.

2. Pembahasan

Pendidikan adalah pendidikan anak bangsa, yang dirancang secara sadar untuk mencapai suasana belajar dan proses pembelajaran yang melahirkan potensi pribadi, berakal budi, menguasai diri, berkepribadian, cerdas, akhlak mulia dan keterampilan yang dibutuhkan siswa dan masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara (2017: 11), mendefinisikan Pendidikan merupakan suatu langkah untuk mengembangkan watak dan jasmani anak sehingga dapat meningkatkan kesempurnaan hidup, yaitu mengantarkan anak hidup selaras dengan alam dan masyarakat. Dengan hal ini pada proses pendidikan anak dapat membentuk kemampuan dasar yang mendasar baik daya pikir (daya intelektual) dan kekuatan emosional (perasaan) yang ditujukan pada fitrah manusia dan orang lain.

Sistem pendidikan masa depan bangsa Indonesia adalah pendidikan yang mengantarkan generasi masa kini menjadi generasi emas Indonesia. Menurut Ketua Asosiasi Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Indonesia (ALPTKI) Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd. saat menyampaikan makalah utama dalam Konperensi Nasional Pendidikan Indonesia (Konaspi)VII yang diselenggarakan Universitas Negeri Yogyakarta, di Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Kamis (1/11/2012), Sedangkan pembinaan pendidikan bermutu atau berkualitas pada SDM adalah pembinaan yang dapat mewujudkan proses pendewasaan kualitas anak, yang pengembangannya memerdekakan anak dari kebodohan, ketidakmampuan, impotensi, kebohongan, dan moralitas serta keyakinan yang buruk. Dedi Mulyasana menjelaskan, pendidikan yang berkualitas berasal dari sistem perencanaan yang baik (*good management system*)



dan diselenggarakan guru yang baik (*good teacher*) dengan komponen yang berkualitas, khususnya guru, mewujudkan pendidikan yang bermutu meliputi beberapa langkah, antara lain:

1. Pemberdayaan Lembaga Pendidikan

Untuk mendukung pencapaian praktik pendidikan, lembaga pendidikan harus bertindak secara efektif, efisien dan produktif demi pendidikan yang bermutu. Setidaknya penyedia pendidikan dapat memperkuat lembaga pendidikannya sesuai dengan keadaan dan kemampuannya.

2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Mengembangkan sistem perkreditan yang berkualitas memerlukan paradigma dan prinsip, serta penjaminan mutu pendidikan berupa: pendidikan untuk semua, inklusif dan tidak membeda – bedakan siswa berdasarkan latar belakang, Pembelajaran sepanjang hayat menitikberatkan siswa yang menyikapi, memfasilitasi dan memotivasi siswa untuk menjadi pembelajar yang mandiri, kreatif, inovatif, dan berjiwa wirausaha.

3. Penjaminan Mutu Pendidikan Informal

Masyarakat berkepentingan untuk menjamin mutu pendidikan yang dilaksanakan secara individu, kolektif, maupun institusi. Pemerintah atau pemerintah daerah dapat membantu dan memberikan kenyamanan untuk menjamin kualitas pendidikan nonformal selanjutnya di masyarakat. Hal ini dapat melibatkan evaluasi kinerja berkelanjutan, serta peningkatan program pembelajaran.

4. Penjaminan Mutu Pendidikan Formal dan Nonformal

Suatu program pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu satuan pendidikan melalui tiga tingkat kriteria mutu, yaitu standar pelayanan minimum (SPM), standar nasional pendidikan tinggi (SNP) ini dipilih oleh satuan pelatihan pendidikan formal atau program. Ketiga kriteria tersebut dijadikan sebagai indikasi mutu satuan atau program pendidikan formal. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu baik pada pendidikan formal, nonformal maupun informal. sistem penjaminan mutu pendidikan, mutu pendidikan bisa digunakan untuk menciptakan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, diperlukan suatu rencana pengembangan yang strategis di sekolah.

Dunia pendidikan dimulai dari saat manusia lahir seperti anak dicerdaskan dengan diberi stimulus oleh orang tuanya dan anak pun berkembang melalui pembelajaran jalur pendidikan formal (tingkat sekolah), nonformal (masyarakat seperti pelatihan) dan informal (keluarga). Pendidikan tidak dilihat

dari latar belakang manusia namun, pendidikan tumbuh dan melekat didalam diri sendiri atau biasa disebut pembentuk karakter. proses pendidikan karakter harus ditanamkan dan dilakukan sejak dini. Nilai-nilai karakter ditanamkan kepadagenerasi emas dengan pemberian dan penguatan yang dilakukan secara berulang, karena karakter seseorang akan tumbuh melalui proses pembiasaan yang dilakukan. Pendidikan karakter yang diharapkan dari generasi emas ialah dapat memiliki pola pikir dan tingkah laku berlandaskan moral yang kokoh, kecerdasan yang tinggi, dan sikap kompetitif untuk visi yang cemerlang di masa depan. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2016) nilai-nilai dalam pendidikan karakter meliputi 5 nilai utama, yakni:

1. Religius, yakni mencakup dimensi hubungan antar manusia, hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan alam semesta. Penjabaran nilai religius yang lebih rinci dapat meliputi menghargai setiap agama dan juga kepercayaan masing-masing, anti kekerasan dan penindasan, toleransi, cinta damai, bekerja sama dan tidak memaksakan kehendak.
2. Nasionalis, yakni nilai karakter yang terlihat dalam cara berperilaku, bersikap dan berpikir yang menggambarkan kesetiaan. Memiliki rasa yang tinggi akan kepentingan bangsa diatas kepentingan sendiri, cinta tanah air, rela berkorban, dan toleransi terhadap keragaman budaya.
3. Mandiri, yakni nilai karakter untuk tidak bergantung terhadap orang lain dalam berperilaku dan bersikap. Menggunakan pikiran, tenaga, waktu untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan tidak mengandalkan orang lain. Penjabaran nilai mandiri yang lebih rinci ialah etos kerja (kerja keras), tangguh, profesional dan berani.
4. Gotong royong, merupakan nilai karakter yang menggambarkan sikap saling bahu membahu dan menghargai kerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan. Nilai karakter gotong royong dapat berupa solidaritas, musyawarah, mufakat dan sikap kerelawanan
5. Integritas, yakni berupaya membangun sikap dapat dipercaya dalam melakukan suatu tindakan maupun perkataan. Mempunyai komitmen dan kesetiaan terhadap nilai-nilai moral dan kemanusiaan.

Nilai karakter integritas dapat terlihat seperti jujur, komitmen tinggi, dan tanggung jawab. Keberhasilan pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor dan dapat dilakukan melalui berbagai cara, di sekolah sebagai pendidikan formal ataupun di lingkungan rumah sebagai pendidikan non-formal. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, “Tri Pusat Pendidikan”

ialahs ekolah, keluarga dan masyarakat merupakan pendukung penyelenggaraan pendidikan. Membangun pendidikan karakter bukan hanya dilakukan disekolah,tetapi dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Membangun karakter siswa mengenai nilai moral,etika, dan rasa berbudaya yang baik merupakan usaha dan tanggung jawab dari semua pihak. Generasi emas dikenal sebagai *Agent Of Change*, yaitu menjadi pembawa perubahan untuk kemajuan bangsa yang akan datang. Pendidikan karakter menjadi salah satu spek untuk peningkatan kualitas pendidikan. Pentingnya pendidikan karakter bagi generasi emas diharapkan mampu membawa perubahan akan keberhasilan pendidikan di Indonesia. Harapan dan cita-cita tersebut tidak akan terwujud apabila tidak adanya usaha dan kerjasama dari semua pihak, baik itu antar pemegang kebijakan dan pelaku kebijakan. Oleh sebab itu, untuk menciptakan generasi emas yang berkarakter harus dimulai dari kerjasama para pendidik.

3. Penutup

Pendidikan merupakan pemahaman wawasan untuk melatih pendidik untuk mengubah perilaku oelang yang dibina menjadi lebih baik. Generasi emas Indonesia adalah generasi saat ini yang siap menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih maju bagi generasi mendatang. Pendidikan erat kaitannya dengan generasi emas Indonesia, karena pendidikan adalah kuncinya dalam menyediakan Sumber daya manusia yang handal dan mampu untuk mengubah sikap seseorang sebab dapat meningkatkan kualitas. Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu di sekolah diperlukan suatu sistem pengelolaan yang hasilnya benar-benar dapat terasa oleh masyarakat. Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, perlu diperkenalkan beberapa inovasi pendidikan yang berdampak positif dan memberikan partisipasi signifikan kepada peserta didik agar cita-cita kesejahteraan nasional dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat baik mikro maupun makro. Dan juga untuk menjadikan guru sebagai agen perubahan dalam dunia pendidikan di masa yang akan datang.

E. Bersama Menuju Masa Depan: Kolaborasi Untuk Pendidikan Berkualitas Yang Berkelanjutan

1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam membentuk masa depan suatu negara. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang semakin pesat ini, pendidikan yang berkualitas menjadi kunci keberhasilan generasi muda agar mereka dapat tumbuh menjadi manusia yang kreatif, berintegritas tinggi, dan menatap masa depan dengan penuh percaya diri. Namun untuk mencapai pendidikan yang bermutu memerlukan keterpaduan berbagai aspek seperti pengembangan kurikulum yang relevan dan inovatif, pemanfaatan teknologi pendidikan secara efektif, pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, dan lain-lain. Salah satu cara untuk mencapai pendidikan yang berkualitas adalah dengan bekerja sama dengan pihak eksternal seperti orang tua, masyarakat, dan industri.

Pendidikan merupakan tonggak utama dalam mewujudkan masyarakat yang maju dan berkelanjutan. Namun, tantangan kompleks yang dihadapi dunia saat ini menggarisbawahi perlunya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan bahwa setiap anak mempunyai akses terhadap pendidikan berkualitas yang akan membantu mereka sukses di masa depan. Kinilah waktunya untuk bersama-sama melangkah menuju masa depan melalui kerja sama yang kuat dan berkelanjutan.

Pendidikan berkualitas berkelanjutan penting untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kolaborasi pendidikan adalah kunci untuk mencapai tujuan ini. Kerja sama pendidikan melibatkan pihak eksternal seperti pemerintah, dunia usaha, masyarakat, lembaga pendidikan internasional, dan lembaga pendidikan. Dalam konteks ini, kerja sama pendidikan dapat mencakup program pertukaran pelajar dan guru, pelatihan bersama dengan lembaga pendidikan internasional, serta kerja sama antar lembaga pendidikan dengan pihak eksternal, seperti yang dilakukan dalam Program Seribu Guru Indonesia yang diprakarsai oleh Kerja Sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Google Indonesia pada tahun 2016.

2. Pembahasan

Pendidikan yang berkelanjutan juga pastinya berperan penting dalam membentuk karakter dan kemampuan individu untuk membangun suatu masa depan yang lebih baik. Ini termasuk mengembangkan keterampilan seperti berpikir kritis, inovasi, kolaborasi dan kepemimpinan. Menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan kesenjangan sosial, pendidikan berkelanjutan adalah alat penting yang dapat membantu masyarakat

mengenalinya dan mengambil tanggung jawab untuk masa depan kita bersama.

Juga dengan kolaborasi pada pihak eksternal seperti orang tua, masyarakat dan industri dapat membantu dalam mengembangkan kurikulum yang relevan dan inovatif. Dosen dan mahasiswa dapat berdiskusi dengan pihak eksternal untuk mengidentifikasi materi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan sosial.

Mengembangkan kurikulum yang relevan dan inovatif penting untuk mencapai pendidikan berkualitas. Mata kuliah yang memadukan kebutuhan zaman dengan kearifan lokal akan membekali generasi muda dengan ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan tidak hanya dalam dunia akademis namun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengembangan kurikulum perlu mengintegrasikan pemanfaatan teknologi pendidikan secara efektif, pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, dan kemampuan peserta didik dalam menghadapi tantangan global.

Penggunaan teknologi pendidikan secara efektif dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Kolaborasi dengan pihak eksternal dapat membantu mengembangkan teknologi pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Pemanfaatan teknologi pendidikan secara efektif sangat penting untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Teknologi pendidikan membantu meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan keterlibatan siswa, dan meningkatkan kemampuan siswa dalam merespons tantangan global. Selagi menggunakan teknologi pendidikan, terdapat kebutuhan untuk mengintegrasikan berbagai aspek seperti pengembangan kurikulum yang relevan dan inovatif, pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, dan membekali siswa untuk menghadapi tantangan global.

Pengembangan pada sumber daya manusia berkualitas sangat penting untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Guru yang termotivasi dengan pelatihan berkualitas memberikan pelajaran yang menyenangkan dan mendidik. Dukungan negara dan masyarakat dalam bentuk apresiasi terhadap profesi guru juga dapat membangkitkan semangat di kalangan pendidik. Dalam hal pengembangan sumber daya manusia, terdapat kebutuhan untuk mengintegrasikan berbagai aspek seperti pengembangan kurikulum yang relevan dan inovatif, penggunaan teknologi pendidikan secara efektif, dan pengembangan kemampuan siswa untuk mengatasi tantangan global.

Kolaborasi terhadap pihak eksternal seperti orang tua, masyarakat, industri, dll penting dilakukan untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Kolaborasi dapat dicapai melalui proyek-proyek seperti pendampingan,

penggalangan dana, atau menciptakan peluang kerja bagi siswa setelah lulus. Dalam kolaborasi tersebut, diperlukan integrasi berbagai aspek seperti pengembangan kurikulum yang relevan dan inovatif, pemanfaatan teknologi pendidikan secara efektif, dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.

Di era global ini yang penuh perubahan dan tantangan, pendidikan berkualitas menjadi kunci untuk mencetak generasi unggul yang mampu memenuhi kebutuhan masa depan. Namun pencapaian pendidikan yang berkualitas tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kolaborasi dan kerja sama dari berbagai pihak.

Kolaborasi multipihak di bidang pendidikan berarti keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dan berperan dalam bidang pendidikan, seperti:

- a) Pemerintah yang berperan dalam merumuskan kebijakan pendidikan, mengalokasikan sumber daya dan memastikan bahwa semua anak di seluruh negeri menerima pendidikan berkualitas.
- b) Sekolah juga berperan dalam penerapan kurikulum, mengembangkan metode pembelajaran inovatif dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung.
- c) Guru sebagai fasilitator pembelajaran dan pembimbing bagi siswa.
- d) Orang Tua berperan dalam mendukung pembelajaran anak di rumah dan menanamkan nilai-nilai karakter yang baik.
- e) Komunitas dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan dan memberikan masukan kepada sekolah dan pemerintah.
- f) Dunia Usaha dan Industri berperan dalam memberikan kesempatan belajar dan bekerja bagi lulusan sekolah serta mendukung pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri.

Di era kemerdekaan, inovasi kurikulum, pemberdayaan guru, dan integrasi teknologi di ruang kelas menjadi pilar utama untuk memastikan setiap orang mempunyai akses terhadap pendidikan berkualitas. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terus berupaya meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan di Indonesia melalui langkah-langkah perubahan yang komprehensif.

Pentingnya kerja sama pada pendidikan juga tercermin dalam upaya Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pembangunan pendidikan yang berkelanjutan sangatlah penting dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kerjasama pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat dan pihak eksternal.

Dengan latar belakang ini, kolaborasi pendidikan bukannya tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan penggunaan sumber daya yang terbatas secara efisien dan adil. Selain itu, mengatasi permasalahan seperti kesenjangan pendidikan antar wilayah dan kurangnya kesempatan pendidikan yang berkualitas tetap menjadi prioritas. Saat mengukur kinerja kolaborasi, penting untuk melibatkan semua pihak terkait, termasuk pihak eksternal. Memastikan semua pihak memahami indikator kinerja yang digunakan dan proses evaluasi yang dilakukan. Hal ini akan membantu membangun kolaborasi yang sukses dan berkelanjutan.

Pendidikan global juga menghadapi tantangan, yaitu:

- a) Akses yang tidak setara terhadap pendidikan seperti jutaan anak di seluruh dunia masih kekurangan akses terhadap pendidikan berkualitas karena faktor faktor seperti kemiskinan, konflik atau diskriminasi.
- b) Kualitas pembelajaran yang hanya sekolah yang menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang dapat menghasilkan siswa yang siap menghadapi tantangan dunia nyata. Namun, banyak sekolah yang masih memiliki sumber daya yang terbatas dan kurikulum yang tidak relevan.
- c) Inovasi dan Teknologi telah membawa kemajuan luar biasa pada sektor pendidikan, banyak negara di dunia yang masih tertinggal dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.

Mewujudkan pendidikan berkualitas berkelanjutan memerlukan komitmen dan kerja sama berkelanjutan dari semua pihak. Berikut beberapa langkah yang dapat pula dilakukan:

- a) Menjalani komunikasi serta kerja sama yang efektif. Semua pihak perlu menjalin komunikasi dan juga kerja sama yang efektif untuk memahami peran dan tanggung jawab masing-masing.
- b) Melaksanakan proyek dan kegiatan kerjasama. Perlu dilaksanakan berbagai proyek dan kegiatan kerjasama yang melibatkan semua pihak, seperti proyek pelatihan guru, proyek pengembangan kurikulum, proyek partisipasi masyarakat, dan lain lain.
- c) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi tentu dapat digunakan untuk memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar pihak.
- d) Pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi rutin diperlukan untuk memastikan efektivitas proyek kolaboratif dan untuk melakukan perbaikan yang diperlukan.

3. Penutup

Pendidikan bermutu merupakan konsep yang amat penting untuk meningkatkan suatu mutu pendidikan di negara. Mewujudkan pendidikan yang bermutu memerlukan keterpaduan berbagai aspek seperti pengembangan kurikulum yang relevan dan inovatif, pemanfaatan teknologi pendidikan secara efektif, pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan kolaborasi dengan pihak eksternal. Dengan demikian, pendidikan yang berkualitas dapat memberikan hak asasi manusia yang berakar pada berbagai kebutuhan dasar manusia dan mempersiapkan generasi muda menghadapi masa depan dengan penuh percaya diri.

Melalui kolaborasi dan kerja sama yang berkelanjutan, kita dapat mencapai pendidikan berkualitas yang berkelanjutan dan mengembangkan generasi berbakat yang mampu menjawab tantangan masa depan. Mari kita bersinergi untuk menciptakan suatu masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik.

Mewujudkan pendidikan berkualitas berkelanjutan pun memerlukan komitmen dan kolaborasi semua pihak. Melalui persatuan, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, inovatif dan sesuai dengan tuntutan zaman. Bersama-sama, kita juga dapat membuka pintu dalam menuju masa depan yang lebih cerah bagi semua anak, di mana pun, sehingga setiap orang mempunyai kesempatan untuk mengembangkan dan mewujudkan potensi mereka yang sebenarnya.

F. Minat Siswa Terhadap Pembelajaran Dengan Media Berbentuk Video

1. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu, seorang guru mempunyai kemampuan untuk menciptakan suasana belajar yang menawan, imajinatif, inovatif, dan menyenangkan. Pendidikan wajib ikut serta kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi supaya bisa menyelaraskan lingkungan kelas dengan kebutuhan masa kini dan karakteristik individu siswa (Wisada et al, 2019). Pada era sekarang, kemajuan teknologi memberikan dampak yang signifikan khususnya dalam bidang pendidikan dengan mempengaruhi pemanfaatan media pembelajaran dalam tahapan-tahapan pembelajaran.

Media bisa memfasilitasi proses belajar siswa dengan menaikkan transmisi pengetahuan serta pemahaman topik. Pemanfaatan media dalam tahapan-tahapan pembelajaran bisa menaikkan minat belajar siswa, karena mencegah monoton dan kebosanan. Dalam bidang pendidikan, guru mempunyai kemampuan menilai dan memilih bentuk media yang tepat dan beragam. Video

pembelajaran mempunyai manfaat dalam meningkatkan semangat belajar siswa. Manfaat video dalam pembelajaran antara lain komunikasi efektif, penjelasan mendalam, kompleksitas, kemampuan untuk diputar ulang, dan kesempatan belajar individu (Jamaliyah & Wulandari, 2022). Video pembelajaran berpotensi meningkatkan semangat belajar siswa dan menjadi sumber motivasi. Dengan memanfaatkan video pembelajaran, siswa dapat memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap materi pelajaran yang ingin dipelajarinya.

2. Pembahasan

a. Pengertian Minat

Minat merupakan faktor kognitif yang dapat menjadi pendorong individu untuk mencapai tujuannya. Individu yang memiliki kepentingan dalam suatu objek cenderung untuk mengalokasikan tingkat perhatian yang lebih besar dan memperoleh kenikmatan yang lebih tinggi dari objek tersebut. Namun, jika objek tersebut gagal mendatangkan kesenangan, orang tersebut akan kehilangan minat terhadapnya. Derajat perhatian atau rasa senang terhadap suatu obyek dapat dipengaruhi oleh tingkat ketertarikannya. Berlandaskan ungkapan Eti Rohaeti (2005:28), mengembangkan minat mendorong siswa untuk belajar ketika siswa tersebut tertarik untuk belajar. Minat belajar akan timbul apabila materi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan, tingkat pengalaman dan keterampilan serta model pembelajaran yang beragam. Minat mendalam seorang siswa terhadap suatu mata pelajaran merupakan aset paling berharga dalam mencapai tujuan tertentu. Meningkatnya minat belajar didorong oleh cita-cita yang mendalam untuk meningkatkan gengsi atau mendapatkan pekerjaan yang menguntungkan, serta kerinduan akan kehidupan yang berkecukupan dan memuaskan.

b. Pengertian Media Pembelajaran

Dari sudut pandang pendidikan, media memegang peranan krusial dalam mempengaruhi efektivitas tahapan-tahapan belajar mengajar. Kehadirannya secara langsung secara mandiri mampu membangkitkan dinamika dikalangan peserta didik. Istilah “media pembelajaran” bermula dari kata Latin “Medius” yang secara langsung mempunyai arti “tengah”. Perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, mediator adalah agen perantara atau pembawa pesan yang memfasilitasi penyampaian pesan dari pengirim ke penerima. Media memegang peranan penting dalam tahapan-tahapan. pembelajaran. Istilah “Media” bermula dari kata “medium” yang

berbentuk jamak dalam bahasa. Istilah “perantara” atau “pengantar” adalah arti harfiah dari kata tersebut (Susiliana & Riyana, 2012:12).

Media pendidikan hanya mencakup bentuk-bentuk media yang bisa dimanfaatkan secara efisien dalam tahapan-tahapan pendidikan yang disengaja. Media pembelajaran mencakup berbagai macam materi, termasuk media komunikasi berteknologi canggih serta bentuk yang lebih mendasar seperti slide, gambar, diagram yang dibuat oleh guru, benda nyata, dan karyawisata di luar kelas.

c. Pengaruh Media Pembelajaran Video Terhadap Minat Siswa

Pemanfaatan media pembelajaran video berpotensi berdampak pada keterlibatan siswa, karena sumber belajar berbasis video memudahkan pemahaman. Video dalam pembelajaran memberikan pemahaman komprehensif kepada siswa tentang ide-ide yang dipelajarinya. Siswa didorong untuk secara konsisten mengembangkan pemahaman mereka tentang situasi kehidupan nyata dan meningkatkan kemampuan mereka untuk memimpin secara mandiri dalam proses pembelajaran.

Pembelajaran berbasis video merangsang minat siswa. Siswa menunjukkan minat yang tinggi ketika film dimasukkan ke dalam pengalaman belajar mereka, karena film menumbuhkan antusiasme serta menaikkan pemahaman mereka terhadap materi pelajaran. Video pembelajaran dapat menaikkan motivasi serta keterlibatan siswa dalam belajar dengan menawarkan sudut pandang yang beragam dan menawan, sehingga mencegah siswa mengalami kebosanan selama belajar.

d. Hubungan Media Pembelajaran Dengan Minat Belajar

Memanfaatkan media pendidikan seperti film dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Memanfaatkan media pendidikan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami dan menyimpan informasi. Tingkat minat belajar memegang peranan penting dalam menentukan prestasi akademik seorang siswa. Keberhasilan yang tinggi sering kali berasal dari kecenderungan yang kuat untuk belajar. Kurangnya minat belajar dapat menyebabkan prestasi akademik di bawah standar. Untuk meningkatkan hasil belajar mereka, penting bagi siswa untuk memiliki kecenderungan yang kuat untuk memperoleh pengetahuan dalam mata pelajaran tertentu.

3. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas dapat dilihat bahwa minat siswa dapat berpengaruh dalam pembelajaran dengan media berbentuk video. Pembelajaran dalam bentuk video menjadikan siswa menjadi tertarik dalam belajar serta bisa menaikkan motivasi siswa, dikarenakan menyediakan sejumlah tampilan yang menarik dengan demikian tidak menjadikan siswa bosan saat belajar. Minat belajar akan timbul apabila materi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan, Tingkat pengalaman dan keterampilan serta model pembelajaran yang beragam

Bab 5

Kesetaraan Gender



A. Kesetaraan Gender Sebagai Landasan Penting Dalam Pembangunan Berkelanjutan

1. Latar Belakang

Perbincangan mengenai isu kesetaraan gender tengah menjadi sorotan utama saat ini. Pada hakikatnya, setiap individu dilahirkan dengan hak yang sama. Oleh karena itu, setiap bentuk diskriminasi terhadap laki-laki maupun perempuan dianggap tidak adil. Hak-hak yang sama seharusnya diperoleh oleh semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, baik dalam konteks politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan bidang lainnya. Melanggar hak-hak ini berdasarkan gender dianggap sebagai tindakan yang tidak tepat. Oleh karena itu, perwujudan kesetaraan gender sangat penting untuk mencegah adanya diskriminasi terhadap laki-laki dan perempuan.

Komponen kunci dari pembangunan berkelanjutan adalah kesetaraan gender, yang menjadi landasan untuk mencapai tujuan pembangunan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kesetaraan gender dalam kerangka pembangunan berkelanjutan digambarkan sebagai pemberian kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam layanan publik, mengakses sumber daya, dan mengambil keputusan.

Isu ketimpangan gender telah menarik perhatian global, sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan Kesetaraan Gender sebagai salah satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs 5). Meskipun pemerintah telah berupaya untuk mengatasi tantangan tersebut, diskriminasi gender masih menjadi masalah yang nyata di banyak masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Perempuan dan anak perempuan seringkali menjadi kelompok yang terpinggirkan dan kehilangan akses terhadap hak dan kesempatan dasar mereka. Norma sosial, tradisi patriarki, dan pembatasan sosial masih memperkuat ketimpangan gender, terutama di wilayah pedesaan. Kesetaraan gender melibatkan sejumlah faktor kompleks seperti pengurangan kemiskinan, pencegahan eksploitasi, dan peningkatan kesetaraan pendapatan (Miotto & Vilajoana-Alejandre, 2019).

Kesetaraan gender dipandang sebagai prinsip hak asasi manusia yang penting dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Ini juga merupakan fokus utama dalam upaya pembangunan, dengan SDGs 5 menekankan pentingnya mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di semua aspek kehidupan, dengan melawan diskriminasi yang mereka hadapi.

Meskipun beberapa negara telah berhasil memberikan akses yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan terhadap pendidikan dasar, biaya sekolah masih menjadi hambatan bagi anak perempuan di negara-negara terbelakang. Jumlah anak perempuan yang tidak masuk sekolah masih lebih tinggi dibandingkan laki-laki, meskipun secara keseluruhan jumlah siswa yang tidak masuk sekolah mengalami penurunan. Pendidikan anak laki-laki biasanya diprioritaskan dibandingkan pendidikan anak perempuan di banyak rumah tangga berpendapatan rendah. Beberapa orang bahkan percaya bahwa menyekolahkan anak perempuan akan mengakibatkan hilangnya potensi tenaga kerja mereka. Anak perempuan dan perempuan seringkali memiliki akses lebih besar terhadap pendidikan di negara-negara industri.

2. Pembahasan

a. Pengertian Kesetaraan Gender

Isu gender berasal dari perbedaan dalam peran dan perlakuan yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki sebagai hasil dari faktor-faktor sosial, budaya, dan agama (Muqoyyidin, 2013). Menurut Herien (2013) Konsep gender digunakan oleh para ahli sosial untuk menjelaskan perbedaan dalam karakteristik sosial yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki, baik yang bersifat konstruksi sosial maupun yang melekat sebagai bagian dari identitas mereka sebagai manusia.

Asal-usul kata "gender" berasal dari bahasa Inggris yang mengacu pada "jenis kelamin" (Suhra, 2013). Dalam konteks ini, gender merujuk pada konstruksi sosial yang terkait dengan peran, fungsi, hak, dan kewajiban yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki, yang tidak ditentukan secara kodrati dan bisa berubah seiring waktu bahkan bisa dipertukarkan (Herien, 2013). Menurut Rakhman (2019), Gender melibatkan pembagian peran dan posisi antara perempuan dan laki-laki yang dianggap sesuai dengan norma dalam masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa perbedaan gender bukanlah masalah jika tidak menyebabkan ketidakadilan.

Istilah "kesetaraan" lebih umum digunakan dalam studi gender karena lebih menekankan pada pembagian yang seimbang dan adil (Rakhman, 2019). Menurut Herien (2013), kesetaraan gender mengacu pada kondisi di mana perempuan dan laki-laki memiliki kesamaan, proporsi yang sebanding, dan kesetaraan dalam menikmati hak-hak mereka sebagai manusia dalam semua aspek kehidupan. Qomariah (2019) juga berpendapat bahwa kesetaraan gender adalah konsep di mana perempuan dan laki-laki tidak

terbatas oleh stereotipe, prasangka, dan peran gender yang kaku dalam membuat pilihan dan mengembangkan potensi mereka.

b. Hubungan Kesetaraan Gender Dengan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan dan kesetaraan gender mempunyai keterkaitan yang erat. Prinsip dasar kesetaraan gender adalah bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas peluang, sumber daya, dan keuntungan yang terkait dengan pertumbuhan, tanpa memandang gender mereka. Di sisi lain, pembangunan berkelanjutan adalah metode pembangunan yang berupaya memenuhi kebutuhan masa kini tanpa membahayakan kapasitas generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau penipisan sumber daya yang diperlukan oleh generasi mendatang dari keputusan dan tindakan yang diambil saat ini. Kesetaraan gender sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan karena memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan adanya kesetaraan gender, maka potensi dan bakat dari seluruh anggota masyarakat bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Pilar 5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mencakup kesetaraan gender. Tujuannya termasuk memberdayakan perempuan dan anak perempuan di semua bidang kehidupan dan mencapai kesetaraan gender. Hal ini mencakup mendorong undang-undang yang mendorong pertumbuhan perempuan dan berupaya menjamin bahwa setiap orang mempunyai akses yang sama terhadap teknologi dan informasi.

Kesetaraan gender berperan dalam menciptakan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang stabil dan seimbang. Dengan kesetaraan gender, perempuan dan laki-laki memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, kepemimpinan, serta peluang lainnya, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan keseluruhan masyarakat. Oleh karena itu, memberdayakan perempuan dan laki-laki secara seimbang dalam pembangunan berkelanjutan adalah langkah strategis dan penting untuk mencapai efisiensi, keberlanjutan, dan kesetaraan dalam pembangunan.

c. Dampak Positif Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Dampak positif kesetaraan gender dalam pembangunan sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan, baik itu ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Berikut adalah beberapa dampak positif dari kesetaraan gender dalam pembangunan:

Memberikan kesempatan yang sama dalam pendidikan dan lapangan kerja kepada semua gender memiliki dampak positif pada kemampuan suatu negara untuk bersaing dalam perdagangan internasional. Saat setiap individu memiliki akses yang adil tanpa memandang jenis kelamin, hal ini akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia negara tersebut. Secara khusus, memberikan pendidikan dan peluang pekerjaan yang lebih besar kepada perempuan di sektor resmi akan meningkatkan kekuatan mereka di dalam lingkup keluarga. Adanya perbedaan perilaku antara perempuan dan laki-laki dalam hal menabung dan investasi ekonomi, termasuk investasi dalam bidang non-ekonomi seperti kesehatan dan pendidikan anak-anak, menjadikan pentingnya memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memperoleh pendidikan yang baik dan bekerja di sektor formal. Hal ini akan memberikan mereka akses yang lebih besar terhadap sumber daya ekonomi dan keuangan, memungkinkan mereka berperan aktif dalam pengambilan keputusan keluarga, termasuk dalam hal manajemen keuangan dan investasi dalam pembangunan modal manusia untuk generasi mendatang.

Pada kesejahteraan sosial, kesetaraan gender membantu mengurangi kesenjangan sosial antara perempuan dan laki-laki, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya kesetaraan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan berbagai layanan sosial lainnya, masyarakat dapat hidup dalam kondisi yang lebih adil dan sejahtera.

Kesetaraan gender juga mempengaruhi peningkatan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dan proses pengambilan keputusan. Keterlibatan perempuan dalam arena politik dapat meningkatkan representasi serta diversifikasi perspektif dalam pembuatan kebijakan, yang pada akhirnya mendorong tercapainya keputusan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

d. Tantangan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender

Mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utamanya adalah ketidakadilan hukum dan kekurangan perlindungan hukum yang

mempengaruhi perempuan. Walaupun peraturan telah mengamankan kesetaraan hak antar perempuan dan laki-laki, tantangan terkait ketidakadilan gender masih tetap ada. Ini mencakup isu-isu seperti hak atas keutuhan fisik, kebebasan dalam memilih pasangan hidup, otonomi dalam hubungan seksual, keputusan terkait kehamilan, termasuk akses terhadap layanan aborsi, dan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik. Selain itu, budaya patriarki dan penafsiran agama yang merugikan perempuan juga menjadi penghalang bagi pencapaian kesetaraan gender. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat juga menjadi faktor yang menghambat. Untuk mencapai kesetaraan gender, diperlukan pergeseran paradigma dan budaya menuju sikap yang lebih inklusif dan egaliter. Perlindungan hukum yang lebih efektif dan pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan, karier, dan partisipasi politik juga merupakan faktor kunci yang tidak dapat diabaikan.

3. Penutup

Dalam era pembangunan berkelanjutan, kesetaraan gender menjadi salah satu prinsip yang sangat penting dan tak terelakkan. Kesetaraan gender bukan hanya menjadi tujuan moral yang harus dicapai, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam meraih pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh.

Kesetaraan gender adalah hak dasar manusia. Setiap orang berhak untuk diperlakukan secara adil dan setara dalam semua aspek kehidupan, tanpa memandang gender. Memastikan kesetaraan gender menjamin akses yang adil terhadap peluang, sumber daya, kesehatan, pendidikan, dan keadilan bagi semua individu. Kesetaraan gender adalah prinsip utama pembangunan berkelanjutan, yang menjadi landasan pembentukan masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

Secara kesimpulan, kesetaraan gender menjadi fondasi yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan. Lebih dari sekadar hak asasi manusia, kesetaraan gender juga membawa dampak positif terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk mencapai masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, sangat penting bagi kita untuk berkomitmen dalam menegakkan kesetaraan gender di semua aspek kehidupan. Dengan memperkuat peran serta perempuan dan memberdayakan mereka sepenuhnya, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh umat manusia.

B. Kepemimpinan Perempuan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender

1. Pendahuluan

Untuk mencapai tujuannya, suatu organisasi memerlukan pemimpin. Kepemimpinan dianggap sebagai tugas laki-laki, sehingga kehadiran pemimpin selalu dikaitkan dengan peran laki-laki. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa perempuan hanya bisa berkibrah di ranah domestik (ibu rumah tangga), karena mereka tidak bisa berpartisipasi aktif di luar ranah domestik, yakni di sektor publik. Seiring dengan perkembangan zaman, kesetaraan gender berkembang sangat pesat sekali. Gender tidak hanya perbedaan kelamin saja tetapi juga karakter, dan peran sosialnya (WHO, 2010).

Jumlah seorang pemimpin perempuan di Indonesia masih sangat sedikit dibandingkan dengan seorang pemimpin pria. Lebih jauh lagi, beberapa organisasi memandang kemunculan pemimpin perempuan sebagai satu kasus tertentu. Meskipun demikian, perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam menduduki posisi kepemimpinan. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak orang yang percaya bahwa jika perempuan menjadi pemimpin maka ia akan melampaui laki-laki.

Tidak adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan adalah hal yang mendefinisikan isu kesetaraan gender, sehingga pengakuan bahwa perempuan mempunyai peluang untuk mengambil peran kepemimpinan mempunyai dampak yang lebih besar. Artinya perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai posisi kepemimpinan

2. Pembahasan

a. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah sikap mempunyai visi dan misi yang kuat serta mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Jika berbicara tentang kepemimpinan, orang cenderung menganggap identik dengan laki-laki, tetapi ketika mempelajari perempuan, kita menemukan bahwa perempuan juga memiliki jiwa kepemimpinan dan itu tentang memberi arahan, memberikan pidato dan argumen, dan kemampuan memberi ide. Pada dasarnya siapapun dapat menjadi pemimpin (*leadership*).

b. Kesetaraan Gender

Secara terminologi gender berasal dari bahasa Inggris. Sehingga dari segi struktur bahasa memiliki arti sex dan jenis kelamin. Oleh karena itu, banyak orang yang menganggap gender mengacu pada jenis kelamin.

Kesetaraan gender berarti laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan dan hak sebagai manusia untuk memenuhi perannya dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta menikmati hasil pembangunan secara setara. Jadi, kesetaraan gender dapat diartikan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai nilai-nilai yang sama, yaitu berupa persamaan peran dan kesetaraan partisipasi.

c. Kepemimpinan Perempuan

Kepemimpinan perempuan mengacu pada kepemimpinan oleh perempuan. Banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa keterampilan kepemimpinan perempuan bersifat unik dan berbeda dengan kualitas kepemimpinan laki-laki. Sebagai contoh, perempuan membuat keputusan dengan cara yang lebih demokratis dan partisipatif daripada laki-laki. Karena mereka dapat membuat orang lain merasa nyaman dan penting, perempuan dikatakan memiliki lebih banyak hubungan interpersonal dan menjadi pendengar yang lebih baik, juga perempuan lebih berkomitmen pada cita-cita kesetaraan.

Ada kemungkinan bahwa perempuan lebih kooperatif, namun mereka mungkin juga kurang percaya diri dan kompetitif. Mereka relatif sabar, lebih berhati-hati, lebih teliti, tertarik pada isu-isu kecil dan kompleks, dan bersifat kolegial. Mengingat persoalan kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya perbedaan (diskriminasi) antara perempuan dan laki-laki, maka dampak positif dapat dicapai dengan menciptakan peran perempuan pada posisi kepemimpinan. Artinya perempuan dan laki-laki mempunyai peluang dan kemampuan kepemimpinan yang sama.

d. Faktor-Faktor Penyebab Kesetaraan Gender

Adapun yang faktor-faktor yang menyebabkan kesetaraan gender pada pemimpin perempuan sebagai berikut:

1. Faktor internal, yaitu berasal dari kualitas diri seorang wanita. Banyak wanita yang harus mengendalikan diri, berkomunikasi, mengikuti hati nuraninya dan mengenali kata-kata suci dan luhur hatinya. Ini tentang pemberdayaan perempuan untuk melakukan secara optimal dalam semua peran mereka sebagai ibu, istri, pemimpin masyarakat yang profesional.

2. Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar perempuan. Misalnya laki-laki mempunyai keunggulan untuk tetap menjadi pemimpin. Hal ini berdampak pada berbagai produk sosial budaya yang mempunyai citra kurang baik dan timpang terhadap perempuan. Selain itu, terdapat pula penafsiran ajaran agama yang melanggar prinsip keadilan dan persamaan HAM. Kenyataan ini membuat perempuan berada dalam ketidaktahuan dan ketidakberdayaan, sehingga mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan keadilan.

e. Upaya Kepemimpinan Perempuan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender

Untuk menopang pengembangan pemimpin perempuan dalam pengembangan masyarakat, dapat dilakukan: Menciptakan peluang bagi para pemimpin tersebut untuk mendokumentasikan pengalaman dan pertumbuhan mereka sebagai pemimpin masyarakat. Dengan mendokumentasikan dan menyebarkan informasi, perempuan dapat berbagi pengalaman praktik terbaik dan belajar satu sama lain. Menumbuhkan pemimpin baru melalui pelatihan atau pendampingan. Integrasi hasil penelitian ke dalam program pelatihan kepemimpinan. Menyelenggarakan sesi dialog dari berbagai pengetahuan dan sumber daya antar organisasi yang dipimpin perempuan.

3. Penutup

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender terwujud ketika perempuan mengambil peran kepemimpinan. Dengan memberikan kesempatan kepada perempuan, mencatat pertumbuhan dan pengalaman mereka melalui penelitian dan pelaporan, berbagi pengetahuan, mengorganisir sesi pelatihan dan penjangkauan masyarakat, serta membina kerja sama antar organisasi yang dipimpin oleh perempuan untuk menyatukan sumber daya dan keahlian. Pemimpin perempuan dapat dengan mudah memenangkan hati masyarakat dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat dengan cara ini. Keberhasilan dalam hal ini dapat menunjukkan bahwa perempuan sama mampunya menjadi pemimpin seperti halnya laki-laki, bahkan lebih.

C. Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki

1. Latar Belakang

Patriarki masih menjadi budaya yang terus ada hingga sekarang, dan budaya ini mewakili struktur sosial yang memberikan peran laki-laki lebih mendominasi dibandingkan perempuan dalam berbagai aspek, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam lingkungan sosial. Salah satu akibat dari budaya patriarki adalah ketidaksetaraan gender dan hubungan kekuasaan yang terkait. Akibat dari dominasi tersebut meningkatnya ketimpangan gender yang diskriminatif dan perbedaan sifat, fungsi, dan peran gender.

Hal ini disebabkan oleh bias gender yang masih diyakini oleh masyarakat. Pria dengan kepribadian maskulin, didefinisikan sebagai rasional, kuat, dan perkasa. Di sisi lain, seperti yang ditunjukkan Wollstonecraft (2020, hlm.20), perempuan dipandang feminin, lembut, keibuan, emosional, penakut dan perempuan dianggap makhluk yang “rapuh”. Oleh karena itu, melanggengkan stereotip ini akan menciptakan perpecahan yang berujung pada bias dan ketidaksetaraan gender.

Terlepas dari kenyataan bahwa hampir setiap negara telah menjadikan kesetaraan gender sebagai prioritas, namun memang benar bahwa mencapai kesetaraan gender tidaklah mudah. Budaya ini telah diwariskan secara turun-temurun sejak lama. Sebenarnya masih ada harapan untuk mencapai kesetaraan gender, namun perubahan budaya memerlukan waktu yang cukup lama dalam prosesnya.

2. Pembahasan

a. Budaya Patriarki

Menurut Bressler, patriarki adalah suatu budaya yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Secara implisit, budaya ini mengembangkan dominasi dan keistimewaan laki-laki serta menuntut subordinasi perempuan (Charles E, Bressler, 2007).

Budaya patriarki sudah mendominasi masyarakat, sehingga berkontribusi signifikan terhadap marginalisasi perempuan. Dengan kata lain, ketidakadilan telah terjadi dan perempuanlah yang paling terkena dampaknya. Pola pikir masyarakat, pelaku ekonomi, akademisi, pengambil kebijakan memandang dan memperlakukan perempuan dibentuk oleh paradigma patriarki sehingga membentuk sebuah budaya.

b. Ketidakadilan Gender

Namun seringkali perempuan ditempatkan di ruang domestik untuk memenuhi fungsi kodratnya. Peran dan posisi perempuan di ruang publik dibatasi karena ruang publik tidak dianggap sebagai wilayah perempuan. Selain itu, pandangan lainnya memandang perempuan sebagai makhluk kedua setelah laki-laki yang tidak layak menjadi pemimpin, sehingga pendidikan dan kesempatan kerja akan diprioritaskan kepada laki-laki.

Pandangan dunia juga meyakini bahwa perempuan harus cantik, lemah lembut, dan melayani, sehingga perempuan pada akhirnya dijadikan sebagai objek konsumsi untuk memenuhi tuntutan menjadi cantik. Meskipun perempuan pencari nafkah juga, tetapi mereka juga harus mengurus keluarga dan menanggung beban yang berlipat ganda. Perempuan juga lebih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Oleh karena itu, perempuan merupakan salah satu pihak yang harus mendapat perlindungan serta keadilan.

c. Beberapa Kasus Budaya Patriarki

1. Kekerasan Dalam Tangga (KDRT)

Terjadinya berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak terlepas dari pengaruh budaya patriarki, dan budaya patriarki masih menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Budaya patriarki menjadikan laki-laki lebih kuat dan berkuasa dibandingkan perempuan, sehingga istri dibatasi dalam pilihan atau keinginannya dan cenderung menuruti segala keinginan suami, bahkan yang buruk sekalipun. Realitas sosial ini sering terjadi di masyarakat, jika perempuan tidak menuruti keinginan suaminya maka ia akan mengalami kekerasan.

2. Kasus Pelecehan Seksual

Budaya patriarki yang memprioritaskan maskulinitas dan ego laki-laki, sedangkan feminitas sendiri diabaikan dan dipandang sebagai kelemahan. Dalam budaya ini, laki-laki diharapkan untuk menunjukkan keberanian dan dominasi, sedangkan perempuan dianggap sebagai objek yang dapat diperlakukan secara tidak baik. Masyarakat membiarkan laki-laki menunjukkan perilaku agresif dan menghina perempuan. Tingkah laku mereka terkesan biasa saja dan wajar karena sebagai laki-laki harus berani menghadapi perempuan. Laki-laki dipandang sebagai penggoda, dan tubuh perempuan menjadi objek yang pantas mendapatkan kekerasan pada dirinya.

3. Angka Pernikahan Dini

Budaya patriarki yang terbentuk di masyarakat mempengaruhi pernikahan dini, misalnya perempuan hanya berperan sebagai penerima nafkah dan hanya bekerja di rumah tangga. Artinya kebebasan istri sangat terbatas karena kodratnya, misalnya tidak diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau mengembangkan lebih lanjut bakat dan keterampilannya. Kebanyakan dari mereka adalah ibu rumah tangga yang produktivitasnya hanya membersihkan rumah dan memasak.

d. Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Budaya Patriarki

Istilah gender pertama kali dikemukakan oleh Robert Hellen yang membedakan aspek sosial dan biologis manusia. Perbedaan dalam gender tidak terlalu berarti kecuali ada diskriminasi atau ketidakadilan gender. Akan tetapi dalam banyak kasus, adanya perbedaan gender telah menimbulkan ketidakadilan gender, dan kaum perempuan yang paling banyak menjadi korbannya. Di samping itu, banyak kaum laki-laki yang mengambil keuntungan dari kehidupan yang tidak adil tersebut.

Menurut Koentjaraningrat, Ideologi dan budaya tidak muncul begitu saja. Hal ini dibentuk oleh orang-orang dan diturunkan dari generasi ke generasi melalui sosialisasi. Perilaku seseorang atau suatu masyarakat ditentukan oleh nilai-nilai budayanya, menurut Koentjaraningrat (Koentjaraningrat, 1974).

Meski masyarakat patriarki sudah bertahan lama, namun bukan tidak mungkin suatu kelompok atau negara bisa mencapai kesetaraan gender, sesuai argumentasi Koentjaraningrat di atas. Mencapai kesetaraan gender adalah tujuan yang sulit dan memakan waktu. Alasan sederhananya adalah bahwa mengubah suatu budaya memerlukan perubahan perspektif, dan perubahan itu memerlukan waktu. Pemahaman yang kuat terhadap tantangan seputar kesetaraan gender sangatlah penting jika kita ingin melihat kemajuan jangka panjang dalam pemberdayaan perempuan. Untuk mewujudkan tatanan sosial yang adil dan penuh kasih sayang, kesetaraan dan keadilan gender harus dipenuhi.

Salah satu langkah yang perlu diambil untuk mencegah terjadinya diskriminasi terhadap perempuan, sekaligus dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender adalah melakukan pemberdayaan perempuan. Arti harfiah istilah ini berasal dari kata dasar “kekuasaan” atau “pemberdayaan”. Oleh karena itu, inti dari pemberdayaan perempuan

berkaitan dengan kekuasaan. Strategi ini memperlakukan perempuan sebagai peserta aktif dalam proses pembangunan dan bukan sebagai penerima pasif.

3. Penutup

Sangat mudah bagi laki-laki yang berkuasa untuk mendiskriminasi perempuan dalam masyarakat patriarki karena hak istimewa dan otoritas yang mereka nikmati. Oleh karena itu, perempuan masih menghadapi hambatan untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat dan berjuang untuk mencapai hak-hak yang menjadi hak mereka. Sebab ketidakadilan pun terjadi, akan menyebabkan masyarakat merasa terasing, menciptakan tatanan sosial yang tidak tenteram, bahkan bisa memicu kekerasan.

Dalam artikel ini menunjukkan bahwa dalam masalah sosial ini mengharuskan menginternalisasi teori feminis dalam diri kita dan generasi penerus. Teori feminis ini turut melemahkan sistem yang membentuk kelompok dominan dan subordinat, sehingga kelompok subordinat tersebut mengadopsi nilai-nilai kelompok dominan. Tujuan internalisasi pola pikir ini adalah untuk menghindari perilaku diskriminatif terhadap perempuan di kemudian hari, mengurangi permasalahan kesenjangan gender di Indonesia dan dunia, serta menciptakan bias negatif terhadap perempuan seperti budaya patriarki.

D. Mendobrak Batas Menuju Kestaraan Gender Di Abad Ke-21

1. Pendahuluan

Di Tengah kemajuan teknologi dan globalisasi, kesetaraan gender masih menjadi isu yang relevan di dunia. Meskipun telah ada banyak upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender, masih banyak tantangan yang dihadapi termasuk stigma diskriminasi dan kesenjangan dalam akses terhadap kesempatan dan sumber daya. Di era modern ini, kesetaraan gender menjadi salah satu isu sosial yang paling mendesak untuk diatasi. Meskipun telah ada kemajuan yang signifikan kami memperjuangkan hak - hak perempuan dan meningkatkan kesetaraan perempuan, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Kesetaraan gender bukan sekedar memberikan hak yang sama kepada semua orang.

Menciptakan masyarakat yang memahami dan menghargai perbedaan tanpa adanya diskriminasi berdasarkan gender. Berbagai faktor, termasuk budaya, agama, politik, dan ekonomi memainkan peran penting dalam membentuk pandangan dan perlakuan terhadap perempuan dan laki - laki. Stereotipe gender, peran tradisional yang ditetapkan oleh masyarakat dan

ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik, semuanya menjadi hambatan besar dalam mencapai kesetaraan gender sebenarnya itulah yang terjadi. Oleh karena itu, mewujudkan perubahan besar dalam mendorong kesetaraan gender memerlukan upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, organisasi, organisasi non - pemerintah, sektor swasta, dalam masyarakat sipil.

2. Pembahasan

Perempuan secara etimologi berasal dari kata Empuan yang setara dengan kata pada kata tuan, dan kata dekat dengan kata puan yang merupakan kata penghormatan terhadap perempuan. Kesetaraan gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki - laki dan perempuan dilihat dari segi sosial dan budaya. Pengertian wanita selain dari pengertian yang telah dibahas di atas, perempuan adalah sosok yang mempunyai sifat lembut dan kelembutannya memberikan kekuatan dan potensi yang dimilikinya pada akhirnya mampu menjadikan perempuan menjadi pribadi yang mandiri, terbebas dari kemiskinan, dan mengembangkan perekonomian keluarganya. Menurut beberapa ulama terdapat beberapa pendapat tentang pentingnya perempuan, misalnya plato mengatakan bahwa perempuan lebih lemah dari laki - laki dalam hal kekuatan fisik atau mental, namun perbedaan ini tidak ada perbedaan dalam bakat yang dimiliki perempuan.

Melintas batas menuju kesetaraan gender di abad ke-21 kesetaraan gender merupakan prinsip dasar masyarakat yang menghormati hak asasi manusia. Namun, meskipun kemajuan signifikan telah dicapai dalam perjuangan kesetaraan gender, tantangan terus membatasi kemajuan menuju tujuan yang diinginkan. Bahkan di abad ke-21, kita masih mengalami ketidaksetaraan gender dalam banyak hal, mulai dari upah dan akses terhadap pendidikan hingga ketidaksetaraan peran gender di tempat kerja dan dalam kehidupan pribadi kita. Salah satu hambatan utama dalam mencapai kesetaraan gender adalah masih adanya stereotipe ini tidak hanya mempengaruhi persepsi mengenai peran dan kemampuan gender, namun juga membatasi pilihan dan peluang individu. Misalnya, stereotipe yang mengaitkan pekerjaan tertentu dengan gender tertentu masih tersebar luas Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam lapangan kerja dan peluang ekonomi antara laki - laki dan perempuan. Masalah lainnya adalah ketimpangan pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan mengurus keluarga. Meskipun peran perempuan di rumah dan pengasuhan anak semakin diakui, banyak orang masih percaya bahwa tanggung jawab utama ini hanya ada padaperempuan. Hal ini sering kali menghambat partisipasi perempuan dalam

aktivitas profesional dan pengembangan karir, karena mereka harus memilih antara karir mereka sendiri atau peran tradisional dalam kehidupan keluarga.

Selain itu, banyak negara yang masih belum sepenuhnya menerapkan kebijakan yang mendorong kesetaraan gender, baik di bidang hukum, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Kurangnya perlindungan hukum hak-hak perempuan, seperti perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga dan persamaan hak waris, masih menjadi hambatan utama dalam mencapai kesetaraan gender. Gerakan feminis terus memperjuangkan hak-hak perempuan, baik secara lokal maupun global, dan menantang struktur yang melanggengkan ketidaksetaraan gender.

Pendidikan kesetaraan gender semakin ditekankan di berbagai lembaga pendidikan, mulai dari sekolah hingga universitas, guna mengubah pola pikir dan perilaku yang tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan gender. Selain itu, penggunaan media sosial dan teknologi digital juga merupakan alat yang efektif untuk mengekspresikan isu kesetaraan gender. Berbagai kampanye online dan Gerakan solidaritas berhasil menarik perhatian masyarakat terhadap isu-isu tersebut dan memperluas jaringan dukungan dalam perjuangan kesetaraan gender.

Untuk mencapai kesetaraan gender yang sesungguhnya diperlukan upaya kolektif seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan individu. Langkah-langkah nyata seperti menerapkan kebijakan yang mendorong kesetaraan gender, mengubah budaya dan pola pikir masyarakat, serta menciptakan lingkungan inklusif bagi semua gender akan membantu mengatasi hambatan yang menghalangi kesetaraan gender yang sesungguhnya di abad ke-21.

3. Penutup

Kesetaraan gender bukan hanya tentang persamaan hak bagi semua orang, namun juga tentang membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil untuk semua. Melalui kesadaran, pendidikan dan tindakan kita dapat membongkar struktur sosial yang menghalangi kesetaraan gender dan bekerja sama untuk membangun dunia dimana setiap orang dapat hidup bebas dari stereotipe dan diskriminasi gender. Pada abad ke-21, mendorong batas-batas menuju kesetaraan gender bukanlah sebuah pilihan, namun merupakan kewajiban normal dan kewajiban untuk membangun masyarakat yang lebih baik bagi generasi mendatang. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan memperkuat komitmen kami terhadap kesetaraan gender, kami dapat membuka jalan menuju masa depan yang lebih inklusif dan adil bagi semua orang.

E. Perempuan Dan Budaya Patriarki

1. Pendahuluan

Pada zaman ini masih saja banyak masyarakat yang menerapkan budaya patriarki yang menyebabkan adanya konflik dan ketidakbebasan serta melanggar hak-hak perempuan. Kekentalan budaya patriarki sendiri ini masih dirasakan oleh perempuan di Indonesia, dimana laki-laki selalu lebih diunggulkan atau diagungkan penyebabnya juga masih sangat klasik, yaitu karena perempuan masih berada di ranah yang domestik. Ranah domestik biasa dikenal dengan segala sesuatu yang saling berkaitan dengan adanya kegiatan di dalam rumah tangga yang artinya perempuan hanya boleh mengerjakan pekerjaan rumah tangga saja. Mereka masih saja beranggapan bahwa tugasnya perempuan hanya untuk bereproduksi (melahirkan) dan yang berhubungan dengan rumah tangga. Oleh sebab itu perempuan hanya mempunyai fungsi reproduksi, maka di rumah mereka meneruskan garis keturunan atau nasab atas melahirkan anak dan mengasuh anak yang dilahirkannya. Diskriminasi gender ini seringkali menjadikan perempuan mengalami berbagai bentuk perlakuan yang eksploitatif sehingga mengakibatkan mereka tidak mampu berperan dalam kehidupan publik.

Sehingga budaya patriarki dapat menyebabkan ketidaksetaraan atau ketidakadilan gender antara perempuan dan laki-laki. Maka saat ini masalah atau kasus ketidaksetaraan gender semakin banyak yang menyita perhatian dari kalangan masyarakat untuk dicarikan solusi masalah ketidaksetaraan gender ini, yang mana merupakan cita-cita mulia untuk terwujudnya keadilan sosial yang utuh dan hak kesetaraan adalah hak semua manusia yang terlahir ke dunia ini.

2. Pembahasan

Budaya patriarki ini menjadikan perempuan di Indonesia mempunyai tantangannya tersendiri. Pasalnya, perempuan Indonesia masih sering diperlakukan tidak adil oleh masyarakat, khususnya laki-laki. Hal ini dikarenakan masih adanya persepsi bahwa perempuan memiliki kekuasaan yang lebih kecil bahkan tidak ada kuasa dibandingkan laki-laki di berbagai bidang seperti politik, pendidikan, dan lingkungan kerja. Pola pikir inilah yang menjadi bagian dari budaya patriarki tersebut, dimana masyarakat masih mempercayai adanya kontrol eksklusif oleh laki-laki di berbagai bidang, sehingga menyebabkan kesenjangan akses dan peluang kemajuan bagi perempuan di bidang-bidang itu.

Patriarki berasal dari kata 'Patriarkat' dan mengacu pada struktur yang memberikan peran kepada laki-laki sebagai satu-satunya penguasa, pusat, serta mengendalikan segalanya. Sistem budaya patriarki ini yang sangat mendominasi budaya warga negara bisa mengakibatkan terjadinya kesenjangan, kesenjangan

itu berada di antara laki-laki dan perempuan dan akan berpengaruh pada berbagai aspek aktivitas semua warga negara. Budaya patriarki ini menjadikan laki-laki untuk mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi perempuan, sehingga menempatkan perempuan pada posisi yang dirugikan dalam banyak bidang kehidupan sosial.

Budaya patriarki yang menghasilkan ketidaksetaraan gender antar laki-laki dan perempuan bisa menimbulkan berbagai dampak terhadap kehidupan bermasyarakat, antara lain:

- a. **Marginalisasi**, hal ini dapat menyebabkan kemiskinan ekonomi. Contoh dari marginalisasi ini adalah Revolusi Hijau pada masa Orde Baru yang hanya berfokus pada laki-laki. Salah satu upaya penanggulangannya adalah dengan memberikan pelatihan-pelatihan pertanian hanya kepada petani laki-laki dan mengecualikan petani perempuan dari sawah dan bertani. Kecuali di bidang pertanian, pekerjaan yang dilakukan perempuan seringkali dianggap lebih rendah dibandingkan pekerjaan laki-laki, sehingga menyebabkan kesenjangan upah di antara keduanya.
- b. **Subordinasi**, berupa keyakinan yang meyakini bahwa salah satu gender akan dianggap lebih penting dan utama serta lebih baik dibandingkan dengan gender yang lainnya.
- c. **Stereotipe**, Suatu gambaran baku mengenai individu atau kelompok tertentu yang dimana tidak sesuai dengan realitas empiris yang ada. Hal ini akan berujung pada diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang dapat merugikan perempuan. Misalnya, pemberian label pada perempuan sebagai "ibu rumah tangga" yang tugasnya hanya melakukan pekerjaan rumah tangga berdampak negatif pada perempuan yang ingin berpartisipasi aktif dalam "kegiatan laki-laki" seperti politik dan bisnis.
- d. **Kekerasan**, yaitu serangan terhadap fisik atau mental seseorang (verbal dan non-verbal). Kekerasan ini dapat mencakup seperti pemerkosaan dan pemukulan sebagai bentuk dari kekerasan fisik, namun juga mencakup bentuk kekerasan yang lebih halus seperti pelecehan seksual dan *catcalling*. Stereotipe terhadap perempuan menjadi salah satu penyebab banyaknya kekerasan terhadap perempuan. Seperti halnya pemerkosaan yang seringkali terjadi karena kekuasaan gender terhadap perempuan, bukan karena kecantikan.
- e. **Beban Ganda**, yaitu beban yang ganda harus selalu ditanggung perempuan secara yang sangat berlebihan. Setelah dilakukan berbagai observasi, ditemukan bahwa di rumah tangga nyaris mendekati angka 90% pekerjaan dikerjakan oleh perempuan. Bahkan perempuan yang bekerja pun harus juga

melakukan pekerjaan rumah tangga. Gagasan tentang peran gender ini membuat perempuan merasa bersalah jika tidak melakukan pekerjaan rumah. Di sisi lainnya, laki-laki tidak hanya merasa bahwa hal ini bukan tanggung jawab mereka yang harus dikerjakan, justru dalam beberapa tradisi adat laki-laki tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga.

Berdasarkan lima uraian bentuk-bentuk dari adanya ketidakadilan gender di atas, maka dapat dikatakan bahwa analisis terhadap salah satu bentuk ketidakadilan tersebut saling berkaitan. Contohnya, marginalisasi ekonomi terhadap perempuan disebabkan oleh stereotip tertentu mengenai perempuan, yang menegaskan adanya ketidakadilan subordinasi. Segala bentuk ketidakadilan dapat menimbulkan konflik tertentu. Ketidakadilan gender yang muncul dari stereotipe mengenai determinisme wacana laki-laki dan perempuan dalam sistem patriarki yang mengakar dalam kehidupan bermasyarakat, merugikan semua gender. Selama budaya patriarki dan seksisme masih ada, ketimpangan dan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam perlakuan terhadap perempuan, akan selalu dibenarkan. Seperti adanya perlakuan bias eksis dan yang lebih buruk lagi, stereotip negatif yang mengarah pada misogini adalah beberapa hal yang melanggengkan dan menormalisasi budaya patriarki. Seksisme adalah keyakinan bahwa satu gender lebih unggul dari gender lainnya, yang tampaknya membenarkan sistem patriarki yang menempatkan laki-laki dalam hierarki. Meskipun perempuan adalah pilihan kedua, namun perempuan berada pada posisi teratas.

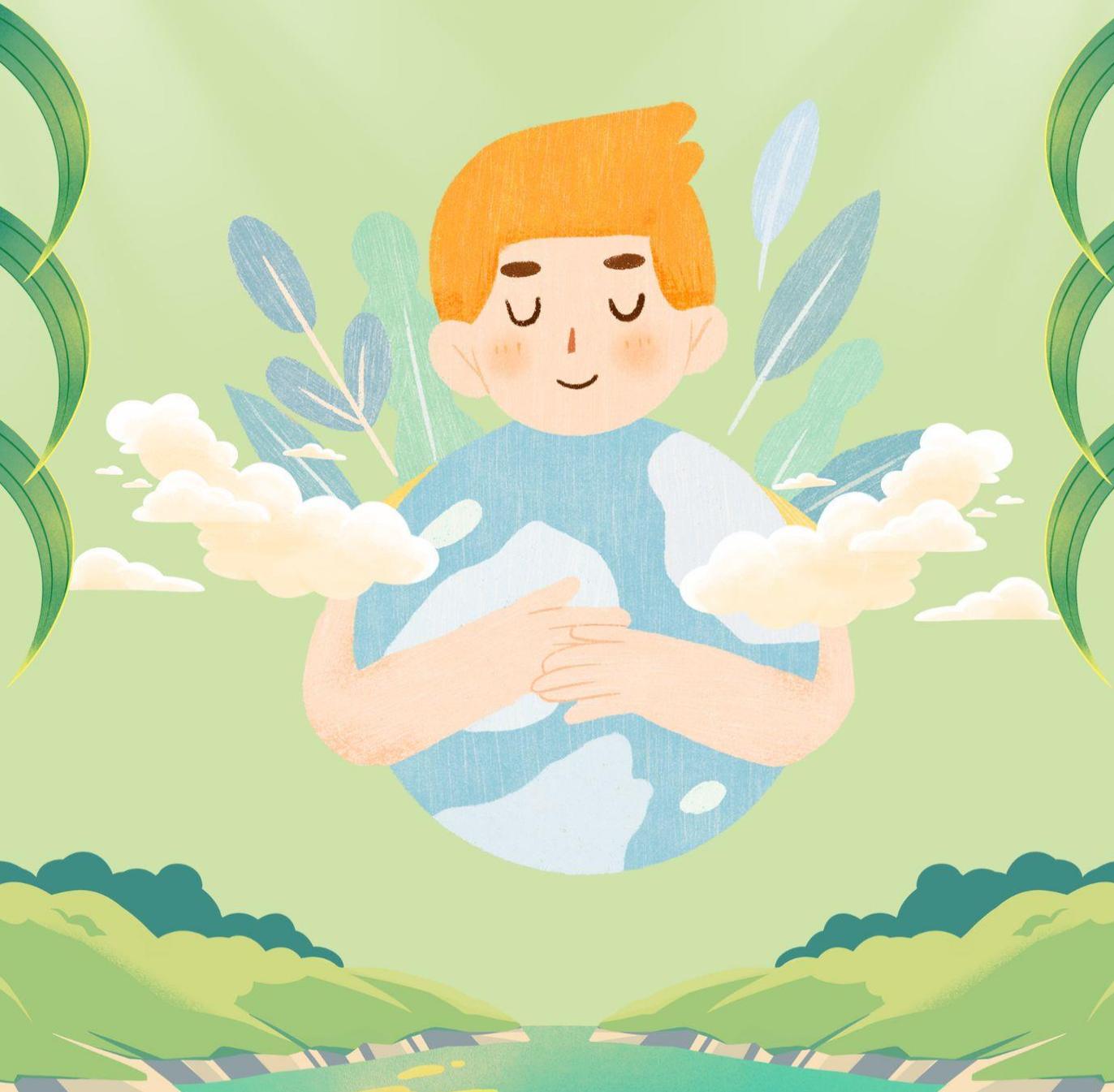
3. Penutup

Pada intinya, untuk mencapai kesetaraan gender adalah demi kepentingan kemanusiaan dan oleh karena itu merupakan tanggung jawab semua orang yang terlibat. Khususnya, inisiatif ini tidak bertujuan untuk mengadu domba dua gender yakni laki-laki dan perempuan, melainkan untuk menjalin hubungan antara perempuan dan laki-laki sebagai mitra yang setara dan memastikan bahwa laki-laki dan perempuan diperlakukan secara setara dalam mengakses sumber daya, ambil kendali dan berpartisipasi serta menikmati manfaat dari adanya pembangunan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan peran pemerintah, khususnya legislatif dan eksekutif, sebagai pengambil kebijakan untuk mengembangkan peraturan di berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, politik, masyarakat, budaya, dan hukum. Pertahanan dan Keamanan Kesetaraan Gender yang diharapkan dapat membawa perubahan paradigma budaya patriarki untuk mencapai kesetaraan gender.

BAB 6

AIR BERSIH DAN

SANITASI LAYAK



A. Pengelolaan Sanitasi dan Akses Air Bersih untuk Meningkatkan Kesehatan di Indonesia

1. Pendahuluan

Menjaga kebersihan lingkungan bagi masyarakat merupakan bagian penting dari sanitasi, yaitu praktik yang sehat. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan bahwa praktik kebersihan lingkungan dapat membahayakan kehidupan dan kesehatan manusia jika terus-menerus memantau kondisi fisik lingkungan sekitar. Inisiatif kesehatan masyarakat seperti program sanitasi bertujuan untuk mengawasi berbagai elemen lingkungan yang berpotensi mempengaruhi kesehatan masyarakat. Dirujuk dalam Fadhila (2006).

Sanitasi dan akses terhadap air bersih dalam SDGS sangat penting bagi kehidupan manusia, karena manusia tidak dapat berfungsi di lingkungan tanpa sanitasi. Manusia membutuhkan air untuk hidup. Orang meminum air mendidih karena bersih dan cocok untuk digunakan sehari-hari. Air yang memenuhi standar sistem air minum dianggap air bersih untuk tujuan pembatasan ini. Sanitasi, dalam pengertiannya yang paling mendasar, adalah praktik secara aktif mengembangkan gaya hidup bersih untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan bahwa kesehatan seseorang akan terkena dampak negatif akibat paparan mereka terhadap kotoran dan produk limbah berbahaya lainnya. Sanitasi, seperti halnya air bersih, merupakan sumber daya masyarakat yang membantu menjaga kesehatan masyarakat dan infrastruktur serta persediaan air bersih dan sanitasi masyarakat dalam kondisi baik. Oleh karena itu, masyarakat umum harus mulai memasukkan akses terhadap air minum dan fasilitas sanitasi ke dalam rutinitas sehari-hari mereka (Rusmini, 2015).

Dalam hal penyediaan akses terhadap fasilitas sanitasi, Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan. Temuan studi di Indonesia menunjukkan bahwa cakupan sanitasi masih di bawah rata-rata Asia Timur sebesar 55%, sedangkan di kawasan Asia Pasifik mencapai 67%. Hal ini menunjukkan bahwa 45 persen atau 100 juta orang di Indonesia masih menggunakan lahan terbuka, termasuk sungai, sawah, kolam, kebun, dan taman untuk buang air besar. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mencuci, hal ini menunjukkan bahwa sikap mereka terhadap hidup bersih dan sehat masih sangat rendah. Pastikan untuk mencuci tangan dengan sabun setiap kali bersentuhan dengan makanan. Ini termasuk sebelum memberi makan anak, sebelum makan, setelah Anda menyeka kotoran, dan lima momen paling krusial (Jatti et al., 2020).

Telah terjadi peningkatan baik dalam cakupan maupun kualitas fasilitas sanitasi. Metode pengembangan sanitasi berbasis masyarakat digunakan untuk melaksanakan berbagai inisiatif di wilayah sekitar untuk membantu pengembangan air minum dan sanitasi lingkungan. Meskipun demikian, sektor sanitasi belum memberikan hasil yang diharapkan. Saat ini, sanitasi belum menjadi masalah besar di negara ini sehingga bisa memicu gejolak politik. Dana yang dialokasikan untuk membangun kawasan ini terkena dampaknya. Pemerintah Indonesia hanya mengalokasikan sekitar 7,7 triliun selama 30 tahun terakhir, yang setara dengan hanya 200 dolar per tahun untuk setiap penduduk Indonesia. Padahal, setidaknya 47 ribu orang setiap tahunnya membutuhkan akses terhadap fasilitas sanitasi yang memadai. Hal lain yang perlu dibenahi adalah kebiasaan masyarakat yang peduli terhadap sanitasi (Alihar, 2018).

Karena alasan-alasan yang disebutkan di atas, diperlukan kajian menyeluruh terhadap kondisi sanitasi dan ketersediaan air bersih di Indonesia. Apa saja tantangannya, dan bagaimana berbagai penulis melihat situasi ini, dari sudut pandang sanitasi air bersih? Aksesibilitas air dan sanitasi di Indonesia telah menjadi subyek banyak tinjauan literatur, yang hasilnya disajikan di sini.

2. Pembahasan

Untuk menggambarkan kondisi akses terhadap air bersih di Indonesia, penelitian ini mengambil lima majalah yang memiliki keterkaitan erat. Sukartini dan Saleh (2016) menggunakan data sekunder dari publikasi BPS untuk melakukan penelitian eksperimental retrospektif dengan pendekatan *cross-sectional*. Mereka menggunakan sampel 497 kabupaten dan kota di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa HDI (Indeks Pembangunan Komunitas) membaik setelah kabupaten dan kota melakukan investasi di bidang infrastruktur, sanitasi, dan listrik. Hasil studi ini menunjukkan bahwa kabupaten dan kota di Indonesia dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum yang aman dan layanan sanitasi lainnya. Hal ini menunjukkan pentingnya kemampuan masyarakat untuk memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi (Sukartini & Saleh, 2016).

Investigasi bakteriologis digunakan dalam penelitian retrospektif yang dilakukan Romy dan Syam (2015) untuk menguji kebersihan sanitasi depo air minum di kota Makassar. Hasil sampel dari depo air Khatulistiwa ditemukan memenuhi standar pada 0/100 ml, sesuai hasil pengujian, sedangkan hasil dari depo 3Nur ditemukan tidak sampai habis pada 15/100 ml. Pemerintah harus

lebih memperhatikan standarisasi depo air untuk kebutuhan minum masyarakat, karena menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014, depo air minum Khatulistiwa memenuhi syarat uji sanitasi dan higienitas, sedangkan depo 3nur tidak (Syam, 2015).

Berdasarkan studi eksperimental cross-sectional yang dilakukan terhadap 11 warga Desa Jawesari, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, pasokan air masyarakat berasal dari Kaliaji, Kalisronto, Kalijaran, dan Kalijaro, yang merupakan sumber air yang paling banyak digunakan selama 20 tahun terakhir. bertahun-tahun. Meskipun terdapat cukup air untuk memenuhi kebutuhan penduduk, namun air tersebut tidak dapat diminum dan sering kali tercemar karena pengelolaan yang tidak efisien. Namun demikian, belum ada laporan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dari penggunaan air ini. Menurut Enralin dan Lubis (2013), pemerintah harus memprioritaskan sanitasi air bersih bagi warganya karena hal ini menunjukkan bahwa sumber air tersebut tidak memenuhi standar.

Sistem penyaluran air bersih di wilayah pesisir Muara Angke yang saat ini masih menggunakan sistem pengolahan yang sudah terpasang lengkap untuk mengambil air dari sumber air Citarum yang dikuasai PT. PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Air bersih masih belum tersedia dalam jumlah yang cukup atau kualitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Sistem pemanenan air hujan merupakan pilihan yang lebih efektif untuk wilayah pesisir Muara Angke. Hal ini diyakini dapat mengatasi aspek sosial dan teknis masyarakat lokal, karena tidak terlalu rumit secara teknologi dan tidak terikat dengan lembaga kepemilikan atau PT. Saniti (2012) menemukan bahwa sistem pengumpulan air hujan meningkatkan keterlibatan dan pengelolaan masyarakat tanpa memerlukan pengadaan, pengoperasian, atau pemeliharaan yang mahal.

Gambaran mengenai kerangka fasilitas yang dapat digunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip kelembagaan dan meningkatkan keberlanjutan distribusi air minum berbasis masyarakat disajikan dalam penelitian Maryati dan Rahmani (2018). Temuan-temuan dari *Focus Group Discussion* (FGD) dan kuesioner yang diberikan kepada 143 desa mengenai praktik pengolahan air mereka menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut telah menetapkan dan secara konsisten mematuhi standar kelembagaan. Pembatasan konsumsi sumber air dan antisipasi kapasitas sumber air merupakan gagasan yang belum dipraktikkan oleh HMA (Hippam Mandiri Arjowinangun). Saat ini, HMA belum menetapkan peraturan tegas mengenai jumlah, durasi, dan laju aliran maksimum penggunaan air minum. Maryati dan Rahmani (2018) menyatakan bahwa pemerintah telah terlibat secara aktif dan menyeluruh dalam mendukung

sistem penyediaan air minum berbasis masyarakat.

Dalam hal sanitasi, Indonesia berada pada peringkat terbawah. Dengan 51,9% penduduk terlayani oleh layanan air limbah rumah tangga pada tahun 2010, Indonesia berada di peringkat ketiga di Asia, hanya tertinggal dari Laos dan Timor-Leste. Selain itu, pengelolaan sampah juga sedang mengalami perubahan. Terdapat sekitar 400 TPA sampah, namun hanya sekitar 10 TPA yang ramah lingkungan. Tempat pembuangan sampah sanitasi sering digunakan, namun pembuangan terbuka masih dilakukan oleh beberapa orang. Antara tahun 1970 dan 1999, gabungan investasi sanitasi oleh pemerintah federal dan daerah hampir mencapai Rp 200 per kapita per tahun. Dari tahun 2000 hingga 2004, jumlah ini meningkat menjadi Rp 2.000, dan sejak itu, belanja sanitasi per kapita terus meningkat menjadi Rp 5.000 per tahun. Namun, kebutuhan optimal yang diperkirakan sebesar Rp 47.000 per kapita per tahun (penelitian Bappenas, 2008), masih jauh lebih tinggi.

Memenuhi permintaan air minum bersih adalah tujuan utama pelaksanaan program sanitasi dan penyediaan air. Partisipasi masyarakat dalam inisiatif pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan sistem air dan sanitasi, yang pada gilirannya memotivasi negara untuk bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk meningkatkan standar hidup dan peluang ekonomi. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam mengembangkan sumber daya manusia di masyarakat, tujuan utama menjalankan program penyediaan air minum dan sanitasi menjadi sangat relevan di sini. Salah satu faktor terpenting dalam menentukan keberhasilan pembangunan adalah investasi pada sumber daya manusia.

3. Penutup

Pemerintah Indonesia masih perlu memprioritaskan pengelolaan dan aksesibilitas air bersih dengan meningkatkan sanitasi berbasis masyarakat dan mengupayakan pembangunan air minum yang berkelanjutan.

B. Menangani Pencemaran Air Sungai dan Sanitasi di Indonesia

1. Pendahuluan

Air pada saat kotor dapat membahayakan kesehatan yang diakibatkan pemakainya/terkena penyakit kolera, kurap, kudis, diare/disentri, atau tipes yang di konsumsi air kotor menjadi penyakit akan timbul kerusakan ginjal dan gigi yang tercemar air kotor yaitu bahan kimia, resikonya terkena penyakit adalah sel darah merah.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat terkait dengan isu-isu sosial politik seperti keterjangkauan, transparansi, dan akuntabilitas. Ada berbagai masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat yang terkait dengan hal ini. Di sana, pelestarian alam dikelola sebagai bagian integral untuk menyediakan air. Oleh karena itu, layanan penyediaan air bersih dan sanitasi berkualitas sangat bergantung pada langkah-langkah ke depan, dengan pendanaan yang signifikan namun sumber daya airnya baik.

Setidaknya penting bagi air karena air merupakan kebutuhan pokok untuk masyarakat supaya masyarakat minum air sekitar 20 liter perhari apabila dibagi menjadi 4 bagian yang sama maka tenaga air dalam perekonomian menjadi sukses dan cukup, kebutuhan masyarakat Indonesia mempunyai air bersih/air minum supaya warga Indonesia yakin tidak menyebabkan relatif rendahnya pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM) ketimbang kawasan Asia-Pasifik secara keseluruhan. (PBB, 2004 dan UNDP, 2008).

Dalam hal biaya modal, biaya tetap yang diperlukan untuk membangun sistem pengolahan air bervariasi tergantung pada jenis sistem yang dibangun, seperti sistem air murni atau sistem layanan kesehatan. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumur bor dan peralatan perpipaan sederhana. Jenis fasilitas, usia penggunaan, dan jumlah pengguna didasarkan pada WHO untuk wilayah Asia Tenggara (Hutton & Haler, 2007).¹Estimasi biaya ini didasarkan pada harga IDR (kurs 15.000/\$), biaya variabel, dan biaya yang timbul akibat investasi dalam pemeliharaan operasi.¹Biaya tersebut meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya sosialisasi dan pendidikan, serta biaya perlindungan sumber air bersih (konservasi alam). Menurut WHO, biaya variabel dalam penelitian juga meningkat secara signifikan di wilayah Asia Tenggara. (Hutton & Hayler, 2007).

Tabel 1. Jenis Sarana, Biaya Investasi, Biaya Variable Dan Total Biaya Per Kapita

No	Jenis Sarana	Umur pakai (tahun)	Pengguna (orang)	Biaya per tahun (\$)		
				Investasi	Variabel	Per Kapita
1	Sumur Bor	30 tahun	60	2666,66	40	2,15
2	Jamban Sederhana	15 tahun	6	266,66	6,66	3,33

Dampak perbaikan air bersih dan sanitasi diperkirakan terjadi dalam tiga aspek utama: pengurangan biaya layanan kesehatan, keuntungan dari sanitasi dan air bersih, serta pencegahan ketidakhadiran di sekolah dan waktu yang hilang karena sakit. (Cronin et al., 2014; Hutton, 2013; Hutton dan Hayler, 2007; Hutton dkk., 2007, 2014). Tetapi, manfaat lain seperti peningkatan gizi, perbaikan kondisi hidup, privasi, keamanan, martabat, dan status sosial tidak termasuk dalam penilaian laporan ini.

Menurut Montgomery dan Elimelech (2007) Akses terhadap air bersih dan sanitasi semakin sulit dijangkau, sehingga menghalangi ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai serta menyebabkan kematian akibat penyakit diare. Hal ini diperkuat oleh pernyataan WHO (2004) yang menyatakan bahwa sekitar 2.004.444 orang meninggal dunia akibat penyakit ini secara global. Menurut WHO (2004) bahwa menjaga akses terhadap air bersih dan sanitasi dasar dapat mengurangi risiko terkena penyakit yang berpotensi mematikan. Selain itu, hal ini dapat menyebabkan pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien, menghemat waktu dalam memperoleh air bersih dan sanitasi, memberikan lebih banyak waktu luang, serta meningkatkan nilai aset (pendekatan nilai aset). Menurut WHO (2004) Secara kuantitatif ditemukan bahwa di negara-negara berkembang, setiap investasi sebesar US\$4.444 dalam air bersih dan sanitasi memberikan keuntungan antara US\$5 hingga US\$8.

Lebih lanjut, studi Bank Dunia mengenai akses air bersih bagi masyarakat miskin perkotaan (2006) menunjukkan bahwa peningkatan pasokan air bagi masyarakat miskin perkotaan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Sebelumnya, akses terhadap air bersih terbatas dan biaya penyediaan air sangat tinggi dalam pembiayaan tarif Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM).

2. Pembahasan

Menurut laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2016 yang dikutip oleh National Geographic Indonesia, sekitar 65% air sungai di Indonesia mengalami pencemaran (Hasuki: 2016). Pengelolaan lingkungan hidup yang buruk di Indonesia berdampak negatif pada penyediaan air bersih dan sistem sanitasi. Salah satu tantangan dalam penyediaan air bersih di Indonesia adalah keterbatasan sumber air baku (Kementerian Pekerjaan Umum, 2012). Kualitas air yang buruk menimbulkan ancaman kesehatan bagi para penggunanya, yang tentunya menjadi kekhawatiran besar. Sebagian besar penduduk Indonesia menggunakan air sungai sebagai sumber utama air bersih. Pencemaran air sungai di Indonesia terutama disebabkan oleh limbah perkotaan dan domestik, lebih dominan dibandingkan dengan limbah industri.

Hal ini semakin menegaskan hubungan antara kualitas air dengan kualitas fasilitas sanitasi yang ada, di mana kualitas air sangat dipengaruhi oleh kualitas fasilitas sanitasi. Jika kondisi sanitasi buruk, maka kualitas air juga akan buruk. Akses ke air bersih dan sanitasi yang memadai adalah salah satu dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) keenam, yang bertujuan

memastikan semua orang memiliki akses ke air bersih dan sanitasi serta pengelolaan yang berkelanjutan pada akhir tahun 2030. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 menargetkan ketersediaan air minum yang memadai hingga 100%. Pada akhir tahun 2019, ditetapkan bahwa 85% penduduk harus memiliki akses terhadap kebutuhan air yang mencakup kuantitas, kualitas, konsistensi, dan keterjangkauan, sedangkan 15% sisanya harus memiliki akses minimal untuk kelangsungan hidup dasar (BPS, 2015).

Hasil identifikasi sumber air minum yang layak: 65 (42,1%) menjawab “air minum yang cukup dan aman sesuai standar kesehatan”. Dengan cara ini kami berupaya mengurangi konservasi sumber air bersih untuk minum dan toilet, konsumsi air bersih untuk mandi, mencuci, toilet dan memasak, serta menjaga infrastruktur yang dibangun untuk melindungi Batanes. Jangan membuang sampah sembarangan di wilayah Sungai Kuantan, tidak membangun rumah atau tempat komersial di tepi sungai atau menanam tanaman yang dilindungi oleh pengaman sungai. Namun hasil survei menunjukkan masih 272 atau 74% PDAM belum menerapkan tarif FCR, bahkan terkait evaluasi kinerja PDAM kategori “PDAM Sehat”, angka tersebut juga berlaku untuk tarif FCR yang lebih tinggi. daripada yang sekarang. seperti Namun tingkat kebocoran PDAM lebih dari 30% yaitu 195 fasilitas (53%/0. Meskipun PDAM mempunyai jumlah pelanggan yang signifikan (lebih dari 5.000), ternyata jumlahnya mencapai 11%, sedangkan PDAM dengan jumlah pelanggan kurang dari 10.000 mencakup 154 atau 42% dari seluruh PDAM. Terakhir, angka PDAM antara 10.000 dan 50.000, yaitu 154 atau 42%.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 829/Menkes/SK/VII/1999 yang mengatur persyaratan kesehatan rumah susun, mencakup air minum yang memadai dan sanitasi yang layak, kriteria untuk prasarana dan sarana lingkungan dalam peraturan kesehatan rumah susun adalah sebagai berikut:

- a. Ada area bermain anak dan fasilitas rekreasi keluarga yang dapat dibangun dengan keamanan dan tanpa insiden kecelakaan.
- b. Pada sistem drainase, tidak ada tempat bagi penyakit untuk berkembang biak dan menyebar.
- c. Masyarakat merasa bahwa pembangunan jalan tidak mengancam kesehatan mereka, trotoar dibangun dengan memperhatikan keselamatan pejalan kaki dan penyandang cacat, jembatan dilengkapi dengan pagar pengaman, dan pencahayaan jalan tidak menyebabkan silau.
- d. Air bersih yang mencukupi selalu tersedia dan kualitasnya memenuhi standar kesehatan serta kebutuhan yang ada.
- e. Minimal pembuangan tinja dan sampah rumah tangga harus sesuai dengan

standar kesehatan.

- f. Pengelolaan limbah rumah tangga harus dilakukan sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku.
- g. Ketersediaan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, komunikasi, kesempatan kerja, rekreasi, pendidikan, seni, dan lainnya.
- h. TPM harus memastikan bahwa makanan tidak terkontaminasi oleh bahan yang dapat menyebabkan keracunan.

3. Penutup

Air bersih dan sanitasi merupakan langkah untuk mengurangi kematian akibatnya menimbulkan penyakit diare, untuk masyarakat supaya meningkatkan kesejahteraan mereka dengan cara membersihkan lingkungan khususnya kali dan got agar air yang di dalam got ataupun kali menjadi bersih, secara signifikan air menyediakan sumber daya yang memadai dalam berbagai elemen. Dalam kasus ini adanya di Indonesia yang mengakibatkan lingkungan buruk dan berdampak negatif terhadap air bersih sanitasinya hampir 65% air sungai yang tercemar sangat berat. Untuk mengurangi jumlahnya air yang tidak mencemari wilayah sungai dengan sampah, tidak membangun rumah atau fasilitas komersial di dasar sungai dan tidak menanam tanaman pelindung di dasar sungai.

C. Pembangunan Air bersih dan sanitasi dalam mewujudkan ekonomi hijau

1. Pendahuluan

Pengelolaan air bersih dan sanitasi telah menjadi fokus utama dalam upaya mencapai ekonomi hijau di berbagai negara. Air bersih dan sanitasi yang memadai tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memiliki dampak signifikan pada perkembangan ekonomi dan lingkungan. Beberapa negara telah meningkatkan kualitas air bersih dan sanitasi dengan cara meningkatkan efisiensi pengelolaan air bersih, pengembangan infrastruktur sanitasi, penggunaan teknologi hijau, partisipasi masyarakat, dan koordinasi dengan pemerintah. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi, seperti kekurangan air, polusi air, dan keterbatasan infrastruktur. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas air bersih dan sanitasi serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang pentingnya pengelolaan air bersih dan sanitasi dalam mencapai ekonomi hijau dan strategi-strategi yang efektif serta dampaknya terhadap perkembangan ekonomi dan lingkungan.

2. Pembahasan

Pembangunan Air Bersih dan Sanitasi dalam Mewujudkan Ekonomi Hijau Pembangunan air bersih dan sanitasi telah menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya mewujudkan ekonomi hijau di berbagai negara. Air bersih dan sanitasi yang memadai tidak hanya berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi dan lingkungan. Semua makhluk hidup, khususnya manusia, membutuhkan air dalam segala aspek kehidupannya. Air merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, karena air ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebutuhan untuk mandi, mencuci, bahkan memasak dan minum. Indonesia merupakan negara yang memiliki luas lautan lebih besar daripada luas daratan. Namun, tidak semua air dapat digunakan sebagai bahan baku kehidupan sehari-hari (Nadhif, 2022).

Pengaruh air bersih dan sanitasi terhadap ekonomi sangat signifikan. Air bersih yang tersedia dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi, seperti meningkatkan kualitas produksi pertanian dan perikanan, sehingga meningkatkan pendapatan petani dan nelayan. Selain itu, air bersih juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga meningkatkan konsumsi dan pengeluaran masyarakat, sehingga meningkatkan pendapatan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara telah berhasil meningkatkan pendapatan nasional mereka dengan meningkatkan kualitas air bersih dan sanitasi. Contohnya, negara-negara di Eropa telah meningkatkan pendapatan nasional mereka dengan meningkatkan kualitas air bersih dan sanitasi, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan pendapatan nasional. Dengan demikian, meningkatkan kualitas air bersih dan sanitasi sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan pendapatan nasional.

Pengaruh air bersih dan sanitasi terhadap lingkungan sangat signifikan. Air bersih yang tersedia dapat mengurangi risiko penyakit yang disebabkan oleh air yang kotor, sehingga dapat mengurangi biaya kesehatan masyarakat. Selain itu, air bersih juga dapat mengurangi polusi air, sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara telah berhasil mengurangi polusi air dengan meningkatkan kualitas air bersih dan sanitasi, sehingga meningkatkan kualitas lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup. Air yang dapat digunakan untuk sehari-hari adalah air bersih, yaitu air yang aman (sehat), tidak berwarna, dan

tidak berbau, sehingga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari terutama untuk mencuci, memasak, bahkan minum (Suripin, 2002).

Ketersediaan air bersih mutlak diperlukan untuk menunjang hidup sehat, karena air bersih berkaitan erat dengan sanitasi. Menurut *World Health Organization* (WHO) dalam (Ikhsani, 2016), sanitasi adalah suatu usaha yang mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia, terutama terhadap hal-hal yang memengaruhi efek, merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup. Pendapat lain juga mengatakan bahwa sanitasi adalah suatu kondisi yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, terutama dalam penyediaan air minum dan pembuangan limbah yang memadai. Dalam hal ini, sanitasi dikaitkan dengan sanitasi lingkungan (Suryani, 2020). Dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih dan sanitasi yang layak, tentunya harus memperhatikan prinsip-prinsip manajemen, karena untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai sangat dibutuhkan adanya manajemen pengelolaan, terutama hal ini dalam manajemen pengelolaan keuangan. Manajemen keuangan merupakan pengelolaan fungsi keuangan. Fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana (*raising of fund*) dan bagaimana menggunakan dana tersebut (*allocation of fund*) (Mulyanti, 2017). Adapun tujuan dari manajemen keuangan itu sendiri adalah untuk memaksimalkan profit atau keuntungan, dan meminimalkan biaya untuk mendapatkan pengambilan keputusan yang maksimum (Mulyawan, 2015). Manajemen keuangan juga membantu mewujudkan ekonomi hijau.

Untuk mencapai ekonomi hijau, diperlukan strategi pengelolaan air bersih dan sanitasi yang efektif. Beberapa strategi yang dapat diimplementasikan termasuk pengelolaan air bersih dengan efisiensi untuk meningkatkan kualitasnya dan mengurangi biaya operasional, pengembangan infrastruktur sanitasi yang memadai untuk meningkatkan sanitasi dan mengurangi risiko penyakit, penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan air bersih dan sanitasi untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kesadaran akan pentingnya air bersih dan sanitasi, serta tanggung jawab bersama dalam pengelolaannya.

Pengelolaan air bersih yang efisiensi dapat meningkatkan kualitas air bersih dan mengurangi biaya pengelolaan air bersih. Strategi ini dapat diterapkan dengan cara meningkatkan efisiensi penggunaan air bersih, mengurangi kehilangan air bersih, dan meningkatkan kualitas air bersih. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara telah berhasil meningkatkan efisiensi

pengelolaan air bersih dengan cara meningkatkan kualitas air bersih dan mengurangi biaya pengelolaan air bersih.

Dengan mengintegrasikan strategi-strategi ini dalam kebijakan dan praktik pengelolaan air bersih dan sanitasi, kita dapat mencapai ekonomi hijau yang berkelanjutan, yang tidak hanya melindungi lingkungan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pengembangan infrastruktur sanitasi yang memadai dapat meningkatkan kualitas sanitasi dan mengurangi risiko penyakit. Strategi ini dapat diterapkan dengan cara meningkatkan kualitas sanitasi, mengurangi kehilangan air bersih, dan meningkatkan kualitas air bersih. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara telah berhasil meningkatkan kualitas sanitasi dengan cara meningkatkan kualitas infrastruktur sanitasi dan mengurangi risiko penyakit.

Penggunaan teknologi hijau dalam pengelolaan air bersih dan sanitasi dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Strategi ini dapat diterapkan dengan cara menggunakan teknologi hijau yang ramah lingkungan, seperti teknologi pengolahan air bersih yang ramah lingkungan, teknologi pengelolaan air bersih yang efisiensi, dan teknologi pengelolaan air bersih yang berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara telah berhasil mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan cara menggunakan teknologi hijau dalam pengelolaan air bersih dan sanitasi.

Dengan demikian, strategi pembangunan air bersih dan sanitasi yang efektif harus berfokus pada meningkatkan akses, kualitas, dan efisiensi dalam pengelolaan air bersih dan sanitasi, serta meningkatkan peran masyarakat dan pemerintah dalam mencapai tujuan air bersih dan sanitasi layak

3. Penutup

Pengelolaan air bersih dan sanitasi telah menjadi fokus utama dalam upaya mencapai ekonomi hijau yang berkelanjutan. Air bersih dan sanitasi yang memadai tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi dan lingkungan.

Oleh karena itu, strategi-strategi pengelolaan air bersih dan sanitasi yang efektif harus diterapkan untuk mewujudkan ekonomi hijau yang berkelanjutan. Beberapa negara telah berhasil meningkatkan kualitas air bersih dan sanitasi dengan cara meningkatkan efisiensi pengelolaan air bersih, pengembangan infrastruktur sanitasi, penggunaan teknologi hijau, partisipasi masyarakat, dan koordinasi dengan pemerintah. Dengan demikian, strategi-strategi tersebut perlu diterapkan untuk mewujudkan ekonomi hijau yang berkelanjutan.

Dalam kesimpulan, pengelolaan air bersih dan sanitasi yang efisien sangat penting untuk menjaga ketersediaan air yang berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi yang efektif, industri dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan air dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan air bersih dan sanitasi yang efisien harus menjadi prioritas utama dalam upaya mewujudkan ekonomi hijau yang berkelanjutan.

D. Tantangan Akses Air Bersih dan Sanitasi di Era Urbanisasi

1. Pendahuluan

Air bersih adalah kunci penting untuk kehidupan manusia, sanitasi yang layak adalah menjaga elemen-elemen esensial merupakan fondasi utama untuk menjaga kesehatan masyarakat. Meskipun demikian, pemenuhan kebutuhan akan air bersih dan sanitasi masih menjadi tantangan di beberapa wilayah di dunia, termasuk di Jakarta, sebuah kota metropolitan yang berkembang pesat. Tantangan ini semakin kompleks dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang cepat. Pemerintah Provinsi Jakarta telah berusaha menambah akses untuk air bersih dan fasilitas sanitasi melalui berbagai proyek, seperti Sistem Pengelola Air Limbah Domestik (SPALD). Namun, permasalahan pencemaran air oleh limbah industri, rumah tangga, dan pertanian menjadi hambatan dalam upaya ini. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan terkait akses sanitasi yang layak, penting untuk memperhatikan indikator seperti ketersediaan air bersih, aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas sanitasi, dan pembuangan limbah domestik.

2. Pembahasan

Air bersih adalah esensial untuk kehidupan sehari-hari dan merupakan prasyarat utama bagi kesehatan manusia. Keterjangkauan air bersih dan sanitasi yang layak merupakan tantangan untuk berbagai wilayah. Meskipun demikian, air bersih dapat diartikan sebagai air yang telah melalui proses pemurnian sehingga aman untuk diminum dan digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Ini merupakan fondasi penting dalam upaya menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Air bersih dan sanitasi yang baik adalah elemen-elemen esensial yang merupakan fondasi utama untuk menjaga kesehatan. Syarat-syarat yang dimaksud mencakup standar kualitas air dari berbagai aspek, termasuk fisik, kimia, biologi, dan radiologi, sehingga ketika diminum, tidak menimbulkan dampak negatif pada tubuh. (Ketentuan Umum Permenkes No.416/Menkes/PER/IX/1990).

Kota Jakarta, sebagai kota metropolis yang sedang berkembang dengan pesat dan menjadi pusat ekonomi Indonesia, berada di garis depan dalam pembangunan perkotaan. Namun, di tengah kemajuan ini, muncul isu-isu kritis terkait akses air bersih dan fasilitas sanitasi, yang membentuk faktor kunci yang mempengaruhi pembangunan berkelanjutan kota ini. Ketersediaan air bersih dan sanitasi yang memadai tidak hanya penting untuk kesehatan masyarakat, tetapi juga merupakan bagian integral dari kemajuan sosial-ekonomi Jakarta secara keseluruhan.

Dengan perkembangan populasi yang cepat dan urbanisasi yang memuncak, tantangan untuk memastikan pasokan air bersih yang memadai dan fasilitas sanitasi yang cukup menjadi semakin kompleks. Keterkaitan antara pertumbuhan perkotaan yang pesat, keberlanjutan lingkungan, dan kebutuhan mendesak akan layanan pokok menuntut pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi saat ini penyediaan air dan sanitasi di Jakarta.

Untuk mengatasi tantangan ini, Pemerintah Provinsi Kota Jakarta berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dalam pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) atau Jakarta Sewerage Development Project (JSDP). Ini merupakan langkah yang penting dalam upaya meningkatkan infrastruktur sanitasi dan mengkonfirmasi ketersediaan air bersih bagi semua warga Jakarta.

Air yang memiliki karakteristik khusus yang tidak sama dengan air minum, tetapi digunakan dalam aktivitas sehari-hari. (Permenkes RI No. 32 Tahun 2017). Saat ini, mendapatkan pasokan air bersih semakin sulit. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pencemaran air, yang berasal dari limbah industri, domestik, dan pertanian.

Secara umum syarat air layak konsumsi menurut Amelia (2020) adalah sebagai berikut ini :

1. Syarat fisik

Menurutnya, syarat-syarat ini terkait dengan karakteristik fisik air yang dapat dideteksi oleh indera manusia. Dia berpendapat bahwa air yang aman untuk diminum haruslah transparan atau tidak berwarna, tidak memiliki endapan, tidak berbau, tidak memiliki rasa (netral), dan memiliki suhu lebih rendah dari suhu udara di sekitarnya, yaitu antara 10 hingga 25 derajat Celcius.

2. Syarat kimiawi

Menurutnya, air yang aman untuk diminum harus memiliki tingkat keasaman yang seimbang, yaitu sekitar 7 pada skala pH, dan harus mengandung jumlah yang memadai yodium. Kehadiran zat kimia beracun dalam air bisa dikenali dari tanda-tanda fisiknya. Air yang tercemar atau mengandung logam berat

akan memiliki aroma yang tajam dan warna yang tidak biasa.

3. Syarat mikrobiologi

Menurutnya, air yang aman untuk diminum harus tidak mengandung kuman atau bakteri yang dapat menyebabkan penyakit, terutama *Escherichia* dan *Salmonella sp* yang seringkali menyebabkan gangguan pencernaan seperti sakit perut dan diare.

Menurut (Chandra, 2012) Sumber air yang aman untuk konsumsi manusia harus bersih dan terjamin kualitasnya. Kriteria-kriteria untuk sumber air yang bersih dan aman mencakup, seperti:

- a. Tidak terkontaminasi oleh zat atau mikroba penyakit.
- b. Bebas dari bahan kimia berbahaya dan toksin.
- c. Tidak memiliki rasa atau aroma yang tidak lazim.
- d. Mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah.
- e. Sesuai dengan standar kesehatan yang ditetapkan oleh WHO atau Departemen Kesehatan RI.

Air dianggap kotor ketika terdapat penyakit, parasit, zat kimia berbahaya, dan limbah industri. Sumber air yang berada disekitar permukaan bumi berasal dari berbagai sumber.

Menurut (Yulinawati & Purwaningrum, 2021). Pada tahun 2030, upaya global ditujukan untuk mencapai salah satu dari enam tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak dan bersih serta mengakhiri praktik buang air besar sembarangan atau *Open Defecation Free* (ODF). Sedangkan menurut (Primana, 2021) Pada tahun 2024, tujuan sanitasi nasional adalah meningkatkan ketersediaan layanan air minum dan sanitasi yang sesuai dengan standar serta berkelanjutan, sambil mempromosikan kesehatan dan memberdayakan seluruh masyarakat.

Menurut (Arifianty, 2017) Untuk mencapai standar sanitasi yang memadai, diperlukan pencapaian beberapa parameter yang telah ditetapkan. Standar sanitasi yang memadai bisa dilihat dari ketersediaan air bersih yang mencukupi dan mudah diakses oleh masyarakat, serta tersedianya sarana pembuangan limbah domestik dan toilet keluarga.

Menurut (Ningrum, 2014) Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mendorong pertumbuhan yang dapat mengatasi masalah-masalah saat ini untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dimasa depan. Sanitasi adalah proses yang mempersiapkan segala kebutuhan dalam program untuk melaksanakan tindakan-tindakan tertentu, sehingga setiap proses pembangunan dapat berjalan dengan baik melalui kerjasama masyarakat. Hal ini melibatkan masyarakat

dalam bekerja sama menjalankan program air minum dan sanitasi demi memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum

3. Penutup

Upaya untuk memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak di Jakarta adalah langkah krusial dalam membangun fondasi yang kokoh untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam menghadapi tantangan kompleks ini, penting bagi pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk berkolaborasi secara efektif dalam mengembangkan solusi yang holistik dan berkelanjutan. Ini termasuk upaya untuk meningkatkan infrastruktur, mengelola limbah dengan bijaksana, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas air. Momentum ini juga memanggil kita semua untuk bertindak. Baik itu dengan mengurangi limbah, mendukung inisiatif untuk membersihkan lingkungan, atau bahkan dengan memberikan akses kepada mereka yang membutuhkan. Dengan kerjasama dan komitmen bersama, kita dapat mencapai visi akan sebuah Jakarta yang berkelanjutan, di mana setiap individu memiliki akses yang setara terhadap air bersih dan sanitasi yang layak.

E. Tantangan Kesehatan Perumahan dalam Memajukan Air Bersih dan Sanitasi yang Memadai di Indonesia

1. Pendahuluan

Kesehatan perumahan, termasuk akses untuk air minum yang layak dan sanitasi yang sesuai, memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan dan produktivitas masyarakat. Dalam konteks global, *United Nations Sustainable Development Goals* (SDGs) menegaskan pentingnya akses untuk masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi yang layak sebagai bagian dari upaya untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.

Di negara Indonesia, meskipun telah ada kemajuan dalam upaya memajukan fasilitas untuk air minum yang aman dan sanitasi yang memadai, masih banyak tantangan yang perlu diatasi. Disparitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antarprovinsi, merupakan salah satu isu krusial yang perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan kesehatan perumahan di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai upaya untuk memajukan akses masyarakat terhadap air minum yang aman dan fasilitas sanitasi yang layak melalui berbagai program, seperti Sanitasi Berbasis Masyarakat. Namun, upaya ini memerlukan dukungan yang kuat dari semua pihak dan koordinasi lintas sektor untuk mencapai hasil yang optimal.

2. Pembahasan

Menurut (Krieger & Higgins, 2002) Perumahan adalah kebutuhan mendasar bagi manusia dan menjadi salah satu faktor penentu kesehatan masyarakat. Sebuah tempat tinggal yang layak harus memenuhi standar kesehatan agar penghuninya dapat mempertahankan kesehatannya. Kesehatan perumahan tidak terlepas dari adanya infrastruktur yang mencakup pencadangan air bersih, sistem sanitasi untuk pembuangan sampah, transportasi yang memadai, dan ketersediaan layanan sosial yang memadai.

Menurut (Biro Pusat Statistik, 2015) Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan kebutuhan permukiman meliputi standar rumah yang layak, fasilitas sanitasi, pasokan listrik, air bersih, serta sistem pengelolaan sampah. Infrastruktur yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan sangat vital dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bahkan menjadi faktor utama yang memengaruhi tingkat kesehatan dan kesejahteraan penduduk.

Persyaratan untuk kesehatan rumah dan lingkungan pemukiman adalah peraturan teknis yang harus dipatuhi untuk melindungi warga dan komunitas sekitar dari risiko lingkungan. Ini adalah standar minimum yang diperlukan agar sebuah rumah dianggap sehat. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang standar kesehatan perumahan, kriteria untuk air minum yang aman dan sanitasi yang layak dijelaskan dalam bagian infrastruktur dan fasilitas lingkungan. Peraturan ini merinci persyaratan kesehatan perumahan sebagai berikut:

- a) Menyediakan area bermain yang aman untuk anak-anak dan tempat rekreasi keluarga dengan konstruksi yang dirancang untuk mencegah kecelakaan.
- b) Memiliki sistem drainase yang tidak menjadi tempat berkembang biaknya vektor penyakit.
- c) Menyediakan infrastruktur jalan yang tidak mengganggu kesehatan, dengan trotoar yang aman bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas, serta jembatan yang dilengkapi pagar pengaman. Pencahayaan jalan harus memadai tanpa menyebabkan silau.
- d) Menyediakan pasokan air bersih yang memenuhi standar kesehatan dan tersedia secara konsisten dengan kapasitas minimal yang memadai.
- e) Pengelolaan limbah tinja dan rumah tangga harus sesuai dengan standar kesehatan yang ditetapkan.
- f) Penanganan sampah rumah tangga harus sesuai dengan standar kesehatan yang ditetapkan.
- g) Memiliki akses yang mudah ke fasilitas-fasilitas seperti layanan kesehatan, komunikasi, tempat kerja, tempat hiburan, pendidikan, seni, dan lainnya.

h) Tempat pengelolaan makanan harus memastikan tidak ada kontaminasi yang dapat menyebabkan keracunan.

Menurut data dari Survey (SUSENAS) yang dirilis pada tahun 2015 bagi Biro Pusat Statistik, sebanyak 70,97% rumah tangga di Indonesia sudah mendapatkan fasilitas air minum yang layak. Dalam survei tersebut, air minum layak didefinisikan seperti air yang berasal dari sumber seperti pipa air bersih, sumur pompa, dengan syarat bahwa jaraknya dari tempat pembuangan limbah domestik (Septic tank) minimal 10 meter.

Menurut laporan BPS, sekitar 81,30% rumah tangga di kota memiliki kemampuan untuk mendapatkan air minum yang layak, sementara di daerah desa, sekitar 60,58% rumah tangga yang mempunyai fasilitas yang sama.

Dalam laporan itu juga disebutkan bahwa distribusi Ketersediaan akses air minum yang layak bagi rumah tangga belum tersebar merata di seluruh provinsi. Tiga provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum yang layak adalah DKI Jakarta sebesar 93,4%, Bali sebesar 91,27%, dan Kalimantan Utara sebesar 84,59%. Program Sanitasi Berbasis Masyarakat yang sedang didorong oleh pemerintah kini bisa menjadi sarana untuk memajukan fasilitas masyarakat terhadap air minum yang aman.

Penting untuk secara berkala mengevaluasi program ini secara menyeluruh dari segala sudut pandang. Kerjasama antar lembaga terkait juga perlu diperkuat untuk mendukung keberhasilan program ini secara optimal.

Sanitasi yang memadai dapat dijelaskan sebagai sistem sanitasi sederhana di lingkungan masyarakat yang dianggap memenuhi standar, di mana rumah tangga memiliki akses ke tempat bab yang mereka gunakan sendiri, serta mempunyai sarana pembuangan akhir seperti septic tank atau (SPAL).

Sanitasi yang memadai akan memberikan kontribusi besar bagi pemerintah dalam meningkatkan upaya kesehatan lingkungan di tempat tinggal. Kurangnya kemajuan dalam meningkatkan akses sanitasi pada rumah tinggal dapat meningkatkan risiko paparan berbahaya bagi kesehatan, yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit.

Menurut (Kementerian Kesehatan, 2017). Khususnya, tingginya angka penyakit diare terkait dengan kondisi sanitasi yang kurang memadai, pengendalian lingkungan yang tidak baik, penuhnya populasi yang tinggi, dan ketersediaan air bersih yang tidak mencukupi. Ketika ditahun 2016, jumlah kasus diare yang dilaporkan di fasilitas kesehatan Indonesia mencapai 6.897.463, dengan jumlah tertinggi terjadi di Jawa Barat (1.261.159) dan diikuti

oleh Jawa Timur (1.048.885).

3. Penutup

Pentingnya pemahaman yang mendalam tentang kesehatan perumahan, khususnya fasilitas untuk air minum yang baik dan sanitasi yang mencukupi, dalam konteks masyarakat Indonesia. Meskipun telah ada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah serta pihak-pihak terkait, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kesehatan perumahan secara menyeluruh. Melalui upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan, kita dapat memperbaiki disparitas dalam fasilitas pada air bersih dan sanitasi yang layak antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antarprovinsi. Program-program seperti Sanitasi

Berbasis Masyarakat dapat menjadi jalan keluar untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi yang memadai. Selain itu, penting juga untuk terus memperkuat kerjasama lintas sektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan kesehatan perumahan. Evaluasi berkala terhadap program-program yang telah dilaksanakan juga menjadi kunci dalam memastikan efektivitas dan efisiensi dari upaya-upaya yang dilakukan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang dalam meningkatkan kesehatan perumahan, diharapkan kita dapat merumuskan langkah-langkah yang lebih baik dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam hal kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [UU] Undang-Undang. 2002. Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002. Jakarta (ID): Kementerian Hukum dan HAM
- Adahan, S. K. (2019). Ketahanan Pangan dan kesejahteraan subjektif di kalangan pemuda Arab yang hidup dalam berbagai konteks kestabilan politik. *Journal of Adolescent*, 70-78.
- Adawiyah, E. (2020). Kemiskinan_Dan_Penyebabnya. 1(April), 43–50.
- Arifin, J. (2020). Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. *Sosio Informa*, 6(2).
- Alawiyah, T., & Setiawan, F. (2021). Pengentasan kemiskinan berbasis kearifan lokal pada masyarakat desa. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 15(2), 131-154.
- Ardinata, M. (2020). Tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ham*, 11(2), 319-332
- Arifin, J. (2020). Budaya kemiskinan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 6(2), 114-132.
- Aurelya, T., Nurhayati, N., & Purba, S. F. (2022). Pengaruh Kondisi Sektor Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal STEI Ekonomi*, 31(02), 83–92. <https://doi.org/10.36406/jemi.v31i02.752>
- Aziz, A. (2021). Promising business opportunities in the industrial age 4.0 and the society era 5.0 in the new-normal period of the covid-19 pandemic. *Scholarly Journal of Psychology and Behavioral Sciences*.
- Aziz, A., & Nur'aisyah, I. (2021). Role Of The Financial Services Authority (OJK) To Protect The Community On Illegal Fintech Online Loan Platforms. *Journal of Research in Business and Management*.
- Aziz, A., Syam, R. M. A., Hasbi, M. Z. N., & Prabuwo, A. S. (2023). Hajj Funds Management Based on Maqāṣid Al-Sharī'ah; A Proposal for Indonesian Context. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 18(2), 544-567.
- Bainus, A., & Rachman, J. B. (2018). *Sustainable Development Goals. Intermestic: Journal of International Studies*, 3(1), 1-8.
- Chaireni, R., Agustanto, D., Wahyu, R. A., & Nainggolan, P. (2020). Ketahanan pangan berkelanjutan. *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan*, 1(2), 70-79.

- Charles, P., Runtunuwu, H., Judijanto, L., & Soedirman, U. J. (2024). *Sustainable Economic Development (Teori Dan Landasan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Multi Sektor Di Indonesia)* Ajeng Faizah Nijma Ilma. <https://www.researchgate.net/publication/380461851>
- Debra Umberson and Jennifer Karas Montez. (2010). Social Relationships and Health: A Flashpoint for Health Policy. *Caracol Radio*, 51, 1–16. <https://doi.org/10.1177/0022146510383501>. Social
- Dinata, Deden Indra, et al. "Bersinergi Meningkatkan Pemahaman Nutrisi Melalui Pilar SDGS "Tanpa Kelaparan" Di Desa Rancaekek Kulon." *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)* 5.12 (2022): 4543-4550.
- Djabar, D. A., Olilingo, F. Z., & Santoso, I. R. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Lonuo Kecamatan Tilingkabila Kabupaten Bonebolango. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 581–588. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2.1887>
- Dunia, B. (2018). Kemiskinan dan kesejahteraan bersama. Menyatukan tekatki kemiskinan. *Washington DC*.
- Elsa Anisa Gunawan, dll. (2024). *Menuju Masyarakat Mandiri Dan Berkelanjutan: Sinergi Literasi Digital Dan Pembangunan Berkelanjutan 2030*.
- FAO, I. U. (2018). Keadaan ketahanan pangan dan gizi di dunia. Membangun ketahanan iklim untuk ketahanan pangan dan gizi. *Roma, FAO*.
- FAO. (2011). Keadaan pangan dan pertanian perempuan di bidang pertanian menutup kesenjangan gender untuk pembangunan . *ROMA*.
- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1). <https://doi.org/10.7454/jsht.v1i1.6>
- Granero-Jiménez, J., López-Rodríguez, M. M., Dobarrio-Sanz, I., & Cortés-Rodríguez, A. E. (2022). Influence of Physical Exercise on Psychological Well-Being of Young Adults: A Quantitative Study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(7). <https://doi.org/10.3390/ijerph19074282>
- Haerisma, A. S., Anwar, S., & Muslim, A. (2023). Mengembnagkan destinasi wisata halal di pulau ombok dengan enam ciri khas prespektif Jasser awdas maqasid syariah. *Afjarna : Jurnal studi isam interdisipliner Indonesia* 19(2), 298- 316.

- Hamzah, A. (2012). Kebijakan untuk memerangi kemiskinan dan kelaparan di Indonesia: realitas dan penelitian. *Jurnal Kebijakan Manajemen Kesehatan Indonesia*, 1(1), 8251.
- Harjadi, D., Arraniri, I. & Fatmasari, D. (2021). Peran suasana toko dan motif belanja hedonis terhadap perilaku pembelian impulsif. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 14(2), 46-52.
- Hasan, N. F. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Pendidikan. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 4(1), 1-18.
https://outsco.ipb.ac.id/img/Daftar_EOS/Essay/AwMsWiKJZhJYp71JaLU3zJxaDKr1GaxErPY4XHNA.pf , Tanpa Kelaparan (Zero Hunger) sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)
<https://sdgs.ub.ac.id/inacol-sdgs/17-goals-bappenas/sdgs-2-tanpa-kelaparan/>
- Ishartono, S. & T. R. (2015). *Sustainable Development Goals (Sdgs)*.
[Http://Www.Bappenas.Go.Id/Id/Berita-Dan-Siaran-](http://Www.Bappenas.Go.Id/Id/Berita-Dan-Siaran-)
- Ishatono, I., & Raharjo, S.T. (2016). *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan pengentasan kemiskinan. *Share: Social Work Journal*, 6(2), 159.
- Kadji, Yulianto. "Kemiskinan dan Konsep teoritisnya." *Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ekonmi Dan Bisnis UNG* (2012): 1-7.
 Litbang Provinsi Jawa Tengah, 12(2), 129-.
- Macella, A. D. R., Najamudin, N., Handayani, S.W., & Juraida, I. (2021). Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Aceh Kreatif Untuk Mengurangi Kemiskinan di Aceh. *Jurnal Public Policy*, 7(1), 75-82.
- Malihah, L. (2022). Tantangan Dalam Upaya Mengatasi Dampak Perubahan Iklim Dan Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 17(2), 219–232.
[Https://Doi.Org/10.47441/Jkp.V17i2.272](https://Doi.Org/10.47441/Jkp.V17i2.272)
- Manurung D. 1998. Keadaan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pekerja Anak di Indonesia. Jakarta (ID): CV. Intermedia.
- Nasir, A., Busthomi, A. O., & Rismaya, E. (2022). Wisata syariah berbasis kearifan local, nilai agama, pendapatan, motivasi, permintaan dan kemauan membayar (WTP). *Jurnal internasional Ilmu Sosial dan Penelitian Manusia*.
- Nawir, A., Syamsuddin, S., & Jusniaty, J. (2022). Penerapan Program *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa Polewali Dalam Mengurangi Kemiskinan. *Demokrasi*, 2(1), 1-18.

- Njatrijani, R. (2018). Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang. *Gema Keadilan*, 5(1), 16–31. <https://doi.org/10.14710/gk.2018.3580>
- Numberi, M. L., Sumule, A. I., & Tjolli, I. (2021). Aspek Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan dan Pemanfaatan Dana Desa (Kasus Desa Manokwari Selatan). *Jurnal kehutanan papua*, 7 (1), 26-40
- Nuraeniyah Jamalilail, S., Dio Tri Dewanto, R., Fikri Maulana, S., Nuradilah, F., Rendi Fadilah, A., & Rabani Ahidat, A. (2023). *Penerapan Program Sdgs Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sukajadi*.
- Pratiwi, S. A., Noorsyarifa, G. C., & Apsari, N. C. (2022). Upaya Penanggulangan Kemiskinan Ekonomi di Indonesia Melalui Perspektif Pekerja Sosial. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(1), 72.
- Prawoto, N., & Selatan, J. L. (2009). Memahami Kemiskinan dan Mengatasi Penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 9(1), 56–68.
- Putri, N. A., & Purnaweni, H. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bojonegoro. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 510-522.
- R. Remans, S. W. (2014). Mengukur keragaman nutrisi persediaan pangan nasional ketahanan pangan global . 174-182.
- Rini, A. S. (2015). Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan pada Peserta jaminan Kesehatan masyarakat. *Jurnal Agromedicine*, 2(2), 128-134.
- Salasa, A. R. (2021). Paradigma dan dimensi strategi ketahanan pangan indonesia. *Jejaring Administrasi Publik*, 13(1), 35-48.
- Setyari, U. A., & Angge, I. C. (2011). *Hiasan Suku Indian Sebagai Sumber Ide Penciptaan Karya Seni Logam*.
- Sfeatcu, R., Cernuşcă-Miţariu, M., Ionescu, C., Roman, M., Cernuşcă-Miţariu, S., Coldea, L., Bota, G., & Burcea, C. C. (2014). The concept of wellbeing in relation to health and quality of life. *European Journal of Science and Theology*, 10(4), 123–128.
- Shaw, G. B. (2019). Menghapus Kemiskinan. *Pembang. Berkelanjutan Stud. Kasus Di Indones*, 15.
- Soebijantoro, S. (2011). Peran Pendidikan Sejarah Dalam Pengembangan Pengajaran Pendidikan Multikultur Di Lptk. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*. <https://doi.org/10.25273/Ajisp.V1i1.121>

- Soetrisno L. 1997. Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan. Yogyakarta (ID): Kanisius Suparlan P. 1995. Kemiskinan di Perkotaan. Jakarta (ID): Yayasan Obor Indonesia.
- Sofianto, A., Diyanayati, K., & Kundarto, S. A. (2014). INOVASI PELAYANAN PUBLIK DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN. *Jurnal*
- Sopian, K., & Mulyono, D. (2023). Pengembangan Aplikasi Sapa Warga Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat. *Comm- Edu (Community Education Journal)*,6(2), 257-265.
- Stephoe, A., Deaton, A., & Stone, A. S. (2015). Psychological wellbeing, health and ageing NIH Public Access. *Lancet*, 385(9968), 640–648. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)61489-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)61489-0). Psychological
- Suleman, S. A., & Resnawaty, R. (2017). Program Keluarga Harapan (PKH): Antara perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 88-92.
- Suratha, I. K. (2015). Krisis petani berdampak pada ketahanan pangan di Indonesia. *Media Komunikasi Geografi*, 16(1).
- Sutikno, S., Soedjono, E. S., Rumiati, A. T., & Trisunarno, L. (2015). Pemilihan Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pendekatan Sistem. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 11(1), 135. <https://doi.org/10.23917/jep.v11i1.339>
- Suyanto, B. (2001). Kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 14(4), 25-42.
- Tambaip, B., Tjilen, A. P., & Ohoiwutun, Y. (2023). *Peran fasilitas kesehatan untuk kesejahteraan masyarakat*. 14(2), 189–196.
- Tjandraningsih I. 1995. Pemberdayaan Pekerja Anak. Bandung (ID); Yayasan Akatiga.
- Usman H, Nachrowi D. 2004. Pekerjaan Anak di Indonesia. Jakarta (ID): Grasindo.
- Wahab, A., & Sudirman, S. (2023). Persoalan Kemiskinan Perkotaan. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 6(1), 230-238.
- Wardhana, T. A. N. D. K. (2021, December). PERANAN NEGARA DALAM MENJAMIN HAK BEBAS DARI KELAPARAN DALAM PERSPEKTIF KONVENSI EKOSOB. In *Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia* (Vol. 1, pp. 63-73).

- Wartoyo, Kholis, N., Arifin, A., & Syam, N. (2022). Koperasi syariah berbasis masjid berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat local selama pandemic COVID-19. *Jurnal penelitian ekonomi dn bisnis islam* , 15(1), 21-45.
- Wartoyo, W., & Haerisma, A. S. (2022). Crypyocurrency dari sudut pandang maqasid al syariah. *Afkarna : Jurnal studi islam interdisipliner Indonesia* .18(1), 110-139.
- Widari, Sri, Nasri Bachtiar, and Elvina Primayesa. "Faktor Penentu Stunting: Analisis Komparasi Masa Millenium Development Goals (MDGs) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21.3 (2021): 1338-1346.
- Win, E. (2018). Kemiskinan Di Indonesia (Faktor-Faktor Penyebab Dan Solusinya). *SOSFILKOM : Jurnal Sosial*.
- Winda Fitri. (2021). Tantangan Dan Solusi Terhadap Ketimpangan Akses Pendidikan Dan Layanan Kesehatan Yang Memadai Di Tengah Pandemi Covid-19 *Jurnaladm*.